

**TATA KELOLA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 :
STUDI KASUS ELIT LOKAL DESA KEDUNGREJA, KECAMATAN KEDUNGREJA,
KABUPATEN CILACAP**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Prodi Ilmu Politik



Oleh :

Fauzaan Arif Sumanto

1906016059

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Ilmu Politik.
UIN Walisongo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Fauzaan Arif Sumanto

NIM : 1906016059

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Tata Kelola Penanggulangan Pandemi Covid-19 : Studi Elit Lokal Desa Kedungreja,
Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap

Dengan ini telah saya setuju dan mohon segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang,30 Februari 2023

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP.196805051199503101002

PENGESAHAN

Pengesahan
Tata Kelola Penanggulangan Pandemi Covid-19 :
Studi Kasus Elite Lokal Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten
Cilacap

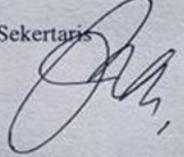
Disusun Oleh
Fauzaan Arif Sumanto
1906016059

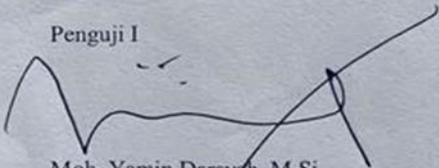
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
Pada tanggal 4 April 2023 dan dinyatakan lulus

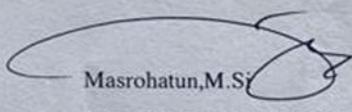
Susunan Dewan Penguji

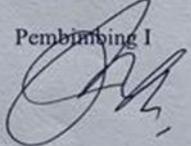
Ketua

Ahwan Hanani, M.Ag
NIP.19302003121001

Sekretaris

Drs. Nur Syamsudin M. Ag
NIP.1988062120018012001

Penguji I

Moh. Yamin Darsyah, M. Si
NIP.198409092019031007

Penguji II

Masrohatun, M. Si
NIP.198806212018022001

Pembimbing I

Drs. Nur Syamsudin, M. Ag
NIP. 1988062120018012001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, April 2023

Fauzaan Arif Sumanthro

NIM : 1906016059

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata‘ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tata Kelola Penanggulangan Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Elit Lokal Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap”. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu ‘Alahi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Politik S1 (S. Sos) pada Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wata‘ala dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, yang telah mengizinkan penulisan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag , dan Muhammad Mahsun, M.A, yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam hal pelaksanaan perkuliahan serta tugas akhir perkuliahan.
4. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag, selaku wali dosen yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan tugas akhir ini dengan baik

5. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian skripsi ini yang telah memberi ilmu dan bimbingan sehingga penulis mampu mengaplikasikan teori serta menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Segenap dosen dan tenaga pendidikan serta civitas academica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Pemerintah dan Elit Pemerintah Serta Elit Non-Pemerintah, Kelurahan Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang penulis butuhkan guna mendukung penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa kedua orangtua saya Edy Sariyanto dan Suminah yang senantiasa mendoakan, mencurahkan rasa cinta, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam kondisi apapun. Terimakasih tidak henti-hentinya penulis ucapkan, penulis tidak dapat membalas satupun kebaikan Bapak dan Ibu . Allah yang akan membalasnya dengan sebaik-baik pembalasan.
9. Kedua saudara penulis, Diska Sumanto dan Ryandi Sumanto yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Alaska Basketball, Rizal, Mas Mario dan lainnya
11. Teman-teman saya di Grup Remaja Masjid Al-Masqun , Reno, Galih, Farishi, Cecep, Ridho, Aceng dan Ojan
12. Kakak-kakak saya di Kos Pandawa, Mas Afif, Mas Rizal, Mas Faizun, Mas Juan.
13. Teman-teman Ilmu Politik 19'B , terimakasih untuk do'a, ilmu, dan motivasi yang selalu kalian tebarkan.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam masa studi dan penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang penulis lakukan baik pada masa studi maupun saat menyelesaikan tugas akhir

kuliah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan sebaikbaik pembalasan. Demikian skripsi ini penulis buat, semoga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, Edy Sariyanto dan Suminah yang senantiasa mencurahkan seluruh usaha, do'a, dan dukungannya di setiap langkah kehidupan saya.

Terima kasih atas segala perjuangan yang telah memperjuangkan hidup saya dengan kasih sayang, tulus dan ikhlas, yang selalu memberikan nasihat untuk kemajuan putrinya, serta Doa dan restu dalam setiap langkah saya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu, diberikan umur panjang yang bermanfaat untuk beribadah serta dilancarkan selalu rizkinya. Amiiiiin.

MOTO

“Manusia hanya bisa berencana , Allah yang bisa melakukan segalanya”

Tere Liye

“Be The Best Version of Yourself”

“I can do all the things”

Stephen Curry

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTO.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN	4
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis.....	5
1.5. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. <i>Collaborative Governance</i> dan Sinergitas Politik	5
B. Penanggulangan Covid-19 di Desa.....	9
1.6. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sumber dan Jenis Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14
BAB II.....	16
COLLABORATIVE GOVERNANCE	16
A. GOVERNANCE	16
1. Konsep Governance.....	16
b. <i>Local Government Coordinated</i>	17
c. <i>Multi Actor Coordinated</i>	17
B. COLLABORATIVE GOVERNANCE	17

1.	Konsep <i>Collaborative Governance</i>	17
2.	Pendekatan <i>Collaborative Governance</i>	18
3.	Model <i>Collaborative Governance</i>	19
4.	Proses <i>Collaborative Governance</i>	21
5.	Tantangan <i>Collaborative Governance</i>	23
C.	SINERGITAS POLITIK	23
1.	Pengertian Sinergitas Politik	23
2.	Cara Sinergitas Politik	24
D.	Elit Politik	26
BAB III		30
DESA KEDUNGREJA		30
A.	Desa Kedungreja	30
B.	Kondisi Geografis	31
C.	Kependudukan	31
D.	Keagamaan	33
E.	Kondisi Ekonomi	33
F.	Tingkat Pendidikan	34
G.	Pemerintahan	34
BAB IV		36
Penanggulangan Covid-19 di Kedungreja dan Elit Lokal Kedungreja		36
A.	Gambaran Umum Covid-19 di Kedungreja	36
B.	Tim Satgas Covid-19 Desa Kedungreja	38
C.	Peningkatan Indeks Desa Membangun	43
D.	Elite Desa Kedungreja	46
1.	Kepala Desa Kedungreja	48
2.	Kapolsek Kedungreja	49
3.	Danramil 12/ Kedungreja	49
4.	Kepala Puskesmas Kedungreja	50
4.	Anggota DPRD Cilacap	51
5.	Tokoh Agama	52
6.	GenRe (Generasi Berencana)	53
7.	Pemuda Pancasila	54
BAB V		55
KOLABORASI ELITE LOKAL DALAM TATA KELOLA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19		55
A.	Kolaborasi Elite Local Government dalam Kerangka <i>Collaborative Governance</i>	55
1.	Kondisi Awal	55

2. Kepemimpinan Fasilitatif	59
3. Desain Institusional.....	61
4. Proses Kolaborasi.....	64
B. Elite Lokal Non-Pemerintah	75
1. Kondisi Awal.....	76
2. Kepemimpinan Fasilitatif	77
3. Desain Istitusional.....	79
4. Proses Kolaborasi.....	81
C. Sinergitas Elit Lokal Pemerintah	91
a. Komunikasi.....	91
b. Koordinasi	92
D. Sinergitas Elit Lokal Non-Pemerintah	93
a. Komunikasi.....	93
b. Koordinasi	94
BAB VI	95
KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
Daftar Pustaka	97
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

DAFTAR TABEL

Table 1.1 DATA COVID-19 KEDUNGREJA.....	3
Table 2.1 KETERANGAN.....	3
Table 3.2 PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE	18
Table 4.2 ANSELL DAN GASH COLLABORATIVE GOVERNANCE.....	20
Table 5.2 MOORE DAN STEPHEN.....	21
Table 6.3 JENIS KELAMIN	32
Table 7.3 JENIS KELAMIN	32
Table 8.4 IDM	44
Table 9.4 IDM 2	45
Table 10.4 DATA COVID-19.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4 VAKSIN	40
Gambar 2.4 PENYEMPROTAN DISINFEKTAN.....	41
Gambar 3.4 POSKO COVID-19	41
Gambar 4.4 DIGITALISASI	42
Gambar 5.4 UMKM.....	43

ABSTRAK

Desa Kedungreja merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kedungreja, kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kedungreja sendiri karena merupakan Desa yang tergolong Luas yang berada di Kecamatan Kedungreja dan letaknya berada di pusat kecamatan, selain itu Desa Kedungreja juga memiliki pusat Kawasan ekonomi di Pasar Mingguan sebagai pusatnya, untuk pusat pemerintahannya juga terletak di Desa Kedungreja. Desa Kedungreja juga merupakan desa dengan angka penurunan kasus Covid-19 yang cukup signifikan

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan untuk analisis data yaitu dengan empat tahap, menelaah data, reduksi data, penyusunan dan penyajian, pemeriksaan keabsahan dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam analisa adalah *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan menurut informasi dari Puskesmas Kedungreja, Kasus Covid-19 pertama yang terdeteksi di wilayah Kedungreja adalah di Dusun Tegalak. Dikarenakan *Covid-19* yang semakin merebak di Kecamatan Kedungreja khususnya Desa Kedungreja, Lalu di bentuk Tim Satgas Penangan *Covid-19* Desa Kedungreja yang merupakan bagian dari Satgas Penangan *Covid-19* Desa Kedungreja yang terdiri dari para Elit Pemerintah dan Non-Pemerintah yang ada di Desa Kedungreja Adi Purnawan, Danramil 12 Kapten Inf. Tasino, Kapolsek AKP Suparjo dan Eko Mulyono, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam upaya untuk menangani pandemi *Covid-19*, peran Elit lokal desa sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus dan memastikan kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki, para Elit Desa dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Elit lainnya untuk membangun strategi yang efektif dan kolaborasi dalam memerangi pandemi ini. Sehingga Penanggulangan *Covid-19* di Kedungreja pada rentang waktu 2020 sampai 2022 terbilang cukup baik dan strategi yang cukup sukses sehingga penekanan terhadap angka positif Covid-19 di Kedungreja dapat semakin rendah dari bulan-ke bulan. Hal ini penanggulangan Covid di Kedungreja tidak terlepas dari peran Elite-elite lokal di Desa Kedungreja, baik *Elite Local Government* maupun *Elite Local Non-Government*.

Kata Kunci : Tata Kelola, Collaborative Governance, Elit, Penanggulangan Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Saat ini permasalahan mengenai kekuasaan, dan kekayaan Elit baik secara material atau non material, yang ada di pusat maupun di daerah seringkali hadir dalam berbagai sector di kehidupan kita. Dalam kehidupan yang di lalui dan di dasarkan pada arus informasi yang sangat cepat, pemahaman mengenai Elit ataupun Oligark di suatu tatanan masyarakat semakin berkembang pula, khususnya dalam berbagai isu serta, bagaimana para Elit atau Ologark memiliki sumberdaya kekayaan maupun kekuasaan yang cukup besar untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi di regionalnya. Pengaruh yang dihasilkan juga memiliki tujuan sesuatu yang tidak jauh-jauh dari kepentingannya sendiri untuk mempertahankan atau mengekalkan kekayaan maupun kekuasaan yang dia punya untuk tetap berada di kalangan Elit diantara masyarakat.

Keberadaan Elit ini tentunya memunculkan ketidaksetaraan yang cukup ekstrem diantara masyarakat, hal ini juga mempengaruhi hak-hak politik Elit yang biasanya lebih banyak memiliki hak dibandingkan dengan masyarakat lain. Pemahaman atas Oligark dan Oligarki pada dasarnya berangkat pada hasil dari ketidaksetaraan dan politik ekstrem yang terjadi di masyarakat (Winters, 2011). Ketimpangan Kekuasaan ataupun kekayaan ini sangat subur terjadi di tengah-tengah kondisi demokrasi, dimana mereka yang memiliki sumber daya lebih dengan bebas mencari kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa takut ada intervensi dari pihak-pihak negara selaku administrator dalam penyelenggaraan system demokrasi, karena pada dasarnya sama, yaitu setiap orang di bebaskan untuk bekerja dan mencari uang selagi hal itu tidak melanggar hukum yang berlaku. Kiswondari (2022) menyatakan dalam ranah pusat, akhir-akhir ini masyarakat ditampakan dengan sejumlah Elit-Elit politik maupun Elit ekonom, berlomba-lomba membangun relasi serta hubungan yang baik satu sama lain, Elit-Elit ini melakukan berbagai macam cara agar komunikasi dan hubungan berjalan dengan baik dan juga lancar, hal ini tentu akan meningkatkan sinergitas antar Elit dalam membangun hubungan yang baik serta untuk menunjukkan rasa hormat antar sesama Elit. Contohnya, seperti isu pragmatisme para Elit parpol yang terjadi akhir-akhir ini. Pragmatisme elit-elit parpol ini meningngkat akhir-akhir ini bertujuan untuk terus mengakumulasikan kekuasaan terkait

akumulasi kekuasaan politik dengan cara berkoalisi atau berkerja sama antar Elit parpol yang satu dengan yang lainnya.

Apabila dilihat, Elit adalah suatu subjek penting dalam penanganan *Covid-19* di Desa Kedungreja. Pandemi *Covid-19* yang cukup lama ada di Indonesia, membuat para elit harus bisa bertahan untuk mempertahankan kekuasaan baik materil maupun non-materil, selain itu karena pandemic yang cukup lama dan continutas, hal ini menjadikan Sebagian elit lebih dermawan, karena mereka lebih aktif memberikan bantuan-bantuan kepada warga-warga yang kurang mampu atau mereka yang terdampak pekerjaannya akibat pandemic Covid-19 ini sehingga secara tidak langsung elit-elit desa ini bersinergitas dengan pemerintah lokal untuk ikut andil dan berkontribusi dalam penanggulangan *Covid-19* di Desa Kedungreja ini.

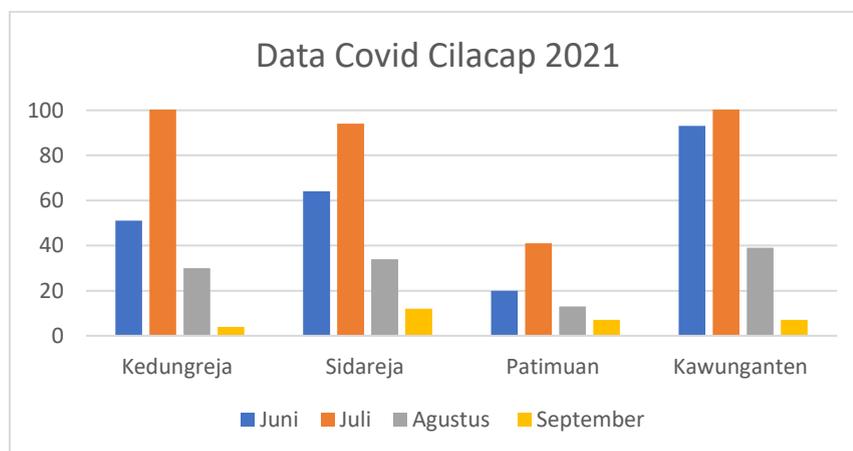
Penelitian ini nantinya bertujuan untuk membahas mengenai siapa saja Elit yang terlibat, sedan juga faktor dengan pendekatan *Collaborative Governance* dari Elit-Elit yang terdiri dari *Government Elit*, maupun *non-Government Elit* yang ada di Desa Kedungreja dalam penanggulangan Pandemi *Covid-19* ..Selanjutnya peneliti juga ingin membahas mengenai pengelolaan jaringan sosial di dalam konteks penanggulangan Covid-19, seperti Elit-Elit Desa seperti Kepala Desa Adi Purnawan lalu Sekertaris Desa Siman, lalu Elit-Elit lain seperti Kyai atau Ulama seperti Kyai Sodhikin, Lalu Politisi PKS yang berada di DPRD Cilacap yaitu Rusmanto. Dari beberapa Elit tersebut bisa terlihat jaringan sosial yang muncul dalam menghadapi Covid-19, hal ini bisa di lihat dari berbagai kebijakan – kebijakan yang para elit tersebut lakukan seperti, koordinasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Kyai Shodikin dalam pengetatan bahaya covid-19 di tempat ibadah dan madrasah yang di pimpinnya, hal ini bisa terlihat dari peraturan penggunaan masker di Madrasah Kyai Shodikin, Hal ini tentu bersinergi dengan kebijakan turunan dari Pemerintah Desa yaitu *Social Distancing* yang dipimpin oleh Kepala Desa sendiri, Dari hal tersebut bisa dilihat bahwasannya masing-masing Elit yang menguasai sumber dayanya masing-masing dapat bersinergi dengan baik pada saat penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja. Koordinasi yang baik tersebut tidak terlepas dari tata kelola yang terbangun sejak lama antara Elit Politik dalam hal ini pemerintah, dengan Elit Lokal setempat yang memposisikan diri bukan hanya sebagai masyarakat biasa namun juga, pemberi masukan dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kontesk sosial Elit Lokal yang ada.

Pemilihan Desa Kedungreja sendiri karena merupakan Desa yang tergolong Luas, yang berada di Kecamatan Kedungreja, dan letaknya berada di pusat kecamatan, selain itu Desa Kedungreja juga memiliki pusat Kawasan ekonomi di Pasar Mingguan sebagai

pusatnya, untuk pusat pemerintahannya juga terletak di Desa Kedungreja sehingga Desa Kedungreja sendiri merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan untuk kecamatan Kedungreja.

Pada saat pandemic *Covid-19*, Pusat Pemerintahan dan Perekonomian di Desa Kedungreja yang paling terdampak, namun dengan sinergitas masyarakat khususnya orang-orang berpengaruh (Elit) Desa inilah. Oleh karenanya banyak orang-orang berpengaruh (Elit) desa yang menempati Kawasan desa Kedungreja ini, Elit-Elit seperti Politisi dalam hal ini adalah Anggota DPRD, Akademisi, Pengusaha, dan juga Pejabat, selain itu Desa Kedungreja sendiri merupakan desa terbesar di Kecamatan Kedungreja dan memiliki perwakilan di DPRD Cilacap yang cukup banyak. Sehingga Peneliti tertarik dengan obyek penelitian yaitu Elit Desa dan Sinergitasnya dalam penanganan Pandemi *Covid-19* karena bisa diuraikan nantinya sebab dan faktor yang membuat suatu Desa dapat bertahan dengan andil orang-orang besar dan berpengaruh yang ada di desa tersebut.

Table 1.1 DATA COVID-19 KEDUNGREJA



Sumber: <http://cilacapkab.pmi.or.id/kategori/detail/update-data-covid19-kabupaten-cilacap/10>

Table 2.1 KETERANGAN

	Juni	Juli	Agustus	September
Kedungreja	51	104	30	4
Sidareja	64	94	34	12
Patimuan	20	41	13	7
Kawungante	93	119	39	7

Dalam table tersebut dapat kita lihat dalam 4 (empat) bulan terdapat kenaikan dan penurunan signifikan korban positive Covid-19 di 4 (empat) Desa di Kecamatan Kedungreja. Desa Kedungreja menjadi salah satu desa dengan penurunan Covid-19 yang cukup signifikan

dibandingkan dengan desa yang lain, dibelakang terdapat Desa Kawunganten dengan presentase yang hampir sama,namun dengan jumlah yang lebih tinggi, penyebab lain penentuan obyek penelitian tersebut adalah karena para Elit Desa ini disinyalir memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengendalikan masa sehingga pengendalian masa tersebut bisa digunakan untuk mengontrol penyebaran *Covid-19* dengan berbagai pola strategi-strategi dan juga sinergi dengan masyarakat atau Elit lainnya penyebab lain juga berkaitan dengan kekuasaan material dan non materil yang mereka miliki,sejauh mana kekuasaan tersebut digunakan untuk membantu dalam penangan *Covid-19* di desa Kedungreja termasuk sumber daya yang para Elit ini punya.Tentunya denga napa yang para Elit ini punya dan kolaaborasi yang para Elit bangun,kita nantinya dapat melihat lahirnya moralitas yang hadir dalam Elit-Elit ini untuk membantu pemerintah dalam pengkondisian maupun penanganan *Covid-19* ini.Dari sini juga nantinya terdapat gamabaran mengenai wujud sinergitas yang terjadi antara Elit Desa dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi para Elit tersebut pada saat penanggulangan *Covid-19* di Desa Kedungreja,Maka dari itu penelitian ini diberi judul **“Tata Kelola Penanggulangan Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Elit Lokal Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses kolaborasi dan sinergisitas Elit lokal dalam penanggulangan *Covid 19* di desa Kedungreja kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk kolaborasi dan sinergitas yang terjadi antara para Elit Desa Kedungreja dalam Penanggulangan *Covid-19*
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kolaborasi dan sinergitas yang terjadi antar Elit Desa Kedungreja dalam Penanggulangan *Covid-19*

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga wawasan pengetahuan akan pembaca mengenai bentuk sinergitas yang terjadi diantara Elit Desa

Kedungreja dalam Penanggulangan *Covid-19* dan juga implementasi kolaborasi dan sinergitas tersebut dalam penanggulangan *Covid-19* oleh Elit Desa Kedungreja,sertta dapat menjadi referensi yang bertujuan untuk mengenal bagaimana hubungan kolaborasi dan sinergitas yang terjadi antar Elit lokal pada saat krisis *Covid-19*,selain itu denngan obyek kajian Elit Desa tersebut diharapkan nantinya akan memberikan pandangan terkait pola-pola sinergitas yang terbentuk dari para Elit berdasarkan informasi bentuk dan juga implementasinya.

Kemudian, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang dapat memperbaiki dan juga menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini:

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai kolaborasi dan sinergitas Elit Lokal Desa Kedungreja dalam penanggulangan krisis pandemic *Covid-19* dan juga pola kolaborasi dan sinergitasnya,serta dapat menjelaskan kaitannya dengan kenyataan di lapangan dengan teori politik sebagai bidang keilmuan peneliti.

b. Bagi Pembaca

Bagi Pembaca, diharapkan dapat menjadi referensi baru terkait kolaborasi serta sinergitas Elit Desa dalam sisi positifnya yaitu sebagai agen penanggulangan *Covid-19* di Desa Kedungreja.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

A. Collaborative Governance dan Sinergitas Politik

Penelitian dari **Harmana Djogeh** dkk. (2021) yang berjudul “Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tarakan yang berbasis collaborative governance masiih belum berjalan optimal dikarenakan berbagai factor, baik factor internal maupun factor eksternal, seperti fasilitas daya tampung TPA yang masih kurang dan juga kurang Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Peneliti menggunakan teori collaborative governance oleh Chriss Ansell dan Alison Gash sebagai acuan dan Analisa *SWOT* terhadap data pengelolaan sampah pemerintah Kota Tarakan yang berbasis *Collaborative Governance*. Peneliti juga mencoba mengkaji instrument hukum yang

dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis collaborative governance tersebut seperti UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Proses mekanisme kolaborasi juga dikaji oleh peneliti seperti sosialisasi kepada masyarakat dan tahap pengangkutan sampah. Skripsi dari **Hermawan Nuari** (2016) yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival”. Penelitian menghasilkan bahwa proses collaborative governance yang terjadi dalam *Ethno Carnival Banyuwangi* adalah melalui Kerjasama yang simultan. Kerjasama diawali dengan proses yang terstruktur dengan melibatkan beragam Lembaga dan juga actor pemerintah maupun swasta dan di dukung oleh komunikasi yang fleksibel dalam pembahasan masalah-masalah terkait. Lalu timbul kepercayaan masing-masing stakeholders yang membuat Kerjasama terbangun sehingga dilanjutkan komitmen dengan hasil diterbitkannya Mou dan SK Bupati terkait. Collaborative juga menghasilkan sebuah outcomes berupa persiapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* berupa teknik operasional penyelenggaraan tersebut. Penelitian dari **Sudarmo**(2021)”*Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan”. Menghasilkan kolaborasi yang terjadi yaitu antara beberapa stakeholder seperti BAPPEDA Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kelurahan Bandengan, Kolaborasi antara berbagai Lembaga dan juga actor-aktor pemerintah tersebut didapati masih belum optimal, kolaborasi yang terjadi hanya bersifat sukarela atau semiformal sehingga belum sepenuhnya terdapat pada kesepakatan tertulis antar stakeholders tersebut sehingga tujuan dari collaborative tersebut masih belum berjalan optimal, namun kolaborasi yang ada tetap terus berjalan dengan kontinuitas yang stabil serta tujuan yang sama yaitu, Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan. Kendala kolaborasi yang dihadapi oleh peneliti dilakukan dengan Analisa ukuran Governance oleh De Steve, seperti kurangnya rasa percaya antara stakeholders, lalu partisipasi antar stakeholders yang terbatas, belum adanya kejelasan tata kelola Penanganan Rob melalui *governance*, dan kurang terpenuhinya akses sumber daya yang ada. Jurnal dari **Kasim Azhan** dkk. (2021) berjudul “ Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Collaborative Governance*”. Menghasilkan bahwa tata kelola kolaboratif cukup terlihat dari diterapkannya Sebagian tahap penyusunan desain, implementasi monitoring evaluasi pada system cortex berupa dinamika politik, lalu terlibatnya actor-aktor kolaborasi dalam terciptanya *collaborative dynamics*. Para actor kolaborasi yang terlibat juga menjalankan peran masing-masing seperti identifikasi informasi

awal, penjelasan masing-masing aksi, lalu pelibatan masyarakat untuk aksi dengan izin kesepakatan pihak-pihak terkait, actor non-government juga dapat terlibat dalam perluasan saluran pengaduan masyarakat yang memadai. Penelitian juga menghasilkan upaya perbaikan terhadap tata kelola kolaboratif yang baik dalam strategi pencegahan korupsi yaitu, penyesuaian payung hukum atau regulasi, pemenuhan kualitas dan kapasitas sdm yang cukup, pelibatan lebih banyak actor non-government untuk menimbulkan trust yang baik dalam masyarakat. Skripsi dari **Nurhidayah Ninggi** (2020) yang berjudul “*Sinergitas Stakeholder di desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat (Studi di desa Seruni Mumbul kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur)* “. Penelitian ini menghasilkan sinergitas Stakeholder yang ada di Desa Seruni Mubul dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya, juga bersi faktor pendukung dan penghambat sinergitas tersebut. Faktor pendukung dalam sinergitas yang terjadi adalah keterbukaan, komunikasi yang lancar, saling menguntungkan, dan memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sementara factor penghambatnya adalah pandangan masyarakat yang belum sama atau tidak terlalu kompak. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengambil obyek sinergitas yang ada di tingkat lokal dalam hal ini adalah Desa serta subyek penelitian yang merupakan subyek atau orang-orang pilihan dengan kriteria tertentu. Perbedaannya adalah apabila penelitian terdahulu berfokus pada stakeholder nya serta sinergitasnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai elit desa yang membangun sinergitas dalam penanggulangan pandemic covid-19 dan Analisa teori sosialpolitik untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Karya dari **Kiki Rasmala Sani** (2021) dengan judul “*Sinergitas Pemerintah Desa Salohe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan BUMDESA Kabupaten Sinjai*”. Dalam penelitian ini menghasilkan tentang pola kreatifitas dan inovatif hasil sinergitas pemerintah Desa Salohe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan BUMDESA, khususnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergitas yang timbul menghasilkan perekonomian yang meningkat serta membangun perekonomian guna menghasilkan lapangan kerja, selain itu peningkatan produksi barang dan jasa desa, meningkatkan perdagangan antara pemerintah desa Salohe dan, pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal untuk konsumen. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana sinergitas dapat terjadi di tingkat lokal yaitu desa untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat desa. Perbedaan penelitian terdahulu ada lebih memfokuskan pada Pemerintah Desa dan juga Dinas Pemberdayaann Masyarakat Desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus

pada Elit Desa secara menyeluruh pada saat penanggulangan pandemic covid-19 dan jua Analisa teori sosial politik untuk menjelaskan fenomena yang sedang di teliti. Penelitian dari *Sarja*,(2020) dengan judul “ *Sinergitas Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Membangun Ekonomi Desa*” Studi Kasus Desa Bukateja. Dalam penelitian ini menghasilkan tentang potensi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia apabila dilaksanakan dengan sinergitas yang baik antara masyarakat ddengan pemerintah Desa Bukateja, sebagai bagian dari peningkatan produktifitas dan juga aktivitas pembangunan ekonomi di Desa Bukateja. Sinergitas untuk membangun sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam serta menciptakan UMKM bagi pemanfaatan hasil produksi masyarakat setempat. Sementara itu kolaborasi masyarakat desa Bukateja dengan pemerintah desa melihat adanya sumber desa wisata sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan juga hal ini telah berdampak cukup baik bagi pengurangan pengangguran, lalu menurunnya angka kemiskinan di desa Bukateja dan juga stabilnya penghasilan masyarakat tersebut. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan di laksanakan adalah, peranan sinergitas aktor-aktor penting di desa untuk peningkatan dan pemulihan tujuan yaitu perekonomian masyarakat desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah adanya subyek penelitian yang lebih luas dalam penelitian terdahulu yaitu masyarakat secara umum dan pemerintah desa, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan subyek yang lebih spesifik yaitu Elit Desa dalam situasi pandemic Covid1-19, dan Analisa teori sosial politik untuk menjelaskna fenomena yang di teliti. Selanjutnya karya dari *Suci Rahmah Yusrafitri*,(2022) dengan judul, “*Sinergitas Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19*”. Dalam penelitian ini mengahasilkan pada sinergitas para stakeholder dalam menangani masalah Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Stakeholders khususnya para Elit pemerintah menjadi kunci apenting bagi proses penannggulangan kemiskinan akibat Covid-19 dengan berkoordinasi dan bersinergitas antar sesame instansi maupun tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Sinergitas ini bersifat multidimensional dan segala faktor yang ada karena permasalahan yang di timbulkan oleh pandemic covi-19 mencakup segala sisi dan dimensi. Adanya kendala dalam penelitian ini seperti penelitian yang terbatas karena situasi Covid-19 dan juga peneliti melihat adanya koordinasi yang kurang baik antara stakeholders dalam keterbukaan publikasi informasi, baik dari pihak instansi maupun juga pihak swasta dalam hal ini adalah masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu adalah pada keterangan waktu penelitain yaitu pada masa pandemic covid-19 serta meneliti serta mengenai sinergitas yang terjadi antar aktor yang memiliki peran krusial dalam penanggulangan covid-19. Perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, cakupan yang luas dalam penelitian terdahulu yaitu mencakup stakeholders di Indonesia sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan cakupannya hanya sebatas Elit Desa yang ada di Desa kedungreja dan Analisa teori sosialpolitik untuk menjelaskan fenomena yang ditimbulkan untuk diteliti. Lalu penelitian dari *Bayu Nurrohman* (2021) dengan judul “*Penguatan Kolaborasi dan Sinergi di Level Desa dalam Menangani Penyebaran Covid-19*”. Dalam penelitian ini menghasilkan aktivisme peran aktor non-pemerintah baik secara individu maupun komunitas terlihat menunjukkan empati dan solidaritasnya terhadap warga yang terdampak Covid-19. Dalam Perkembangannya peneliti menemukan permasalahan ataupun kendala yaitu bahwa aktor di level desa dalam hal ini adalah Elit deesa kesulitan merancang suatu program yang secara strategis dapat menangani Pandemi Covid-19 di desanya dan kedua adanya kendala perubahan anggaran desa untuk Covid-19 dalam hal APBDesa sehingga berdampak pada pembangunan yang ada. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, meneliti sinergitas aktor yang ingin menanggulangi Covid-19. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu adalah pada aktornya dimana, penelitian terdahulu focus pada masyarakat umum dan pemerintah setempat sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan focus hanya pada Elit saja dan Analisa teori sosialpolitik untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti tersebut

B. Penanggulangan Covid-19 di Desa

Penelitian dari *Udin Rosidin* (2020) dengan judul “*Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut*”. Dalam penelitian ini menghasilkan para tokoh masyarakat di desa Jayanegara dengan membangun suatu pengetahuan yang valid mengenai Covid-19 sehingga masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada dapat mengambil sikap yang sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Jayaraga. Hal ini menunjukkan peran aktif elit pemerintahan dan Elit lokal dalam bersinergi untuk penanggulangan Covid-19 dengan melibatkan masyarakat sebagai agen penanggulangan dengan dibekali pemahaman dan pengetahuan yang baik terkait virus Covid-19 ini. Peran tokoh masyarakat atau Elit lokal tersebut terbukti efektif untuk mempengaruhi dan mengubah persepsi masyarakat untuk hidup lebih teratur dan sehat sehingga menjadi kunci memutus penyebaran virus Covid-19. Selanjutnya adalah penelitian dari *Dwi Ertiana* (2020) berjudul “*Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di*

Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri". Dalam penelitian ini menghasilkan setelah hasil yang baik terkait penanggulangan Covid-19 dengan jalan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, aparat pemerintah dan karang taruna tentang tata cara pembuatan disinfektan. Selain pembuatan disinfektan pemerintah setempat juga mengeluarkan tata cara atau prosedur pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan sosialisasi penggunaan masker, tata cara menjaga jarak (Social Distancing). Namun hasil dilapangan tetap menunjukkan ada Sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan atau tatacara yang telah disepakati bersama sehingga rentan terinfeksi oleh virus Covid-19. Dalam penanggulangan Covid-19 memerlukan kersama semua pihak khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang secara efektif karena mudah mempengaruhi dan mengubah pandangan masyarakat. Selain tokoh-tokoh masyarakat, tenaga medis juga memegang andil cukup besar dalam penanggulangan Covid-19 yang ada di Desa Maduretno karena memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga menyadari bahwa Covid-19 berbahaya dan penerapan protocol Kesehatan adalah hal yang baik untuk situasi saat itu. Selanjutnya adalah Penelitian dari **Ziyan Afriliyanti Nafilah** (2020) dengan judul "*Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*". Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Desa Lowayu terbilang efektif dan berhasil karena menggunakan beragam Teknik strategi komunikasi untuk mengkomunikasikan tata cara pencegahan dan penanggulangan Covid-19 seperti prosedur protocol Kesehatan, menjaga jarak, dan tata cara menjaga kebersihan, Strategi yang digunakan meliputi Redudancy, yaitu metode mempengaruhi dengan cara berulang-ulang, lalu metode Canalizing, yaitu metode untuk memahami pengaruh dan juga meriset pola perilaku dalam individu atau masyarakat, Lalu metode membujuk atau persuasive yang dilakukan dengan kolaborasi tokoh masyarakat setempat karena lebih efektif dan mudah, lalu Edukatif, teknik yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar dan umum mengenai konteks pencegahan dan penanggulungan Covid-19 di Desa Lowayu. Selain itu yang membuat penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu berhasil adalah penggunaan teknik Koersif yaitu dengan jalan memaksa dalam bentuk peraturan maupun perintah dari instansi pemerintah terkait. Selanjutnya penelitian dari **Gerry R.J** (2020) berjudul "*Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan)*". Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa strategi pemerintah desa dalam menanggulangi Covid-19 seperti memaksimalkan berbagai macam sumberdaya yang didapatkan oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pemanfaatan bantuan sumberdaya baik materil

maupun nonmateri yang efektif tersebut merupakan kunci dari strategi penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Desa Mokobang, Dalam hal materi adalah cukup tepat sasaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam hal non-materi adalah, partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam sosialisasi dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Strategi selanjutnya yang cukup terlihat adalah, diadakannya pos penjagaan keluar masuk desa Mokobang dengan penerapan Cuci tangan dan mewajibkan surat bebas Covid-19 bagi orang-orang yang berasal dari luar kecamatan Modinding, yaitu kecamatan desa Mokobang. Selain itu dibatasinya kegiatan keramaian seperti ibadah, sosial dan budaya juga memerankan peranan aktif dalam pencegahan Covid-19 di desa Mokobang, namun kendala yang jelas terlihat adalah tingkat Pendidikan masyarakat yang cukup rendah sehingga cukup sulit untuk mensosialisasikan jaga jarak diantara masyarakat tersebut. Selanjutnya penelitian dari **Riski Maunde** (2021) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”*. Dalam penelitian ini menghasilkan gambaran Variabel atau factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Covid-19, menggunakan Konsep implementasi Kebijakan Edward III (2002) yaitu Komunikasi, yaitu adanya komunikasi sinergitas yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan maupun daerah, namun Pendidikan masyarakat yang rendah membuat komunikasi tersebut seperti terhenti di masyarakat dan tidak ditangkap dengan baik pemahaman terkait Covid-19 yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Lalu Sumberdaya, sumberdaya desa Kuma cukup mendukung dalam pengimplementasian kebijakan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya adalah Disposisi atau komitmen untuk konsistensi penanggulangan, hal ini cukup baik apabila melihat dari sisi aparat pemerintah yang tidak henti-henti melakukan sosialisasi untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, seperti, penggunaan masker, menjaga jarak, lalu menghindari hal-hal yang mengacu keramaian, namun persepsi dan pandangan masyarakat terkait hal tersebut masih kurang, serta partisipasi masyarakat yang cenderung kurang mendukung komitmen dan konsistensi tersebut. Selanjutnya adalah, Struktur Birokrasi yaitu berjalan dengan baiknya mekanisme prosedur implementasi kebijakan sehingga setiap instansi dan aparat mengerti akan tugasnya masing-masing dalam menaggulangi Covid-

1.6. METODE PENELITIAN

Penelitian politik merupakan suatu bentuk riset politik dalam menganalisa, atau membaca situasi politik, sikap politik, perilaku politik, bagaimana kebijakan dibuat, dan juga relasi atau hubungan-hubungan antar aktor politik yang ada di suatu institusi pemerintahan (Lisa Harrison.2007). Dalam riset atau kajian politik ini, peneliti akan menggunakan metode berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu obyek dengan fokus peneliti sebagai instrument utama, sehingga diperoleh data yang valid (Mertha Jaya.2020). Untuk analisis kajian yang dikembangkan menggunakan filosofi dari teori sinergitas. Sinergitas sendiri merupakan kualitas kerjasama yang efektif dengan bentuk modal sosial bagi organisasi dan terutama bila Kerjasama tersebut didedikasikan bagi kepentingan bersama organisasi (Ancok.2003).

Pendekatan penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus sendiri menurut Mertha Jaya (2020) merupakan pendekatan yang berkaitan dengan suatu kelompok, organisasi, maupun individu dengan peristiwa dan latar belakang yang terjadi, tujuannya untuk mendapatkan suatu gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang diteliti.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk melihat gambaran sinergitas Elite-elite politik yang ada sebagai sebuah individu dan juga kelompok dalam Latar Desa Kedungreja dengan konteks peristiwa Covid-19 yang terjadi, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang mendalam berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang valid sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sumber data merupakan hal yang penting karena merupakan pondasi dari informasi penelitian yang akan diperoleh. Sumber data yang diperoleh terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

Data primer sendiri merupakan data yang didapatkan secara langsung, dan dalam konteks penelitian ini nantinya data primer akan didapatkan melalui metode observasi lapangan dan juga wawancara informan untuk memperoleh informasi yang sesuai dan kredibel. Adapun lingkup daerah observasi hanya pada desa Kedungreja, dan untuk obyek

wawancaranya adalah Elit-Elit yang ada di desa Kedungreja yang secara khusus membantu menanggulangi Covid-19.

Data Sekunder sendiri merupakan data yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer, biasanya berbentuk tulisan, baik artikel, jurnal, maupun berita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Triangulasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. dalam penelitian ini Adapun Teknik pengumpulan data Triangulasi yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Menurut Mertha Jaya (2020) wawancara merupakan metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data, dalam hal ini adalah informan. Wawancara yang menggunakan jenis wawancara campuran yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Penggunaan metode wawancara terstruktur dapat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang terarah seperti, bentuk sinergitas, hubungan sinergitas, dan pendapat informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara tanpa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Hal ini tentu sesuai dengan Teknik penentuan informan yang akan dilakukan menggunakan dua Teknik yaitu penentuan informan (*Purposive Sampling*) dan Informan Kelanjutan (*Snowball Sampling*). Wawancara sendiri dilakukan dengan sepuluh narasumber yang terdiri dari delapan elit lokal Desa Kedungreja dan dua warga Desa Kedungreja

Penentuan Informan dengan Teknik tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dikarenakan situasi informan yang harus dipertimbangkan dahulu, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dan kondisi-kondisi yang berada di luar kendali peneliti

b. Observasi

Observasi sendiri merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati obyek yang diteliti, menganalisa, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian (Mertha Jaya.2020). Pengamatan, penelitian, penganalisaan, serta pencatatan hasil temuan penelitian, dilakukan melalui klasifikasi observasi Tersamar dimana, informan mengumpulkan

data tanpa berpartisipasi namun informan tetap akan menyadari bahwa mereka sedang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap Elit-elite desa Kedungreja serta bentuk kontribusi dalam penanggulangan *Covid-19* di Kedungreja secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik kajian dari bahan documenter yang tertulis, dapat berupa teks, surat kabar, majalah, surat-surat berharga, artikel, jurnal, maupun sejenisnya. Bahan penelitian yang berasal dari dokumentasi berasal dari pemikiran narasumber lain dalam konteks secara tidak langsung yang tertuang dalam bentuk tulisan serta dipublikasi untuk dianalisa dan diinterpretasikan serta digali untuk mencapai pemahaman mengenai argument-argumen tertentu (Mertha Jaya.2020)

4. Teknik Analisis Data

Neuman (2000) Analisis Data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data-perilaku yang muncul dan objek-objek terkait dengan focus penelitian. Lalu pola-pola tersebut diidentifikasi dan diinterpreteasikan kedalam istilah-istilah teori sosial Menurut Ghoni (2020) Peneliti kualitatif menggunakan analisis induktif yang berarti bahwa kategori-kategori, tema-tema, dan pola berasal dari data. Kategori-kategori yang muncul dari hasil catatan lapangan lokasi penelitian, berasal dari dokumen dan hasil wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data adapun proses analisa data kualitatif adalah :

A. Menelaah Seluruh Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, pengamatan atau observasi lapangan, dokumentasi, dibaca dengan baik, dipahami, dan ditelaah secara mendalam.

B. Reduksi Data

Reduksi data ini menggunakan cara abstraksi. atau membuat rangkuman inti proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

C. Penyusunan dan Penyajian

Data yang telah di reduksi dan dijadikan satuan-satuan, selanjutnya di susun dan di kategorisasikan berdasarkan isi data tersebut. Hal ini nantinya untuk memudahkan dalam proses penyajian sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan runtut.

D. Pemeriksaan Keabsahan dan Penarikan Kesimpulan

Pemeriksaan Keabsahan ini tentunya harus dalam konteks teori substantif yang terkait dengan penelitian tersebut. Pemeriksaan keabsahan harus ditekankan dengan baik agar pengkoreksian sesuai sehingga menciptakan Analisa yang valid. apabila telah sesuai selanjutny dapat ditarik kesimpulan yang dapat merepresentasikan hasil dari Analisa tersebut

B. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I ini diisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Kajian Teori

Dalam bab II ini diisi dengan penjelasan mengenai teori Governance, Collaborative Governance, dan Elit Politik

BAB III Gambaran Umum Desa Kedungreja

Dalam bab III ini diisi dengan gambaran secara umum Desa Kedungreja

BAB IV Gambaran Umum Penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja dan Elit Lokal Desa Kedungreja

Dalam bab IV ini diisi dengan Gambaran Umum *Covid-19* dan Penanggulangan di Kedungreja serta Identifikasi Elit Lokal Kedungreja

BAB V Kolaborasi Elit Lokal Desa Kedungreja (Collaborative Governance)

Dalam bab VI ini diisi dengan Kolaborasi Elit Lokal Kedungreja Analisa Teori *Collaborative Governance* Ansell and Gash

Bab VI Kesimpulan dan Saran

BAB II

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori politik yang berkaitan dengan Sinergitas dan Elit sebagai dasar teoritis penelitian ini, pentingnya mendasarkan penelitian pada kerangka teoritis agar nantinya peneliti sendiri dapat mengetahui Batasan-batasan pembahasan yang akan penelitian sehingga senantiasa dapat menjaga obyektivitas penelitian. Teori-teori dibawah nantinya akan mencakup dasar pengertian, pengenalan konsep, manfaat dan tujuan untuk penelitian politik ini.

A. GOVERNANCE

1. Konsep Governance

Menurut Rhodes (Rhodes,1996) mengatakan *governance* adalah berubahnya tata kelola dalam pemerintahan seperti proses pengaturan baru (*new process of governing*), perubahan pengaturan atau sebuah cara masyarakat diatur di dalamnya. Sedangkan apabila menurut Dwiyanto (Dwiyanto,2018) mengatakan *governance* adalah tata kelola yang melibatkan para actor kepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan, karena semakin berkembangnya proses pengambilan keputusan, diperlukan suatu system pengambilan yang proporsional karena tantangan dan masalah yang semakin kompleks yang berkembang.

Menurut Rhodes (Rhodes,1996) *governance* memiliki beberapa karakteristik yang dominan dimana karakter tersebut ada 4(empat) meliputi:

1. “*Governance*” memiliki makna yang lebih kompleks dari pada *government* yang melibatkan actor lokal *non-government* yang menjadikan adanya hubungan timbal balik antar organisasi.
2. Keberlanjutan hubungan dikarenakan kebutuhan akan sumber daya dan pembagian dengan negosiasi bersama.
3. Memiliki akar hubungan kepercayaan yang di regulasikan dengan baik dengan output peraturan antar actor yang ada.
4. Memiliki kekuatan untuk otonom atau terlepas dari pemerintah

Menurut Hanberger (Hanberger,2004) dalam perkembangannya *governance* memiliki beberapa klasifikasi “Karakteristik Governance” yaitu:

a. State Coordinated

Merupakan model yang banyak ditemui dan yang paling umum di dunia. Model ini melibatkan banyak actor, namun dalam tata kelolanya masih seperti pemerintah konvensional. Proses dalam implementasi kebijakan yaitu control manajemen yang kaku dan bersifat *top-down*. *Model state coordinated* ini memiliki keuntungan akuntabilitas yang jelas, yaitu tanggung jawab diemban oleh politisi dan pejabat atas keputusan-keputusan yang diambil.

b. Local Government Coordinated

Model yang memusatkan perhatian pada pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, baik penagmbilan peran secara mandiri, maupun diberi peran. Peran yang diambil bisa berasal dari pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat atau berdasarkan landasan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Model ini memiliki dasar pada demokrasi elitis atau representative. Proses implementasi digambarkan sebagai proses

c. Multi Actor Coordinated

Dimana sumberdaya kolektif yang diarahkan dan dikoordinasikan oleh beberapa actor baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bergantung pada kedalaman tata kelola dan kolaborasi, dan orientasi berupa partisipatif. Akuntabilitas merupakan kelemahan dalam model ini. Semua actor dan elit bertanggung jawab kepada organisasi yang diwakilinya, namun rentan sekali melempar-lempar tanggung jawab dalam hal lain.

B. COLLABORATIVE GOVERNANCE

1. Konsep Collaborative Governance

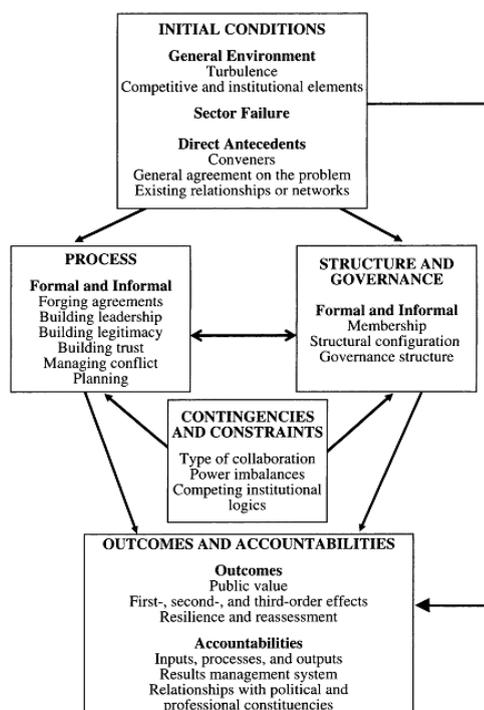
Menurut Ansel dan Gash (2008) collaborative governance adalah cara tata kelola pemerintahan dengan melibatkan langsung actor kepentingan diluar negara atau pemerintah, memiliki orientasi consensus dan musyawarah dalam proses penagmbilan keputusan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan public dan program-program yang ada. Fokus *Collaborative Governance* adalah pada isu-isu publik dan kebijakan. Lembaga publik diharapkan memiliki orientasi khusus dalam pembuatan kebijakan, dan tujuan kolaborasi dan proses kolaborasi adalah untuk mencapai konsensus di antara pemangku kepentingan. Pemerintahan kolaboratif bertujuan untuk mencapai keadilan sosial untuk kebaikan bersama. Dalam tata kelola kolaboratif, ada kata yang disebut kolaborasi yang berasal dari kolaborasi. Menurut Bardach (Sudarmo, 2015), kolaborasi itu sendiri adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua atau lebih organisasi yang bekerja sama untuk meningkatkan “common value” daripada bekerja secara mandiri untuk meningkatkan dan memaksimalkan hasil yang diinginkan

Collaborative Governance didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang didefinisikan dan dipahami dengan jelas, dapat diakses melintasi batas-batas organisasi formal dan informal, memiliki batas-batas pemerintah dan non-pemerintah, serta dibangun di atas “*multi partner governance*” yang mencakup sektor swasta, komunitas, dan komunitas. "Ada. Peran pemangku kepentingan yang saling terkait “*hybrid*” atau bisa dikatakan publik-swasta-masyarakat. Dalam Collaborative Governance, proses kolektif para peserta dan setiap pemangku kepentingan dalam otoritas pengambilan keputusan memiliki sinergi yang sama yang mencerminkan aspirasi pengambilan keputusan mereka.

2. Pendekatan Collaborative Governance

Collaborative governance memiliki lima lintas sector penekanan yaitu, 1) kondisi awal; 2) komponen proses; 3) Struktur dan tata kelola; 4) kontingensi dan kendala; 5) Hasil dan akuntabilitas (Bryson et al.2006)

Table 3.2 PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE



Sumber: https://www.researchgate.net/figure/A-framework-for-understanding-cross-sector-collaboration-Source-Bryson-Crosby-Stone_fig2_319687098

A. Kondisi Awal (*Initial Condition*)

Kondisi awal biasanya berfokus pada percakapan atau ide, tetapi juga topik yang lebih luas seperti lingkungan tempat kolaborasi berlangsung, potensi kegagalan, sinergi, dan kondisi khusus tempat kolaborasi terbentuk

B. Komponen Proses (*Process Components*)

Proses penting dalam sinergi dan kolaborasi yang muncul adalah negosiasi kesepakatan formal dan informal tentang tujuan sinergi dan kolaborasi setelah kesepakatan awal tentang definisi masalah yang ada. Dengan menyepakati sinergi dan kerja sama antara aktor dan mitra, faktor struktural seperti peran, tanggung jawab, dan otoritas pengambilan keputusan dapat diperhitungkan.

C. Struktur dan Tata Kelola (*Structure and Governance*)

Struktur adalah konsep yang berkembang pesat dalam teori organisasi dan mencakup berbagai elemen seperti tujuan, spesifikasi misi, pembagian kerja, aturan atau prosedur untuk sistem operasi standar, dan hubungan otoritas. Struktur berkaitan dengan komponen vertikal dan horizontal, dan data membantu organisasi mengintegrasikan dan mengintegrasikan semua komponen kelembagaan atau organisasi

D. Kontingensi dan Kendala (*Contingencies and Constraints*)

Ada tiga faktor yang mempengaruhi struktur, proses dan tata kelola kolaborasi, sinergi dan keberlanjutan secara keseluruhan. 1) jenis kerjasama; 2) Ketidakseimbangan kekuatan di antara anggota. 3) Logika lembaga persaingan yang menciptakan kerjasama dan sinergi

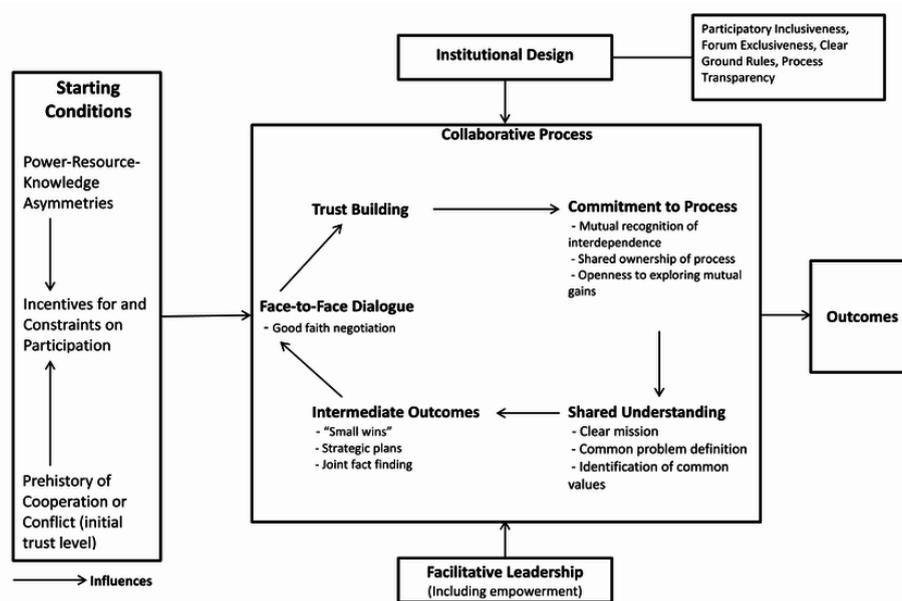
E. Hasil Sementara (*Outcomes and Accountabilities*)

Hasil kolaborasi lintas sector dapat dilihat dari tiga perspektif kategori: 1) nilai public; 2) efek 3) ketahanan dan penilaian Kembali . Akuntabilitas merupakan masalah yang complicated dalam sinergitas atau kolaborasi karena kurang jelasnya pertanggungjawaban yang ada, dikarenakan actor kolaborasi atau sinergitas dapat memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai tujuan yang telah dicapai .

3. Model Collaborative Governance

Ansell dan Gash merumuskan model Collaborative Governance in Theory and Practice, hasil dari kajian tersebut yakni 1) Kondisi Awal; 2) Desain Kelembagaan; 3) Kepemimpinan; dan 4) Proses Kolaboratif dan Bersinergi (Ansel dan Gash,2008)

Table 4.2 ANSELL DAN GASH COLLABORATIVE GOVERNANCE



Sumber; : Ansell dan Gash (2008), “Collaborative Governance in Theory and Practice

A. Kondisi Awal

Kondisi awal adalah sebuah kondisi pemicu proses kolaborasi dan sinergitas terjadi, ada beberapa kondisi yang dimana kondisi tersebut bisa menjadi pendukung atay penghambat kinerja kerja antara actor kepentingan dan juga organisasi/Lembaga yang memiliki kewenangan. Ada 3 (tiga) variable yang menjadi kondisi awal kolaborasi 1) Ketidakseimbangan, Sumberdaya, Pengetahuan pemangku kewenangan; 2) Sejarah atau konflik masalah yang dapat berpengaruh kepada pemangku kewenangan; 3) pendukung dan kendala dalam keikutsertaraan partisipasi dalam sinergitas dan kolaborasi.

B. Desain Lembaga

Desain kelembagaan adalah bagaimana aturan dalam kolaborasi disesuaikan dengan legitimasi dalam bentuk prosedur yang baik dalam proses kolaborasi. Sistem aturan dalam partisipasi harus jelas, serta bagaiman suatu forum dibentuk dan adanya transparasi dalam pelaksanaan proses kolabroasi dan sinergitas.

C. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang berwibawa, berkarakter dan kuat serta dihormati dan juga dipercaya oleh semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam membentuk dan mengatur proses kolaborasi.

D. Proses

Ada beberapa proses kolaboratif yang dapat ditentukan awalnya karena dalam prosesnya akan sangat sulit dilihat. Proses kolaboratif dapat dilihat dari

- a. Dialog tatap muka
- b. Membangun Kepercayaan
- c. Komitmen dalam proses kolaborasi
- d. Pemahaman bersama
- e. Hasil sementara

4. Proses Collaborative Governance

Dalam memahami proses-proses kolaborasi dan sinergitas berarti harus memahami tahap-tahap dalam pembentukan kolaborasi tersebut. Dijelaskan Tahapan Collaboration Governance oleh Morse dan Stephens (2012), yaitu terdiri dari tahapan *assessment, initiation, deliberation, implementation*. Bisa dilihat pada proses collaboration governance dalam pelaksanaannya dibawah ini menurut Morse dan Stephens (2012) pada table berikut:

Table 5.2 MOORE DAN STEPHEN

Assessment	Initiation	Deliberation	Implementation
Is collaboration necessary? Are preconditions in place? Who are the stakeholders? Who might fill key roles (sponsor, convener and facilitator)?	How to frame the issues? How to engage stakeholders? Who/what else is needed? What kind of process?	How to develop effective working groups? What ground rules? How to invent options and decide? How to facilitate mutual learning?	Who will do what? How to broaden support? What kind of governance? How to monitor progress?

(Moore & Stephen, 2012:567)

Sumber :

Teaching Collaborative Governance : Phases, Competencies, and Case-Based Learning". *Journal of Public Affairs Education*

Pada tahapan pertama akan lebih membahas tentang kondisi awal mengenai penafsiran (*Assesment*) pada sebuah kolaborasi antara elite ataupun stakeholders (Morse dan Stephe,2012) . Untuk hal-hal yang dilakukan bisa berupa:

- a. Paham terhadap factor-faktor yang memiliki konteks sejarah Kerjasama dan kelembagaan atau kendala Kerjasama
- b. Identifikasi elite
- c. Kesepakatan tentang perumusah masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kolaborasi dan sinergitas tersebut
- d. Rasa peduli terhadap kepekaan terhadap kolaborasi yang diciptakan untuk mencapai solusi yang baik.

Selanjutnya merupakan tahapan inisiasi, dalam tahapan inisiasi ini menekankan pada *convener* dan peran sponsor yang dimungkinkan menjadi penyuplai sumberdaya material dan non-material. Musyawarah elit untuk membangun sebuah kelompok dalam proses desain. Tahap inisiasi juga membahas mengenai soft skill elite dalam menjalankan kolaborasi, membangun Kerjasama dalam wadah sebuah tim (Morse dan Stephens,2012)

Setelah tahapan inisiasi yang menekankan pada softskill stakeholders maupun elit, lalu ada tahapan *Deliberation* (Musyawarah). Dalam kegiatan ini stakeholders akan membangun aturan dasar atau menetapkan *Grounded Rules* (peraturan dasar). Selanjutnya mengadakan musyawarah sebagai bagian dari mencari pemahaman bersama dan juga menciptakan akhir dari tujuan yang akan dicapai dari kolaborasi ini.

Tahapan yang terakhir adalah pembangunan *Collaborative Governance* yang terdiri dari beberapa bagian seperti:

- a. Merancang Struktur Kolaborasi
- b. Membangun Dukungan
- c. Memantau Kesepakatan dan Perjanjian serta mengevaluasi hasil pengelolaan Kerjasama

Dalam tahapan terakhir ini nantinya akan disimpulkan apakah kolaborasi dan juga sinergitas yang terbangun akan selanjutnya dilakukan atau hanya menimbulkan masalah baru sehingga dapat diakhiri secepatnya .

5. Tantangan Collaborative Governance

Secara kajian ilmiah Collaborative Governance menghadapi 3 jenis tantangan yang sangat kompleks dalam perkembangannya yaitu: 1) Tantangan dalam pemecahan masalah yang substantif; 2) Tantangan dalam proses kolaborasi; 2) tantangan akuntabilitas multi-relasioanal (Waardenburg et al., 2020).

a. Tantangan pemecahan masalah

Collaborative Governance memiliki focus kepada pemecahan yang lebih kompleks serta spesifik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Permasalahan yang sulit bila ditangani secara kolaborasi dan dengan sinergitas yang baik dapat diselesaikan dengan baik juga. Aktor kolaboratif juga harus dapat menyesuaikan jalan Tindakan untuk menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan sehingga menyebabkan sulit atau tidaknya masalah yang hendak diambil.

b. Tantangan dalam Proses Kolaborasi

Collaborative governance yang baik memiliki Langkah awal yaitu memiliki focus pada masalah, untuk mencapai pemahaman tentang apa yang dituju dan juga pendekatan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut (Ansell and Gash, 2008)

c. Tantangan Akuntabilitas dengan Multi-Relasi

Menurut Bryson (Bryson et al., 2006) Akuntabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks disaat kolaborasi dijalankan, sehingga tidak akan menemui sinergitas yang ada, dikarenakan ketidakjelasan kepada kolaborasi itu bertanggungjawab serta apa tanggung jawab yang diemban dalam proses kolaboratif tersebut. Proses evaluasi dalam kolaborasi harus bisa mencakup semua perspektif bukan hanya pihak-pihak internal kolaborasi, namun juga pihak eksternal kolaborasi sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa dicapai.

C. SINERGITAS POLITIK

1. Pengertian Sinergitas Politik

Pengertian Sinergi atau Sinergitas sendiri adalah kombinasi atau paduan yang dapat membuat hasil yang lebih baik dan lebih proporsional dengan bantuan subyek atau aktor lain didalamnya (Najianti, 2012). Sinergi berasal dari bahasa Yunani *syn-ergo* yang berarti

bekerjasama (Hampden-Turner. 1990).Sinergi (termasuk subkategori simbiosis) telah memainkan peran kreatif yang signifikan dalam evolusi,sinergitas telah menjadi sumber kebaruan evolusioner yang luar biasa. Dalam konteks lain telah diusulkan bahwa keuntungan fungsional (selektif) yang terkait dengan berbagai bentuk fenomena sinergis telah menjadi penyebab penting dari evolusi sistem yang kompleks dari waktu ke waktu. Mendasari banyak langkah spesifik dalam proses kompleksifikasi,prinsip fungsional umum yang muncul.

Sedangkan Menurut Deardorff dan Williams (Usman.2011) Sinergitas Politik adalah interaksi dua atau lebih aktor politik yang akan menghasilkan Kerjasama dalam kontesk memperbesar peluang untuk menghasilkan tujuan bersama yang lebih baik.Dalam bersinergi faktor menyatukan pandangan politik yang berbeda adalah hal yang paling penting karena mempengaruhi keseluruhan sinergitas,Selain itu,faktor penentu utama dari proses ini adalah evolusi paralel dari proses manusia yang bersinergitas.Sinergi atau Sinergitas merupakan hal yang umum dilakukan di dalam keadaan sosial manusia khususnya dalam kehidupan berpolitik dan bernegara dimana sesame manusia saling bersinergi untuk tujuan kemajuann dan kelancaran kehidupan bernegara,sinergitas dalam kehidupan berpolitik dan bernegara memiliki sifat saling menguntungkan dalam keadaan sekarang,dilandasi oleh konsep-konsep serta keadaan yang rasional serta ditujukan untuk memenuhi unsur bernegara yang tinggi yaitu persamaan dan kesatuan antar sesame warga negara.Sinergitas sendiri tercipta hubungan antar individua tau antar kelompok tergantung kepentingannya. Melalui Sinergitas,muncul Kerjasama dari berbagai latarbelakang yang berbeda demi mewujudkan hasil yang diinginkan dengan cara paling efektif dan efisien melalui cara-cara yang terkonsep dengan baik.

Dalam Kaitannya dengan judul penelitian peneliti,terdapat undang-undang yang secara rinci dan jelas menekankan pada kajian berbagai kebutuhan desa untuk mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan keperluan desa,Undang-undang tersebut yaitu UU No 6 Tahun 2014.Sinergitas Politik tersebut juga terkait dengan keadaan transparan,partisipatif masyarakat,dan akuntabilitas desa dalam keadaan apapun,oleh karena sinergitas politik dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa adalah Sinergitas sebagai bentuk kerjasama desa dengan desa lain atau Kerjasama dengan pihak ketiga dalam kontteks penyelenggaraan pemerintahan dan keperluan desa.

2. Cara Sinergitas Politik

Sinergitas politik sendiri merupakan pengembangan dari konsep Kerjasama yang selama ini ada pada khalayak umum khususnya di masyarakat, sinergi timbul dari Kerjasama yang terkonep serta dilandasi dengan saling percaya satu aktor politik dengan aktor yang lainnya sehingga ekuivalen dengan konsep awal Kerjasama (Hosmer,1995). Sinergi politik akan membangun hubungan yang efisien dan efektif dalam system sosial yang legal ,sehingga proses dalam bersinergitas tersebut mampu berjalan maksimal dengan di imbangi dengan konsistensi serta kejujuran aktor-aktor politik yang menjalankan system sosial didalamnya dalam bersinergitas (Geller,1999). Sinergitas yang baik dan diikuti dengan konsep yang terencana pastinya akan membuat kepentingan yang akan di tuju akan dapat diwujudkan dengan baik bersama-sama. Menurut Najianti dalam (Rahmawati 2011). Dalam sebuah komunitas atau kelompok, Sinergitas memiliki 2 (dua) cara yang dominan yaitu:

a. Komunikasi

Sinergitas sebagai wadah untuk berkomunikasi memiliki peranan yang penting untuk mempererat kedekatan antar sesama aktor, dimana komunikasi sangat diperlukan karena komunikasi merupakan hal yang dasar untuk mencapai Kerjasama serta sinergitas yang baik antara sesama aktor. Komunikasi merupakan instrument dasar agar terjadinya timbal balik antara satu aktor dengan aktor yang lainnya sehingga menghadirkan orientasi yang baik untuk saling berkaitan satu sama lain dalam konteks bersinergitas. Dalam bersinergi, komunikasi yang biasanya memiliki dua bagian, Komunikasi yang dilakukan dengan formal dan hanya bertujuan untuk mencapai tanggapan penerima, serta komunikasi yang dilakukan untuk menstimulus atau sebagai rangsangan penerima (Sofyandi Garniwa 2002)

b. Koordinasi

Sinergitas yang baik tentunya membutuhkan koordinasi yang baik juga, dalam hal ini Koordinasi dimaknai sebagai, kesatuan pola-pola kegiatan yang terjadi antar individu atau antar unit dalam sinergitas Bersama untuk mencapai tujuan Bersama-sama (Silalahi,2013). Koordinasi juga sangat diperlukan untuk hubungan antara aktor, baik secara komando, vertical, horizontal, maupun terkait hubungan kemitraan (Mulyanan.2020). Kesatuan sosial yang berisi aktor-aktor atau elit-elit yang saling berhubungan, di koordinasikan secara sadar dan di Kelola dengan membentuk pola-pola inyteraksi yang unik untuk membedakan tugas individu yang satu dengan yang lainnya, atau bisa di katakana, adanya Batasan unit-unit yang satu dengan yang lain. Koordinasi yang baik dalam

suatu organisasi (*Human System*),juga membutuhkan suatu indentitas untuk membedakan anggota organisasi dengan yang bukan anggota,sehingga menghindari kerancuan dalam konsep koordinasi di dalam organisasi (Nia Juliawati,2014).

D. Elit Politik

Menurut *Soerjono Soekanto* dalam karyanya *Sosiologi Suatu Pengantar*,Elit potilik didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan,khususnya kekuatan politik.Konsep dasar Elit lahir di eropa,pada saat munculnya kelompok-kelompok penguasa,ini sebagai kelompok yang memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga terkenal di daratan eropa pada saat itu,mereka memiliki sumberdaya kekuasaan yang cukup besar,baik dalam bentuk tanah maupun budak.Elit Politik memiliki keuasaan yang cukup luas pengaruhnya serta dapat mengontrol pengaruhnya dari jarak jauh sehingga memiliki kendali sumberdaya yang cukup baik,dalam mengendalikan sumberdaya tersebut mereka akan berkonsep secara matang karena Elit memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya secara absolut(Jeffrey A.W.2011). Dalam perkembangannya Jeffrey A. Wintres mengembangkan teori Elit menuju sebuah Teori Oligarki.Teori Oligarki memusatkan perhatiannya kepada penggunaan sumberdaya kekuasaan materil untuk kepentingan politik dengan efek ekonomi yang penting,sedangkan teori elit politik yang berkembang hanya memfokuskan perhatiannya pada kepemilikan kekuasaan dan pengaruhnya dalam minoritas tanpa ada dan hanya sedikit intrik politik di dalamnya dan berfokus pada kekuasaan bidang ekonomi dan sosial. (*Jeffrey A.W.2011*).

1. Teori The Rulling Class

Menurut Pareto (1987),Dengan Teorinya *The Rulling Class* menjelaskan Elit adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain,ada yang memegang kekuasaan formal (*Governing Elit*) seperti: Gubernur,Bupati,Walikota,Ketua DPRD,dan pimpinan-pimpinan partai politik dan ada yang memegang kekuasaan non-formal (*Non-Governing Elit*) Elit non formal ini seperti: Elit keagamaan,elit organisasi kemasyarakatan,kepemudaan,profesi dan lain sebagainya..Dalam suatu kelompok,organisasi atau unit-unit daerah akan selalu ada satu kelompok maupun individu yang memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kehidupan masyarakat,Mereka akan selalu memerankan peran yang cukup penting dan keberadaannya dinilai memiliki nilai lebih dari individu maupun dari kelompok lain,mereka memiliki sumberdaya yang besar,baik material maupun non-material,dan mereka disebut Elit.

Lalu Patero membagi tipe Elit Politik menjadi 3 bagian :

a. Elit Politik Licik

Elit Politik yang mempunyai ciri khas yaitu cara memerintah dengan cara licik, Elit Politik ini tidak hanya ada di negara yang menganut konsep otoritarianisme namun juga demokratis

b. Elit Politik Pemaksa

Elit Politik dengan ciri ini cukup banyak di negara-negara yang menganut konsep Komunisme dan juga otoriter.

c. Elit Politik Konservatif

Elit Politik Konservatif yakni Elit yang berusaha mementingkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bersama

Gaetano Mosca (2017) melihat Elit dari pendekatan organisasi menurutnya Aktor atau Manusia sebagai dalam organisasi dibagikan menjadi dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik (Penting) dan mereka yang tidak memilikinya,

“In all societies..two class of people,a class that rules and that class is ruled. The first class always the less numerous,performs and political functions,mono-polizes power and enjoy the advantages that power brings,whereas the second,the more numerous class,is directed and controlled by the first,in manner that is now more or less legal,now more or less arbitrary and violent,and supplies the first”

Artinya; dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk; satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama,yang jumlahnya selalu lebih kecil,menjalankan semua fungsi politik,memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu,sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar,diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu (Mosca,.2017).

Hal tersebut tentu saja mengutakan teori bahwasanya Elit Politik adalah sekelompok kecil orang yang mempunyaai kekuasaan non-materil dimana dia memiliki pengaruh yang kuat untuk menjalankan system perpolitikan yang ada,menjalaskan system organisasi dan tentunya menjalankan roda kehidupan masyarakat sehingga bisa dikatakan mereka memiliki peranan yang besar dan penting dalam tatanan kehidupan berkelompok atau berorganisasi di masyarakat,apabila Elit Politik adalah subyeknya tentu ada obyek yang dipimpin,yaitu

masyarakat biasa dalam hal ini adalah orang yang tidak mempunyai kekuasaan non-materil yang kuat sehingga tidak memiliki pengaruh atau memiliki pengaruh namun hanya sedikit sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai seorang Elit Politik dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang baik, diperlukan suara “formula politik“, sehingga para Elit Politik nantinya dapat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dengan berbasis moral yang ada serta hukum-hukum yang sesuai dengan lingkungan tempat sebuah kelompok atau Organisasi itu berada, dalam menciptakan formula politik itu, para Elit akan mendapatkan konsekuensi yang besar dari penciptaan formula politik tersebut, karena harus berdasarkan logika yang sesuai, doktrin yang tepat, serta kepercayaan dan kebiasaan yang umum yang telah di terima dan di kenal dalam suatu masyarakat tersebut (Mosca..1987)

Pandangan lain juga datang dari Dwaine Marvick (2000) yang menurutnya Elit terdiri dari dua konsep akademik yaitu ;

1. Elit Politik Sebagai Sosok Eksklusif

Dimaknai sebagai penggerak aktivitas masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan krisis, dapat menciptakan sosok-sosok yang unggul dan juga dapat menampilkan kualitas diri yang tetap.

2. Elit Politik Sebagai Anggota Kelompok

Dimaknai sebagai salah satu anggota kelompok yang memiliki kekuasaan untuk menghimpun para petinggi atau penguasa di berbagai sector. Dalam hal ini Elit dipandang sebagai seorang pemimpin, pihak yang berpengaruh dan juga pembuat keputusan dalam kelompok tersebut

Menurut Putnam (1985), ada beberapa jenis sifat Elit yang ada dalam perkembangan sosiologi sifat masyarakat, yaitu :

1. Elit Secara Eksternal

Elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran dalam organisasi atau kelompok. Elit merupakan individu yang ada dalam kelompok Elit saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip, dan (kadang memiliki pandangan yang berbeda), memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepentingan yang sama, sehingga Elit

dengan jenis sifat ini memiliki kedekatan emosional dengan sesama Elit karena persamaan latarbelakang dan kebiasaan yang ada.

2. Elit Self Perpetuatum

Kedua, kaum Elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas. Pemimpin selalu memilih sendiri dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang. Sehingga Elit ini terkesan cukup dominan dan juga eksklusif, standar dalam pemilihan kalangan yang istimewa juga tinggi sehingga menimbulkan kelas sosial dalam perkembangan masyarakatnya.

3. Elit Otonom

Ketiga kaum Elit pada bersifat otonom, kebal gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompoknya

BAB III

DESA KEDUNGREJA

A. Desa Kedungreja

Desa Kedungreja merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kedungreja, kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.. Desa Kedungreja sendiri karena merupakan Desa yang tergolong Luas.yang berada di Kecamatan Kedungreja.dan letaknya berada di pusat kecamatan,selain itu Desa Kedungreja juga memiliki pusat Kawasan ekonomi di Pasar Mingguan sebagai pusatnya,untuk pusat pemerintahannya juga terletak di Desa Kedungreja sehingga Desa Kedungreja sendiri merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan untuk kecamatan Kedungreja. Kecamatan Kedungreja sendiri memiliki 11 Desa yang terdiri dari:

1. Desa Kedungreja
2. Desa Bangunreja
3. Desa Tambaksari
4. Desa Rejamulya
5. Desa Sidanegara
6. Desa Tambakreja
7. Desa Bumireja
8. Desa Jatisari
9. Desa Kaliwungu
10. Desa Ciklapa
11. Desa Bojongsari

Desa Kedungreja sendiri memiliki 4 (empat) Dusun yaitu, dusun Kedungreja, Dusun Kedungbakung, Dusun Awiluar, dan Dusun Tegalanak. Terdapat beberapa sekolah di setiap dusun yang ada di desa Kedungreja, ada yang hanya memiliki sekolah dasar, namun juga ada yang memiliki SMP di Dusunnya, seperti di dusun Kedungreja dan Kedungbakung yang memiliki SMP Muhammadiyah Kedungreja. Pusat perekonomian Desa Kedungreja ditopang oleh pasar Mingguan yang dimana merupakan pasar sentral yang ada di Kecamatan Kedungreja, di Pasar Mingguan ini, kegiatan Sebagian besar masyarakat kecamatan Kedungreja berjalan, praktek ekonomi juga berjalan dengan baik, dan cukup bertahan di tengah era modernisasi, hal ini bisa terlihat dari di renovasinya pasar mingguan menjadi pasar

dengand konsep semi modern. Untuk Pemakaman Umum, di Desa Kedungreja terdapat di Dusun Kedungbakung dengan letaknya di dekat Pasar Mingguan.

B. Kondisi Geografis

Desa Kedungreja sendiri merupakan desa yang berada di dataran rendah dengan luas wilayah kurang lebih 600 Ha. Untuk wilayahnya sendiri merupakan pertengahan dari 11 Desa di Kecamatan Kedungreja dan merupakan desa yang memiliki status desa berkembang. Desa Kedungreja sendiri merupakan desa yang dilalui oleh jalan lintas provinsi, dimana apabila menuju arah barat akan langsung menuju Desa Rejamulya dan selanjutnya merupakan Provinsi Jawa Barat. Desa Kedungreja memiliki luas tanah Kas desa hampir 2000 Ha dengan batas wilayah yaitu

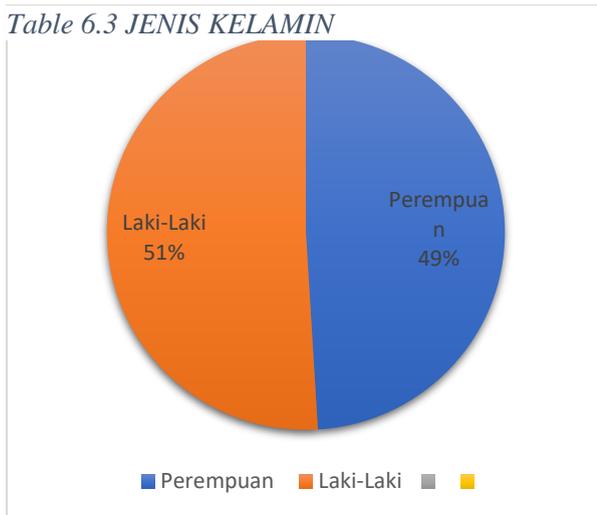
- Sebelah Utara : Kecamatan Sidareja
- Sebelah Selatan : Desa Tambakreja
- Sebelah Barat : Desa Rejamulya
- Sebelah Timur : Desa Jatisari

Desa Kedungreja sendiri memiliki udara yang cukup sejuk karena jauh dari pusat perkotaan. Untuk menuju pusat kota Cilacap, bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 90 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 65 km. Untuk jarak Desa Kedungreja dengan Desa terjauh yaitu dengan Desa Bojongsari kurang lebih 10 km. Kondisi infrastruktur Desa Kedungreja cukup baik dengan dipeliharanya jalan-jalan utama seperti Jalan Sidareja-Pengandaran yang merupakan jalan lintas provinsi tersebut. Wilayah Kedungreja sendiri dialiri oleh sungai-sungai kecil yang berasal dari aliran sungai Cibeureum sehingga pengairan lahan-lahan masyarakat cukup baik. Desa Kedungreja memiliki suhu rata-rata 30 derajat *Celsius* mempunyai jenis kontur tanah yang kering dan stabil.

C. Kependudukan

Berdasarkan data yang didapatkan dari kelurahan Kedungreja pada tahun 2022, data kependudukan berdasarkan jenis kelamin yaitu terdiri dari 3154 KK dan dengan pembagian berikut ini :

Table 6.3 JENIS KELAMIN



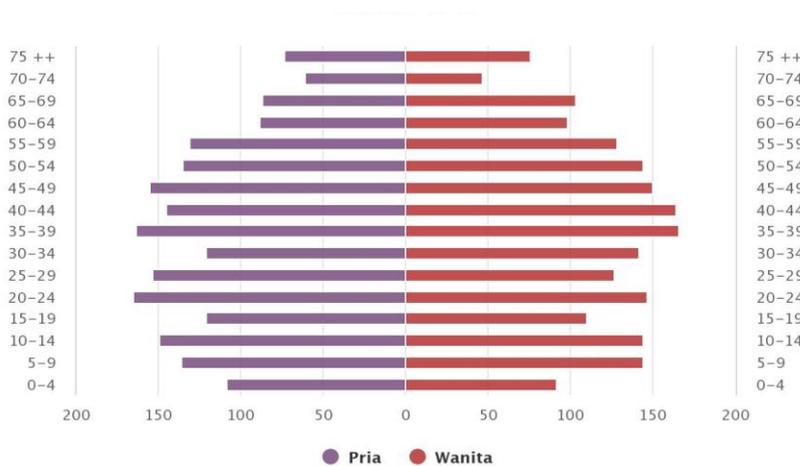
Sumber : Arsip Dokumen Desa Kedungreja 2022

Keterangan

Jenis Kelamin	Jiwa
Perempuan	4990 Jiwa
Laki-laki	5185 Jiwa
Jumlah	10175 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas tersebut, bisa dilihat jumlah penduduk Desa Kedungreja yaitu 10175 jiwa yang berada di 9 RW dan 52 RT. Untuk di desa Kedungreja sendiri terlihat jumlah laki-laki lebih banyak dominan dibandingkan perempuan. Apabila dilihat dari rentang umurnya Desa Kedungreja memiliki ciri Piramida Konstrutif

Table 7.3 JENIS KELAMIN



Dapat dilihat pada Chart berikit memiliki ciri-ciri chart jenis umur Piramida Konstruktif dimana dapat disimpulkan jumlah usia muda dengan usia dewasa kurang

seimbang, disebabkan oleh angka kematian yang rendah, dan jumlah kelahiran yang relatif standar bahkan rendah.

D. Keagamaan

Berdasarkan jumlah yang didapatkan dari Kelurahan Kedungreja, pada tahun, mayoritas penduduk Desa Kedungreja menganut Agama Isla dan sisa lainnya adalah Agama Krinten Protestan dan juga Katholik dengan statistik

Agama	Jiwa
Islam	10110 jiwa
Kristen	46 jiwa
Katholik	20 jiwa

Sumber : Arsip Desa Kedungreja 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya 99% lebih masyarakat desa Kedungreja menganut agama Islam dan juga kurang dari 1% menganut agama lain, seperti Kristen Protestan dan juga Katholik. Meskipun begitu kondisi kerukunan antar umar beragama di Desa Kedungreja selalu baik hal ini di buktikan dengan dalam satu dekade terakhir hampir tidak ada konflik antar umat beragama yang terjadi dan juga di dukung oleh budaya masyarakat desa Kedungreja yaitu Gotong Royong , Guyub Rukun dan Saling Sapa.

E. Kondisi Ekonomi

Menurut data dari dari Kelurahan Kedungreja, corak perekonomian masyarakat kedungreja lebih mengarah kepada pertanian dengan sebagian besar masyarakatnya dengan jumlah 4,295 jiwa berprofesi sebagai petani, hal ini tidak terlepas dari luasnya daerah persawahan yang dimiliki oleh masyarakat desa Kedungreja yaitu lebih dari 1,378 Ha, merupakan areal persawahan terluas di Kecamatan Kedungreja dan juga dapat menghasilkan sekitar 7,992.4 Ton pertahun. Selain Pertanian, perdagangan merupakan sektor yang juga banyak menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dengan total 415 masyarakat yang menjadi pedagang, hal ini tidak terlepas dari adanya salah satu pasar permanen yang ada di desa Kedungreja dan merupakan yang terbesar. Untuk sektor perdagangan di pasar tersebut, sebagian besar dari mereka adalah penjual sayuran dan sandang atau pakaian, kedua barang tersebut mendominasi barang-barang yang dijual di pasar desa Kedungreja atau Pasar Mingguan

F. Tingkat Pendidikan

Menurut data Kelurahan Kedungreja Tahun 2022 tingkat pendidikan di Kelurahan Kedungreja sudah cukup memahami akan pentingnya pendidikan.

Data Pendidikan Penduduk Kedungreja Usia 5 Tahun Ke Atas	
Sekolah Dasar	3709
SLTP	1689
SLTA	751
Perguruan Tinggi	147

Sumber : Arsip Kelurahan Kedungreja

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa terdapat angka yang cukup tinggi pada angka penduduk yang sedang menempuh ataupun yang telah menempuh Perguruan Tinggi, hal ini mengindikasikan bahwasannya pemahaman akan pentingnya pendidikan yang baik dan cukup serta pemahaman akan pentingnya ilmu yang bermanfaat di kalangan masyarakat Kelurahan Kedungreja cukup tinggi, Hal ini juga didukung dengan baik oleh cukup lengkapnya fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Kedungreja baik Paud dan TK yang totalnya mencapai 6, SD yang mencapai 4 Sekolah, SLTP dengan total 1 Sekolah, dan SMU yang juga 1 sekolah, hal ini juga belum ditambah dengan sebagian sekolah swasta yang dibangun di Kelurahan Kedungreja yang membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memilih pendidikan untuk anaknya. Dengan adanya pilihan tersebut dapat membuat kompetisi dalam menarik siswa antar sekolah menjadi ketat dan secara tidak langsung membuat mutu pendidikan di Kelurahan Kedungreja menjadi lebih baik.

G. Pemerintahan

Dalam konteks pemerintahan secara lembaga, Desa Kedungreja sendiri memiliki bentuk Kelurahan dibawah naungan Kecamatan Kedungreja. Kepala Desa atau Lurah merupakan pemimin pemerintahan dalam Desa atau Kelurahan Kedungreja ini. Lurah atau Kepala Desa Kedungreja dijabat oleh Adi Purnawan. Dalam masa Covid-19 sendiri dalam penanganannya Kelurahan Kedungreja membentuk Satgas khusus yang merupakan turunan dari Satgas Covid-19 Kecamatan Kedungreja, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat maupun lembaga pemerintah setempat. Satgas khusus yang beroperasi ini dimaksudkan untuk mencegah, menekan serta menanggulangi Covid-19 yang ada di Kelurahan Kedungreja

Selanjutnya adapun struktur pemerintahan yang ada di Kelurahan Kedungreja yaitu :

Kepala Desa/ Lurah	: Adi Purnawan
Sekretaris Desa	: Siman Priyanto
Kaur Keuangan	: Tofikin, S.H
Kaur Umum dan Perencanaan	: Yani, A.md.Keb
Kasi Pemerintahan	: Nyana Supriyanto
Kasi Kesejahteraan	: Sarif Hidayat, S.Pd.i
Kasi Pelayanan	: Nugraheni Dwi Arisanti S.Km

BAB IV

Penanggulangan Covid-19 di Kedungreja dan Elit Lokal Kedungreja

A. Gambaran Umum Covid-19 di Kedungreja

Pada awal mula Covid-19 terjadi di Kedungreja terjadi, masyarakat di wilayah Kedungreja cukup santai karena Sebagian dari masyarakat tidak mempercayai bahwasannya virus penyebab Covid-19 itu ada dan eksis, masyarakat cenderung acuh dan tidak peduli terhadap berbagai berita dan informasi tentang kedatangan virus Covid-19 di Indonesia, dan segala hal buruk yang dating bersama dengan Covid-19 tersebut, masyarakat sendiri cenderung memiliki sifat yang menolak akan adanya virus Covid-19, hal ini tidak terlepas dari pemahaman masyarakat yang minim akan informasi yang valid terkait pandemic Covid-19 di Indonesia dan Sebagian besar dari masyarakat tersebut sangat keberatan apabila dipaksa untuk melakukan *Social Distancing* terlebih saat mereka melakukan pekerjaan yang diharuskan berhadapan dan bertemu dengan banyak orang sehingga memungkinkan untuk kontak secara langsung dengan orang lain. Masyarakat Desa Kedungreja merupakan masyarakat Desa dengan intensitas bersosialisasi yang cukup tinggi, hal ini dimungkinkan karena tradisi-tradisi yang sifatnya tradisional di masyarakat Desa Kedungreja masih berlaku. Hal ini tentunya juga menjadi bahan pertimbangan dan salah satu penyebab masyarakat di Desa Kedungreja pada awalnya cukup sulit dilakukan. Tradisi-tradisi seperti Sedekah Bumi, Yasinan, dan juga Roan atau gotong royong yang biasa dilakukan setiap hari Minggu. Pandemi Covid-19 secara langsung membatasi itu semua sehingga masyarakat hidup dalam tekanan informasi yang minim dan juga sosialisai masyarakat yang juga terbatas. Peraturan-peraturan Desa terkait penanggulangan Covid-19 seakan-akan bertolak belakang dengan adat dan tradisi yang terjadi sehingga cukup menimbulkan konflik kepercayaan yang terjadi masyarakat pada pemerintah, sehingga pemerintah Desa Kedungreja khususnya para aparat dan juga jajarannya yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan serta Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia harus bekerja lebih keras dalam melakukan sosialisasi dan juga penegakan aturan terkait penanggulangan Covid-19 yang juga menjadi wabah di Desa atau Kelurahan Kedungreja.

Menurut informasi dari Puskesmas Kedungreja, Kasus Covid-19 pertama yang terdeteksi di wilayah Kedungreja adalah di Dusun Tegalak dimana kronologi carier Covid-19 tersebut bisa masuk ke Kedungreja dikarenakan yang bersangkutan hendak pulang ke

kampung halaman setelah pabrik tempatnya bekerja di Cikarang di liburkan sementara akibat Pandemi Covid-19, oleh karenanya yang bersangkutan pulang ke kampung halaman dengan menaiki kendaraan Travel, Seperti yang dikatakan salah satu pegawai di Puskesmas Kedungreja yaitu Darsiyem (37th) sebagai berikut :

“ Untuk kronologi pertama kali Covid-19 di Kedungreja itu terjadi pada bulan Mei 2020. Dia orang Tegalanak mas, rumahnya daerah sekitar kuburan Tegalanak yang dekat mushola. Untuk Namanya saya lupa soalnya sudah cukup lama juga, jadi beliau ini masih muda, umuran diatas masnya sedikit mungkin soalnya dia ini merantau ke Cikarang kerja di pabrik. Jadi kronoliginya dia pulang kampung karena disana udah nganggur beberapa minggu karena Pandemi. Beliau ini inisiatif pesen travel buat pulang padahal katanya agak sedikit flu sebelum berangkat, sedangkan travelnya asal angkut aja, karena yang penting pake masker biar tidak kena razia. Biasa kalo disini kan travel nyampinya malem, jadi luput dari pengawasan aparat di perbatasan juga katanya travelnya ini nyari-nyari jalan tikus yang sepi jadi buat ngehindarin razia. Setelah sampai dia gak bilang ke keluraganya kalo dia sakit, pokoknya ya, orangtuanya seneng aja anaknya balik, tapi setelah beberapa hari beliau sadar, sakitnya mirip Covid-19, disitu kebetulan rumah salah satu pegawai puskesmas juga, jadi lumayan heboh itu satu RT bahkan kabarnya nyampai satu Desa. Yasudah dari Puskesmas menyarankan melakukan Isoslasi mandiri dengan tetap dipantau oleh tanaga medis dari Puskesmas, karena ini kan masuknya Zero man yang ada di Kedungreja”. (Wawancara, Darsiyem, 6 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan dalam jawaban wawancara tersebut dengan Darsiyem selaku Penanggung Jawab UKM Pengembangan Puskesmas Kedungreja, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perketatan batas-batas wilayah kecamatan Kedungreja yang dilakukan oleh berbagai instansi gabungan baik dari Kecamatan, perwakilan dari kelurahan Kedungreja dan juga instansi seperti Kepolisian dan TNI terkait. Hal ini tentunya dilakukan agar memungkinkan penekanan terhadap perantau yang melakukan perjalanan ke kampung halaman yaitu Kedungreja dan membawa virus Covid-19 karena informasi yang minim dan juga ketidaktahuan akan virus tersebut. Apabila dipahami lebih lanjut lagi, bahwa *Zero man* yang di data oleh Puskesmas Kedungreja tersebut tidak memiliki tingkat kewaspadaan yang memadai dalam kesadarannya untuk tidak membawa Corona Virus ke kampung halamannya yaitu Kedungreja, *Zero man* ini hanya beranggapan bahwa sakitnya adalah hal biasa karena sudah menjadi hal yang wajar apabila sakit flu menjangkitinya dan mennganggap flu dan

demam yang dialaminya sehari setelahnya adalah efek dari mabuk perjalanan dan karena perjalanan *Zero man* tersebut dilakukan pada malam hari sehingga asumsi bahwa Virus Corona menjangkitinya hilang.

Pengetahuan yang minim akan Corona Virus dan juga faktor ekonomi akibat tempatnya bekerja telah diliburkan untuk waktu yang tidak di tentukan membuat *Zero man* ini berinisiatif untuk memesan travel untuk pulang ke kampung halaman. Dalam masa Covid-19 sendiri orang-orang yang membuka bisnis travel pada masa awal-awal Covid-19 banya yang melakukan manipulasi dengan mencari jalan-jalan yang dimungkinkan tidak ada pemeriksaan Satgas Covid-19 dan sebenarnya hal itu cukup sulit dilakukan mengingat akan menambah jumlah biaya bahan bakar jadi lebih banyak dan menjadikan perjalanan menjadi cukup lebih lama.

Hal ini tentunya yang dijadikan alasan untuk menaikkan harga tiket perjalanan menjadi lebih mahal, banyaknya *Demand* dari calon penumpang dan juga *Supplay* yang cukup sedikit dari para pebisnis travel ini, menjadikan salah satu sumber pendapatan pada masa awal pandemi.

B. Tim Satgas Covid-19 Desa Kedungreja

Dikarenakan Covid-19 yang semakin merebak di Kecamatan Kedungreja khususnya Desa Kedungreja, Lalu di bentuk Tim Satgas Penangan Covid-19 Desa Kedungreja yang merupakan bagian dari Satgas Penangan Covid-19 Desa Kedungreja yang terdiri dari para Elit Pemerintah dan Non-Pemerintah yang ada di Desa Kedungreja Adi Purnawan, Danramil 12 Kapten Inf. Tasino, Kapolsek AKP Suparjo dan Eko Mulyono. Satgas Covid-19 yang dibentuk merupakan bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, yang menjadi salah satu kebijakan yang menjadi landasan pembentukan Satgas. Adapun Tugas Satgas Covid Kedungreja yang di Bentuk dengan berdasarkan pengembangan dari UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tugas-tugas Satgas Covid-19 Kedungreja termasuk membuat kebijakan pemerintah desa untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya penanggulangan Covid-19 yaitu :

1. Satuan tugas Covid-19 melakukan koordinasi dengan petugas berwenang dalam menangani Covid-19.

2. Satgas memantau kondisi warga yang terindikasi sebagai pasien ODP, PDP, OTG, dan pasien konfirmasi yang dirawat jalan.
3. Satgas melakukan tracing dan pendataan terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19.
4. Satgas memberika laporan ke Puskesmas, Kelurahan, dan Kecamatan jika ada warga yang mengalami gejala Covid-19.
5. Satgas memberikan bantuan makanan kepada warga yang menjadi pasien ODP, PDP, OTG, dan konfirmasi rawat jalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Satgas melakukan pendataan yang terdampak Covid-19 dan memberikan bantuan secara gotong-royong kepada mereka yang tidak mampu.
7. Satgas memastikan bantuan sosial warga dari pemerintah sampai ke penerima.
8. Satgas melakukan pembatasan dan pencatatan orang dan kendaraan yang keluar masuk dengan sistem one stage.
9. Satgas membuat jadwal jaga kampung bagi setiap warga.
10. Satgas memantau dan memastikan warga yang melakukan isolasi mandiri tidak keluar dari lingkungan rumah kecuali untuk keperluan kesehatan.
11. Satgas memastikan warga mematuhi protokol kesehatan.
12. Satgas bersama masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin setiap satu minggu sekali.
13. Satgas memberikan hal-hal positif seperti informasi dan edukasi kepada warga tentang pencegahan dan penanganan pandemi

Satgas Penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja memiliki strategi tertentu Penanganan pandemi serta Pemulihan Pasca Covid-19 yaitu .

1. Pelaksanaan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak)

Mengambil tindakan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 di desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti aturan dari pemerintah tentang 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini menunjukkan bahwa

kepala desa Kedungreja telah menunjukkan komitmen dan kesadaran yang tinggi dalam menghadapi pandemi ini. Hal ini harus menjadi contoh dan diikuti oleh masyarakat desa lainnya agar dapat membantu memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan mereka.

2. Alokasi Penyediaan Tempat Cuci Tangan

Satgas Covid-19 Desa Kedungreja mengambil beberapa tindakan yang diperlukan. Salah satunya adalah dengan menyediakan tempat cuci tangan di ruko tempat berjualan, lembaga-lembaga, dan lokasi umum di masa pandemi. Tindakan ini merupakan langkah yang penting dalam memutus mata rantai penularan virus dan menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam melindungi warga dari risiko penyebaran virus Corona. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, kesadaran dan kepedulian masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dan memastikan kesehatan dan keselamatan bersama.

3. Vaksinasi

Gambar 1.4 VAKSIN



Vaksinasi merupakan salah satu upaya penting dalam pencegahan penyebaran virus Corona di masyarakat. Di Desa Kedungreja, kepala desa dan aparat desa telah mewajibkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan infeksi virus Corona. Dalam kehidupan sehari-hari, vaksinasi merupakan cara efektif untuk mendorong tubuh membentuk *antibody* yang berguna dalam melawan infeksi virus Corona.

4. Penyemprotan Disinfektan

Gambar 2.4 PENYEMPROTAN DISINFEKTAN



Penyemprotan disinfektan merupakan salah satu upaya penting dalam pencegahan penyebaran virus Corona di masyarakat. Di Desa Kedungreja, upaya penyemprotan disinfektan ini belum dilakukan secara menyeluruh karena adanya keluhan dari sebagian warga saat dilakukan penyemprotan disinfektan ke sekitar perumahan masyarakat. Meskipun demikian, penyemprotan disinfektan yang dilakukan secara rutin sekali dalam waktu seminggu dapat membantu mengantisipasi menyebarnya virus Corona dan menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat desa.

5. Pembuatan Posko Satgas Covid-19

Gambar 3.4 POSKO COVID-19



Salah satu program atau upaya pencegahan Covid-19 yang kurang maksimal di Desa Kedungreja adalah pembuatan posko satgas Covid-19. Upaya ini masih belum maksimal karena terdapat kendala yaitu jumlah pintu masuk yang sangat banyak ke Desa Kedungreja. Pembuatan posko satgas Covid-19 di Desa Kedungreja adalah salah satu program yang belum terlaksana dengan baik. Kendala utama yang dihadapi adalah jumlah pintu masuk yang sangat banyak ke Desa Kedungreja. Di Desa Kedungreja, telah dibentuk posko-posko dan dilaksanakan kegiatan pemantauan oleh Satgas Desa COVID-19. Setiap posko dilengkapi dengan fasilitas tempat mencuci tangan, sabun, handsanitizer, serta termometer untuk memastikan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Tim pemantauan dan relawan bertugas menjaga posko selama 24 jam. Apabila ada keluarga yang terdampak COVID-19, Pemerintah

Desa Kedungreja akan segera memantau dan melakukan tracing terhadap anggota keluarga yang terdampak. Selanjutnya, laporan akan diteruskan ke Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti dengan proses penjemputan.

Di posko pemantauan, terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pemantauan dan relawan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu tubuh, serta pembagian masker, disinfektanisasi kepada masyarakat

6. Digitalisasi Desa

Gambar 4.4 DIGITALISASI



Pandemi Covid-19 pemerintah desa Kedungreja berinovasi dan mencari peluang untuk menghadapinya yaitu dengan di buatnya website Desa dan juga Sosial Media sebagai wadah informasi pemerintah Desa kepada masyarakat. Selain itu, pandemi menyebabkan masyarakat mengurangi kontak tatap muka untuk mengurangi penularan virus. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kedungreja sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, khususnya di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dalam konteks desa digital, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang murah dan cepat tanpa harus datang ke Kanotr Desa untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Implementasi program desa digital harus segera dilakukan oleh desa bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak ketiga lainnya. Hal ini penting untuk memastikan program Desa Digital berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat.

7. Pemulihan UMKM

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha di sektor UMKM berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan pemasaran produk. Kelompok usaha yang terdiri dari usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan keahliannya untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya

manusia memberikan efek psikologis yang positif seperti peningkatan kepercayaan diri dan peningkatan kemampuan produksi dan pemasaran produk. BUMDesa berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi UMKM, menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan sesi bersama yang sering dilakukan dengan dukungan pihak eksternal. Kegiatan edukasi usaha kecil BUMDesa mencakup berbagai topik seperti penguatan brand produk melalui media sosial, pemasaran online, pengenalan pasar digital, pengolahan produk desa setempat, pengembangan kawasan desa wisata dan edukasi lainnya.

Gambar 5.4 UMKM

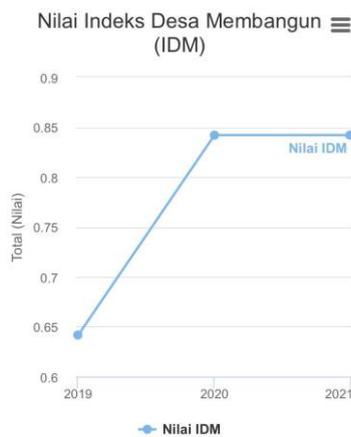


Narasumber berasal dari berbagai Sektor yang ahli di bidangnya. Melalui kegiatan pelatihan ini, kami berharap para perwakilan UMKM memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, kegiatan edukasi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berkolaborasi dan bertukar pengalaman dalam pengembangan usaha.

C. Peningkatan Indeks Desa Membangun

Dalam situasi pandemi Covid-19, IDM dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menilai kemampuan desa-desa dalam menangani pandemi. Indeks ini mencakup beberapa aspek, antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, yang relevan dalam penanganan pandemi Covid-19.

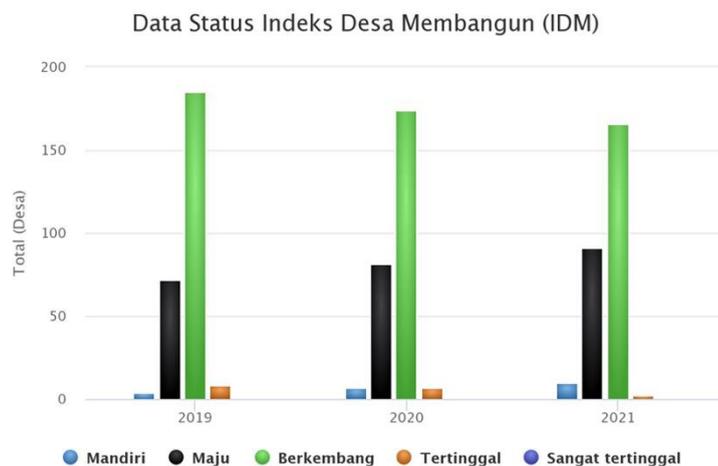
Table 8.4 IDM



<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idm/33.01>

Bisa dilihat pada tahun 2020-2021, Nilai Indeks Desa Membangun Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja berada pada poin 0.85, hal ini meningkat drastis dari tahun 2019 yang hanya 0.65 poin saja, dengan nilai ini Desa Kedungreja pada tahun 2020-2021 saat kondisi pandemic berada pada kategori Desa Berkembang menuju Maju dan bukan tidak mungkin Desa Kedungreja yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan bertransformasi menjadi Kategori Desa Maju pada nilai IDM tahun 2022 ini setelah berakhirnya pandemic Covid-19. Nilai IDM ini merupakan Indeks komposit yang di bentuk dari tiga indeks yaitu, Indeks Ketahanan Sosial yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Pemukiman. Indeks Ketahanan Ekonomi, yaitu Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan. Dan yang terakhir Indeks Ketahanan ekologi. Untuk aspek kesehatan, indikator seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dapat diukur. Aspek pendidikan dapat diukur melalui indikator seperti sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan kualitas pendidikan. Aspek ekonomi dapat diukur melalui indikator seperti jumlah pelaku usaha, kemandirian ekonomi desa, dan upaya pemerintah dalam membantu sektor ekonomi desa. Sedangkan aspek lingkungan dapat diukur melalui indikator seperti pengelolaan limbah dan air bersih, penataan ruang yang baik, dan ketersediaan akses ke alam yang sehat.

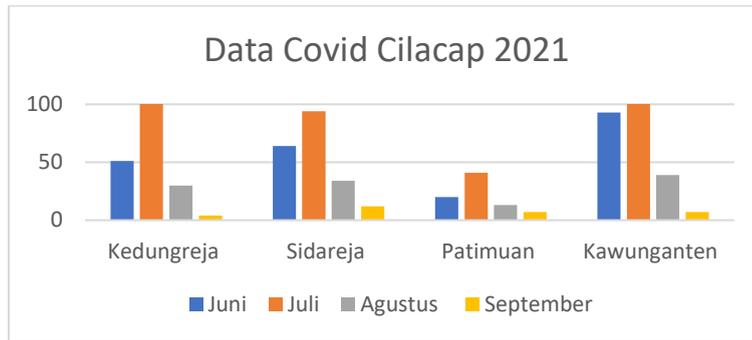
Table 9.4 IDM 2



<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idm/33.01>

Pada saat pandemic *Covid-19*, Pusat Pemerintahan dan Perekonomian di Desa Kedungreja yang paling terdampak, namun dengan sinergitas masyarakat khususnya orang-orang berpengaruh (Elit) Desa inilah. Oleh karenanya banyak orang-orang berpengaruh (Elit) desa yang menempati Kawasan desa Kedungreja ini, Elit-Elit seperti Politisi dalam hal ini adalah Anggota DPRD, Akademisi, dan juga Pejabat, selain itu Desa Kedungreja sendiri merupakan desa terbesar di Kecamatan Kedungreja dan memiliki perwakilan di DPRD Cilacap yang cukup banyak. Sehingga Peneliti tertarik dengan obyek penelitian yaitu Elit Desa dan Sinergitasnya dalam penanganan Pandemi *Covid-19* karena bisa diuraikan nantinya sebab dan faktor yang membuat suatu Desa dapat bertahan dengan andil orang-orang besar dan berpengaruh yang ada di desa tersebut. Selain itu, dengan meningkatkan IDM desa, maka kemampuan desa-desa dalam menangani pandemi *Covid-19* juga akan meningkat. Desa-desa yang memiliki IDM yang tinggi biasanya memiliki masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang sehat. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi risiko penyebaran *Covid-19* di desa-desa tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Table 10.4 DATA COVID-19



Sumber: <http://cilacapkab.pmi.or.id/kategori/detail/update-data-covid19-kabupaten-cilacap/10>

	Juni	Juli	Agustus	September
Kedungreja	51	104	30	4
Sidareja	64	94	34	12
Patimuan	20	41	13	7
Kawungante	93	119	39	7

Tabel yang diberikan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam jumlah kasus positif *Covid-19* di empat desa di Kecamatan Kedungreja selama empat bulan terakhir. Desa Kedungreja menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam kasus *Covid-19* dibandingkan dengan desa-desa lainnya, dengan Desa Kawunganten memiliki presentase yang hampir sama namun dengan jumlah kasus yang lebih tinggi .

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanganan *Covid-19* yang dilakukan di Desa Kedungreja mungkin lebih efektif dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Kemungkinan faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan kasus *Covid-19* di Desa Kedungreja termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, upaya edukasi dan sosialisasi yang tepat oleh elit desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, meskipun Desa Kedungreja menunjukkan penurunan kasus *Covid-19* yang cukup signifikan, perlu diingat bahwa pandemi *Covid-19* masih berlangsung dan upaya-upaya penanganan harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara elit desa, masyarakat, dan pemerintah untuk terus mengendalikan penyebaran *Covid-19* di wilayah tersebut dan menjaga keberlangsungan kesehatan masyarakat.

D. Elite Desa Kedungreja

Salah satu alasan penelitian difokuskan pada Elit Desa adalah karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengendalikan masa sehingga dapat membantu mengontrol penyebaran Covid-19 dengan berbagai pola strategi dan sinergi dengan masyarakat atau Elit lainnya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kekuasaan material dan non-materi yang dimiliki oleh para Elit Desa dan sejauh mana kekuasaan tersebut digunakan untuk membantu dalam penanganan Covid-19 di Desa Kedungreja termasuk sumber daya yang para Elit ini miliki.

Dalam upaya untuk menangani pandemi Covid-19, peran Elit Desa sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus dan memastikan kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki, para Elit Desa dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Elit lainnya untuk membangun strategi yang efektif dan sinergi dalam memerangi pandemi ini. Dengan demikian, tidak hanya keberhasilan dalam mengendalikan Covid-19 yang akan dicapai, namun juga lahirnya moralitas dalam Elit-Elit Desa yang memilih untuk membantu pemerintah dalam pengkondisian dan penanganan Covid-19 ini.

Dalam situasi yang sangat sulit ini, kolaborasi antara pemerintah dan Elit Desa dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan meminimalkan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana para Elit Desa dapat menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

Para Elit Desa dapat melakukan banyak hal, seperti memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan, mendistribusikan perlengkapan medis seperti masker dan *hand sanitizer*, serta memberikan edukasi yang benar mengenai cara-cara untuk menjaga diri dan keluarga dari penyebaran Covid-19. Selain itu, para Elit Desa juga dapat mengatur kegiatan-kegiatan sosial dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti penggalangan dana atau kegiatan keagamaan, untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Elit Desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki, para Elit Desa dapat membangun kolaborasi yang efektif dengan pemerintah dan masyarakat dalam memerangi penyebaran virus ini. Hal ini tidak hanya dapat membantu dalam penanganan

pandemi Covid-19, namun juga dapat memperkuat moralitas dan integritas Elit Desa sebagai pemimpin dalam masyarakat Elit Lokal di Kedungreja tersebut terdiri dari :

1. Kepala Desa Kedungreja

Kepala Desa Kedungreja sendiri Dijabat oleh Adi Purnawan, yaitu salah satu putra daerah yang lahir pada Tahun 1982, Sebeleum menjadi Kepala Desa, Adi Purnawan adalah seorang aktivis organisasi Pemuda Pancasila Cilacap dan menjabat sebagai ketua Pemuda Pancasila cabang Kedungreja. Adi Purnawan sendiri dilantik pada Tahun 2019 setelah menang dari kubu petahana Parsiyan, kemenangan Adi Purnawan sendiri diwarnai rumor dengan bantuan elit pejabat dari pemerintah kabupaten sehingga sempat ada gejolak pada saat terpilihnya Adi Purnawan sebagai Kepala Desa Kedungreja. Adi Purnawan sebagai kepala pemerintahan Desa Kedungreja, Kepala desa bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang desa khususnya dalam Penanggulangan Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Salah satu mandatnya adalah memajukan kehidupan masyarakat di desa khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan keamanan desa untuk mencapai visi dan misi desa Kedungreja yang harmonis dan berdaya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh elit lainnya yang telah ditunjuk untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pencegahan Covid-19. Pejabat Desa dan masyarakat sama-sama terlibat dalam memutus mata rantai penularan virus tersebut. Oleh karena itu Adi Purnawan sebagai Kepala Desa Kedungreja beberapa kali melakukan Refocusing Kebijakan dalam untuk memaksimalkan upaya penanggulangan Covid-19 di Kedungreja, seperti Realokasi Anggaran bantuan Covid-19 sebesar 60% dari APBDesa, Pengadaan Sarana dan Prasaran pendukung pencegahan dan penanggulangan Covid-19 lalu, Refocusing Kebijakan, hal ini sebagai tanggapan keluarnya Instruksi Presiden Nomer 4 Tahun 2020.

Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja membantu pejabat desa lainnya dan masyarakat dalam melaksanakan program pencegahan Covid-19. Semua elemen masyarakat, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan elit kelembagaan lainnya, bekerja sama untuk menerapkan peraturan dan aturan yang diberlakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah orang yang terinfeksi virus tersebut. Tujuannya adalah untuk membatasi penyebaran wabah COVID-19 yang saat ini menyebar.

2. Kapolsek Kedungreja

Kapolsek Kedungreja sendiri tahun sekarang dijabat oleh AKP Suparjo. AKP Suparjo sebelumnya merupakan Kapolsek kesugihan dan dimutasi pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : KEP/1978/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Surat Telegram Plt. Kapolresta Cilacap Nomor : ST/375/XI/KEP./2022 tgl 15 November 2022 tentang Upacara serah Terima jabatan Kapolsek Jajaran di Lingkungan Kapolresta Cilacap. Sebagai Kapolsek Kedungreja Terkait peran Polri dalam penanganan Covid-19, Kapolsek Kedungreja mengatakan, hal itu sebagai sarana bagi aparaturnya setempat yang berdedikasi untuk melakukan kegiatan pencegahan Covid-19, Pelaksanaannya dilakukan oleh pihak kepolisian sektor bekerja sama dengan pihak puskesmas, tokoh agama dan peran masing-masing kepala desa di kecamatan Kedungreja. Implementasi ini memberikan panduan penyuluhan yang diharapkan akan menarik bagi masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan peran Kapolsek memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan orang banyak, selain itu, Kapolsek Kedungreja tidak jarang memberi tugas Standby terhadap anggotanya khususnya Iptu Erwin sebagai fasilitator Satgas Covid-19 Kedungreja, dan bertugas apabila ada keluhan mengenai penanganan covid-19 di daerah Kedungreja. Secara terpisah, Kapolsek secara tidak langsung juga membantu menyiapkan tindakan karantina, seperti penyemprotan disinfektan bersama dengan Puskesmas, Koramil, Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan. Hal ini didukung karena sumber daya Polsek Kedungreja yang memiliki cukup anggota khususnya anggota Bhabinkamtibmas yang berjumlah 9 anggota dan juga sumber daya materil seperti kendaraan yang cukup, hal ini dimanfaatkan oleh AKP Suparjo sebagai pendukung dalam mobilisasi Satgas Covid-19 dalam melakukan *Tracing* dan penegakan aturan protokol kesehatan ditetapkan

3. Danramil 12/ Kedungreja

Koramil 12/Kedungreja merupakan basis gugus tugas TNI yang ada di Kecamatan Kedungreja. Koramil 12/Kedungreja, dipimpin oleh Danramil Kapten Inf. Tasino. Kapten Inf. Tasino menjabat di wilayah Kecamatan Kedungreja sejak tahun 2019, Sebelumnya Kapten Inf. Tasino Pernah bertugas di wilayah Kecamatan Wanareja dan juga Koramil 11/Gandrungmangu.

Di Kedungreja, Kapten Inf. Tasino memiliki Track Record yang cukup bagus di Kedungreja, beberapa andil nya yaitu, ikut serta membangun jembatan darurat di daerah Desa Ciklapa, bantuan terhadap Korban Banjir Cipriyuk, lalu menjadi penengah dalam Konflik Tanah di Patimuan dan lain sebagainya, selain itu Kapten Inf Tasino juga berperan aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Kedungreja.

Koramil 12/Kedungreja yang berada di bawah pimpinan Kapten Inf Tasino merupakan salah satu yang paling aktif dalam melakukan bakti sosial dalam penanggulangan Covid-19, dalam keanggotannya sebagai Satgas Penanganan Covid-19 Kedungreja, Kapten Inf Tasino turut serta dalam memobilisasi anggotanya untuk penjagaan perbatasan di Bendungan Menganti Kecamatan Kedungreja bersama tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan lain sebagainya, lalu pengamanan Distribusi Vaksinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, POLRI dan Puskesmas Kedungreja, Kolaborasi dengan PMII dalam membuat Posko Covid-19 di Ciklapa.

Kapten Inf. Tasino juga merupakan yang terdepan dalam memberikan bantuan untuk Korban Banjir Bulupayung dan diberikan apresiasi yang besar oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman S.STP M.Si. Yang terbaru Kapten Inf Tasino mencanangkan Kampung Pancasila yang dipusatkan di Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja , Pencangkakan tersebut sebagai bagian dari menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan NKRI terhadap kehidupan bermasyarakat di Desa Kedungreja

4. Kepala Puskesmas Kedungreja

Puskemas Kedungreja merupakan satu-satunya Puskemas yang ada di Kecamatan Kedungreja yang memberikan pelayanan 11 desa di Kecamatan Kedungreja. Puskesmas Kedungreja sejak tahun 2019 dipimpin oleh Eko Mulyono S.Km M.Kes dan menjadi salah satu Pimpinan Puskesmas terbaik di Cilacap bahkan di Jawa Tengah. Eko Mulyono mengawali karir sebagai Kepala Puskesmas di wilayah Kampung Laut dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang cukup terpencil di Kabupaten Cilacap. Pada saat menjabat menjadi Kepala Puskesmas Kampung Laut, Eko Mulyono mendapat penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tahun 2008. Lalu pada tahun 2017, Eko Mulyono dipindah tugaskan ke wilayah Wanareja, di Wanareja tersebut Eko Mulyono membuat Inovasi Puskemas Wisata.

Lalu Pada Tahun 2019, Eko Mulyono kembali mutasi ke Puskesmas Kedungreja, di Puskesmas Kedungreja ini Eko Mulyono menghadapi tantangan yang cukup berat karena

wabah pandemi Covid-19 di Cilacap khususnya Kedungreja. Dalam tantangan Covid-19 dan Sarana serta Prasarana yang kurang memadai, Eko Mulyono menciptakan inovasi SURTI KENA COVID-19 ” *Surveilans* berbasis Teknologi Informasi untuk Komunikasi, Edukasi, Nasehat aman dari aman dari Covid 19”. Inovasi ini mengantarkan dirinya menjadi Inovasi terbaik dalam penanganan Covid-19 dan menjadi *Role Model* untuk diterapkan di 37 Puskesmas di Kabupaten Cilacap. Atas Kegigihan Eko Mulyono tersebut, Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja dapat bertahan serta cukup tangguh dalam penanggulangan Covid-19 di Kedungreja, hal itu tentunya juga tidak terlepas dari Kolaborasi-Kolaborasi berasama dengan instansi-intasi lain dan juga pemerintah baik Desa maupun Kecamatan.

Karena berbagai inovasi dan kolaborasi yang menjadikan Kedungreja tanggung pada bulan November 2021, Puskemas Kedungreja yang dipimpin oleh Eko Mulyono dapat mewakili Kabupaten Cilacap menjadi satu-satunya Puskesmas yang dinilai langsung oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB sebagai Puskesmas dengan Unit Pelayanan Publik yang efektif dan Efisien serta cepat dan Profesional. Selain itu Eko Mulyono juga di usulkan oleh Pemda Cilacap dalam ajang Anugrah ASN inspiratif yang diselenggarakan oleh KemePAN RB untuk menjadi contoh dan inspirasi bagi ASN yang ada di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia .

4. Anggota DPRD Cilacap

Anggota DPRD yang merupakan salah satu Anggota Legislatif dari Partai PKS dan merupakan anggota komisi A DPRD Cilacap yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III untuk keanggotaan 2019-2024. Rusmanto sendiri merupakan asli putra daerah Cilacap kelahiran 1976 yang bertempat tinggal di Bangunreja, Kedungreja. Karir Politik Rusmanto berawal dari menjadi Anggota Partai Keadilan Sejahtera sejak Tahun 2012, Rusmanto dikenal merupakan kader partai yang sangat aktif dalam melakukan kepannduan khususnya dalam menjadi relawan bencana yang ada di Indonesia. Karena keaktifannya dalam kepanduan relawan PKS Cilacap, Rusmanto lalu diangkat menjadi komandan Kepanduan DPD PKS Cilacap sebagai bagian dari bantuan misi kemanusiaan PKS Cilacap untuk bencana-bencana yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah ikut serta dalam pengiriman relawan untuk bencana banjir Jakarta, Banjir di Sumatra Utara, dan juga bencana banjir yang ada di Lombok, Selain menjadi relawan banjir, tercatat Rusmanto juga pernah menjadi satu-satunya relawan dari PKS DPD Cilacap saat bencana Gunung Sinabung.

Karena Keaktifannya dan kepeduliannya terhadap sesama tersebut, Rusmanto dinobatkan menjadi Caleg Anggota DPRD Cilacap Tahun 2019-2024 di Daerah pilihan 3

yang meliputi Kedungreja, Patimuan serta Sidareja. Karena track record yang bagus, Rusmanto dapat terpilih mewakili PKS dan Kedungreja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Rusmanto sendiri memiliki slogan dalam melakukan kampanyenya yaitu ” Penyambung Lidah Masyarakat” hal ini merupakan makna Rusmanto adalah rakyat yang memiliki fungsi atau tugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga aspirasi tersebut dapat didengar.

Pada Masa Pandemi Covid-19, Rusmanto sebagai representasi masyarakat Kedungreja banyak memberikan terobosan-terobosan dan juga aksi-aksi kemanusiaan yang menjadi ciri khasnya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah Sekolah Tani yang merupakan terobosan untuk mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola lahan pertaniannya khususnya pada masa Pandemi Covid-19. Lalu Tour of Duty dimana ini adalah bagian pengembangan dari pengalaman Rusmanto untuk di terapkan di wilayah Cilacap yang nantinya di jaring pengkaderan untuk menjadi relawan dalam penanggulangan bencana-bencana yang ada di Indonesia. Lalu ada inovasi Rumah Keluarga Indonesia yang menjadi bagian dari programnya sebagai kader Partai PKS dan berkolaborasi dengan Aleg PKS lainnya yaitu Dra. Wiwiek Yuning Prapti. Rusmanto juga aktif dalam memberi masukan dan bantuan kepada Pemerintah Desa Kedungreja maupun Pemerintah Kecamatan Kedungreja dalam bentuk pelatihan-pelatihan relawan, suplay relawan dalam bencana banjir Cipriyuk Kedungreja 2020, Banjir Sidareja, dan juga aktif dalam menjadi komunikator untuk konflik agraria yang terjadi di Bulupayung, Patimuan .

5. Tokoh Agama

Tokoh Agama di Desa Kedungreja yang merupakan salah satu petinggi NU Kabupaten serta Kecamatan adalah KH. Ahmad Shodiqin. KH. Ahmad Shodiqin merupakan salah satu dari tiga ulama besar yang ada di Kedungreja, termasuk KH Aminudin, KH Abu Hurairoh. Guru KH Ahmad Shodiqin merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di Kedungreja pada tahun 1971 yaitu KH. Kosasi. KH Ahmad Shodiqin merupakan pimpinan dari MI El Firdaus Kedungreja yang berada di Jl. Raya Kedungreja Gang Ansor No.5 RT.02/RW.08. KH. Ahmad Sodiqin sendiri pernah menjadi ketua Pengurus Ranting NU pada masa Khidmat tahun 1995-2000. Dalam masa jabatannya tersebut KH. Ahmad Sodiqin ikut berperan dalam pembentukan badan-badan atau sub organisasi dibawah Ranting NU Kedungreja seperti Muslimat NU Ranting Kedungreja, Fatayat NU Ranting Kedungreja, (IPNU) Ranting Kedungreja, IPPNU Ranting Kedungreja dan juga Gerakan Pemuda Ansor NU Ranting Kedungreja.

Pada Masa Covid-19 KH. Ahmad Shodiqin berperan cukup penting dalam memberikan pendapat terkait pemulasaraan jenazah akibat Covid-19. Pemulasaraam tersebut berdasarkan prosedur protokol kesehatan, dan ketentuan hukum-hukum islam syara'. KH Ahmad Shodiqin juga turut serta mengutus salah satu kadernya untuk menjadi peserta pemulasaraan Jenazah Akibat Covi-19 yang di adakan oleh Pimpinan Wilayahh Lembaga Kesehatan Nahdatul Ulama Jawa Tengah. KH Ahmad Shodiqin juga berkontribusi dalam kolaborasi antara (MWCNU) yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Kedungreja dengan UPTD Puskesmas Kedungreja dengan menyelenggarakan serbuan Vaksinasi sebanyak 1500 dosis, vaksinasi tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan menyasar para warga NU serta santri-santri yang berada di Pondok Pesantren tersebut. KH Ahmad Shodiqin juga berpartisipasi dalam melakukan penyemprotan di wilayah Kedungreja khususnya Dusun Kedungbakung sebagai bagian dari keikutsertaannya dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja. Sebagai pimpinan MI Ell Firdaus Kedungreja, KH. Ahmad Shodiqin juga turut serta dalam penerapan protokol kesehatan di yayasan sekolah tersebut dan juga penerapan WFH sebagai bagian dari kepatuhan akan protokol kesehatan di Desa Kedungreja

6. GenRe (Generasi Berencana)

Pada tingkat Kepemudaan, salah satu organisasi yang cukup banyak menyumbang edukasi bagi terlaksananya protokol kesehatan khususnya menyasar para remaja adalah GenRe atau Generasi Berencana Kedungreja. GenRe Kedungreja sendiri di ketuai oleh Ady Gunantoro yang merupakan Finalis Duta GenRe Kab.Cilacap 2021. Ady Gunantoro merupakan Alumni SMA Kedungreja dan beberapa kali ikut serta dalam Olimpiade baik tingkat regional Provinsi maupun Nasional. Kepintaran Ady juga mengantarkannya berkuliah di UNS sebagai mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Selama menjabat sebagai ketua GenRe Kedungreja.

Ady Gunantoro aktif dalam mengadakan diskusi-diskusi praktis mengenai penanganan Covid-19, Penanggulangan Covid-19 serta topik-topik yang menyangkut kepemudaan seperti diskusi mengenai, kesehatan mental, pengenalan sistem reproduksi, anti narkoba, cara hidup sehat bagi remaja ,kiat-kiat menjaga toleransi beragama dan sebagainya. Untuk forumnya sendiri Ady menggunakan sosial media berbasis video call dalam menjalankan diskus,seperti menggunakan *Zoom* ataupun *Google Meets*. Hal ini merupakan kelanjutan dukungan dalam penerapan protokol kesehatan namun juga dukungan terhadap ditribusi informasi yang baik bagi remaja-remaja yang ada di Kedungreja

7. Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila sendiri telah ada di Desa Kedungreja sejak tahun 2017-2018. Pemuda Pancasila Kedungreja sendiri didirikan oleh beberapa tokoh seperti Adi Purnawan yang sekarang menjabat menjadi Kepala Desa Kedungreja, Distiyo Prayogo yang merupakan Ketua Pemuda Pancasila sekarang dan juga Catur Widjianto. Distiyo Prayogo sendiri merupakan Ketua Pemuda Pancasila dari tahun 2019 sampai sekarang dimana Prayogo mengganti Adi Purnawan dikarenakan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kedungreja, Prayogo sendiri dikenal aktif berkolaborasi dengan Elit dan tokoh-tokoh yang ada di Desa Kedungreja dan kemampuannya membangun sinergi dengan mereka membuatnya menjadi Ketua Pemuda Pancasila. Kedekatannya dengan elit dan tokoh-tokoh masyarakat membuat Pemuda Pancasila Kedungreja dikenal aktif dalam membantau masyarakat dalam pemerintah khususnya pada penanggulangan pandemi Covid-19 di Kedungreja

BAB V

KOLABORASI ELITE LOKAL DALAM TATA KELOLA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

(Studi Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap)

A. Kolaborasi Elite Local Government dalam Kerangka Collaborative Governance

Penanggulangan Covid-19 di Kedungreja pada rentang waktu 2020 sampai 2022 terbilang cukup baik dan strategi yang cukup sukses sehingga penekanan terhadap angka positif Covid-19 di Kedungreja dapat semakin rendah dari bulan-ke bulan. Hal ini penanggulangan Covid di Kedungreja tidak terlepas dari peran Elite-elite lokal di Desa Kedungreja, baik *Elite Local Government* maupun *Elite Local Non-Government*. Khususnya *Elite Government* yang terdiri dari berbagai elemen institusi serta lembaga terkait yang membantu penanggulangan Covid-19, memiliki peran-peranannya masing-masing sehingga dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lengkap dalam menjalankan perintah atau dalil institusi yang berada di atasnya dalam melakukan kebijakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan warganya serta menekankan kedisiplinan warganya, selain itu pemberian bantuan berdasarkan UU No 2 Tahun 2020 Mengenai Alokasi Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 juga menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh *Elite Lokal Government* yang ada Desa Kedungreja . Oleh karenanya berikut dijelaskan mengenai tata kelola penanggulangan Covid-19 oleh Elite Lokal Government berbasis kolaborasi dengan dengan teori *Collaborative Governance* pada masa pandemi yaitu :

1. Kondisi Awal

Tata Kelola penanggulangan Covid-19 yang ada di Desa Kedungreja berawal dari UU No.2 Tahun 2020 mengenai alokasi dana desa untuk penanganan pandemi. Dimana hal ini menjadi instruksi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kedungreja dengan melakukan musyawarah terkait perubahan kebijakan anggaran belanja untuk menyesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2020 tersebut. Sebelumnya pemerintah Desa Kedungreja telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan untuk membahas masalah peraturan yang baru muncul tersebut. Hal ini, tentunya terkait dengan penyesuaian kembali anggaran yang dimiliki dan juga melakukan kolaborasi terkait output atau hasil dari perubahan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini disampaikan melalui wawancara dengan Adi Punawan selaku Kepala Desa Kedungreja :

” Untuk bagaimana Tata Kelola penanggulangan Covid-19 itu jelas berdasarkan perintah dari pusat yaitu instruksi dari presiden mengenai perketatan kegiatn sosial yang ada di desa dan penyesuaian alokasi dana desa untuk penanganan pademi itu kalau untuk pemerinah desanya, karena dari pusat mau tidak mau harus kami jalankan meskipun anggaran yang telah direncanakan harus di rubah sebagian besarnya. Selain karena instruksi penyesuaian anggaran tersebut dari pusat, juga secara sosial memang sudah ada kritik dari masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat agar desa turun tangan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Awal-awal cukup sulit mas karena perangkat desa yang awalnya biasanya bertemu, kali ini harus via Whatsapps jadi koordinasi satu persatu perangkatnya. Tapi yang jelas memang untuk awal-awal koordinasi antara perangkat desa dan juga lembaga lain cukup terkendala. Seperti dengan puskesmas pada awal-awal pandemi masuk di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, saya wanti-wanti ke Pihak puskesmas untuk tetap siaga dan mengkoordinasikan terkait pembentukan Tim Penanganan Covid-19 agar dapat bertugas langsung apabila ada kasus Covid di Kedungreja, Saya beserta kepala Desa lain pada awal-awal mendesak Camat untuk Koordinasi dengan pihak Kapolsek dan TNI Desa khususnya kepada pengerahan anggota Bhabhinsa kecamatan Kedungreja , untuk pengkoordinasian penjagaan perbatasan kecamatan ”. (wawancara Adi Purnawan,6 Februari 2023).

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa Adi Purnawan selaku Kepala Desa kedungreja melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan merealisasikan amanat dari pemerintah pusat dalam pengketatan protokol kesehatan dan juga penyesuaian anggaran Covid-19, selain itu koordinasi yang dilakukan juga cukup menyeluruh dengan elit lokal pemerintah lainnya. Seperti dengan pihak Puskesmas Kedungreja, Kepala Desa Kedungreja pada saat awal pandemi, melakukan koordinasi yang cukup Intense dengan Kepala Puskesmas Eko Mulyono, hal ini dikarenakan Puskemas sebagai instansi pertama dalam bidang kesehatan di Desa Kedungreja akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 di Desa .

Hal ini disampaikan saat wawancara dengan Eko Mulyono selaku Kepala Puskesmas Kedungreja, sebagai berikut :

” Saat memasuki awal-awal pandemi di Indonesia, jujur saya sudah cukup was was mas, karena menurut saya pandemic ini akan nyebar cukup masih apalagi apabila sampai ke Desa khususnya Desa Kedungreja yang notabennya tingkat sosialisasi antar masyarakatnya cukup tinggi . Pertama kali saya dengan ibu Tri (Tri Yunani) melakukan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung seperti Masker ,APBD dan Fasilitas Karantina, pada saat itu kami melakukan pengadaan sarana dan prasarana sedikit demi sedikit karena kami kira pandemi tidak akan semasif sekarang jadi, pihak puskesmas bisa mengadakan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak kecamatan maupun dari pihak desa karena kami fikir belum diperlukan. Selain itu apabila pengadaan langsung besar saya fikir akan mengganggu stabilitas keuangan Puskesmas karena Pandemi yang ada membuat berbagai tools penunjangn penanganan pandemi semakin mahal, jika tanpa campur tangan pemerintah ”. (wawancara Eko Mulyanto, 8 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan kepala puskesmas Kedungreja yaitu Eko Mulyanto bisa saya simpulkan bahwasanya pada masa awal pandemi, Elit Puskesmas telah melakukan analisa singkat dengan melakukan pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Covid-19, namun dirasa pandemi tidak masif, pengadaan sarana dan prasarana tersebut diadakan dalam jumlah yang terbatas karena agar tidak mengganggu anggaran yang telah di siapkan oleh pihak Puskesmas Kedungreja. Selain pihak puskesmas yang turut serta bersama dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, terdapat juga aparat Keamanan yang ikut turut dalam melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 di Kedungreja hal ini dikarenakan Kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan aparat keamanan dalam hal ini adalah Kepolisian Kedungreja merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan mengingat merupakan salah satu unsur yang penting dalam menjaga wilayahnya dalam pengketatan protokol kesehatan khususnya pada masa awal terjadinya Covid-19. Hal ini tentu seperti yang dikatakan oleh Kapolsek Kedungreja Suparjo seperti berikut :

”Kondisi awal atau penyebabnya karena kepolisian khususnya Polsek Kedungreja merupakan satuan tugas yang memiliki fungsi khusus

dalam satgas untuk menegakan protokol kesehatan di masyarakat, untuk awal-awal karena kantor kita dekat dengan kecamatan jadi langsung ada kesepakatan dan dengan bapak camat untuk penempatan personil di perbatasan Desa Rejamulya karena itu bagian pintu masuk yang cukup terpencil untuk para perantau masuk ke wilayah kecamatan Kedungreja, jadi hari itu juga kami langsung kami tindak lanjuti jadi kami survei dulu lapangan untuk melihat bagaimana kondisi perbatasan Kecamatan dengan Provinsi Jawa Barat itu secara langsung, dan memang banyak di temukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan mungkin saja membawa Virus Corona tersebut, jadi itu lebih ke sejarahnya ya mas, jadi alhamdulillah koordinasi cukup baik antar Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian, sementara dengan desa kami menunggu Kecamatan untuk membuat pertemuan terbatas terlebih dahulu jadi tidak langsung bertemu dengan perwakilan dari desa dan Kepala Desa untuk membahas terkait protokol kesehatan yang akan di terapkan di masing-masing Desa termasuk yaitu Desa Kedungreja”. (wawancara Suparjo , 8 Februari 2023)

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa Kolaborasi Kepolisian awalnya adalah dengan pihak dari Kecamatan dalam hal ini adalah Camat Kedungreja, hal ini dilakukan mengingat Kepolisian merupakan instansi yang tepat dalam rencana penegakan kontrol protokol kesehatan yang efektif dan juga mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan tersebut baik di area Kecamatan Kedungreja maupun di area perbatasan Kecamatan Kedungreja. Selain itu dari pihak TNI juga turut andil dalam saat kondisi awal atau dimulainya kolaborasi untuk penanggulangan Covid-19 dilakukan hal ini seperti yang dikatakan oleh Kapten Inf.Tasino sebagai petinggi Danramil 12/Kedungreja yaitu.

”Saya sebagai Danramil memiliki tugas dan wewenang yang kurang lebih sama dengan pihak Kepolisian karena kita termasuk dalam aparat penegak hukum yang tugasnya menjaga Kamtibmas tersebut jadi untuk mendampingi Instansi lain dalam hal keamanan. Kita tempatkan beberapa personil di perbatasan kecamatan untuk membantu pihak kepolisian dalam pengamanan. Bisa dibilang belum ada tugas yang benar-benar khusus waktu itu, jadi memang ada

perbedaan yang mendasar, kepolisian yang lebih banyak turun tangan, kita ibaratnya hanya memantau saja agar proses keamanan dan tindakan memutus dan mencegah pandemi Covid-19 tidak terjadi ” . (wawancara Tasino, 8 Februari 2023).

Bisa disimpulkan bahwasannya untuk Tugas Danramil sebagai Elit Militer di Desa Kedungreja sendiri pada awalnya hanya bertugas untuk bantuan pengamanan perbatasan dan juga karena untuk pemeriksaan dan keamanan wilayah lebih diserahkan kepada kepolisian khususnya pada awal masa Covid-19 di Desa Kedungreja. Bantuan tersebut berupa pengerahan beberapa personil untuk membantu pengamanan perbatasan dan pemeriksaan penumpang. Tentunya memakai pakaian yang sesuai standar dengan protokol kesehatan yang ada.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Saat masa pandemi Covid-19 terjadi dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja khususnya kolaborasi antar elit lokal pemerintah memiliki unsur kepemimpinan fasilitatif. Dalam kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 ini sendiri dilakukan dengan prinsip sinergitas dalam konteks kolaborasi yang baik antar Elit sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dan juga menyatukan konsensus bersama terkait pandangan dan juga tujuan agar selalu berada di jalur yang sejalan anatara satu Elit dengan Elit lokal pemerintah lainnya. Elit lokal pemerintah sendiri sudah tergabung dalam satu kesatuan instansi yang besar dan cukup terorganisir, baik dari tingkat Desa atau Kelurahan Kedungreja maupun tingkat Kecamatan Kedungreja. Kepemimpinan fasilitatif diperlukan agar koordinasi dan pembagian tugas dan wewenang dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja lebih baik. Dalam regional Desa Kedungreja, Kepemimpinan Fasilitatif sendiri di jalankan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama bapak Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja

”Untuk Kepemimpinan Fasilitatif yang menjadi pimpinan dan mengadakan fasilitas dalam sarana dan prasana Covid-19 di Desa Kedungreja itu saya. Bisa dikatakan saya yang menjadi penanggung jawab penanggulangan Covid-19 ini, baik dalam bidang pengadaan dana dari pemerintah pusat maupun bagaimana distribusinya , biasanya saya dibantu oleh mba Yani(Kaur Pelayanan) dalam hal data-data pendukung, hal itu juga tidak terlepas dari jabatan saya sebagai Kepala Desa Kedungreja, jadi memang sudah tugas negara

untuk menjadi pimpinan dalam tugas penanggulangan Covid-19. Saya lebih suka menyebutnya manajemen krisis Covid-19 karena, dengan nama itu saya lebih aware lagi akan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 ini” (wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dari apa yang disampaikan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja yaitu Desa Kedungreja memiliki Kepemimpinan Fasilitatif yang di pimpin sendiri oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja, untuk fasilitas yang diadakan maupun diberikan sendiri seperti sarana dan prasaran penunjang protokol kesehatan yang salah satunya adalah rumah singgah Covid-19 di Rumah singgah Dusun Tegalanak. Lalu distirbusi bantuan-bantuan baik dari pemerintah daerah, pusat dan desa sendiri. Lalu kewaspadaan terhadap krisis yang dapat ditimbulkan Pandemi Covid-19 khususnya ekonomi berbasis budidaya dan pertanian masyarakat. Kepimpinann Fasilitatif ini juga dirasakan oleh beberapa elit dari instansi pemerintah lain seperti Puskesmas dan Aparat Penegak hukum dalam proses penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja.

Hal ini bisa terlihat dari wawancara berikut ini dengan Eko Mulyono selaku Kepala Puskesmas atau Pimpinan Dinas Puskesmas Kedungreja sebagai berikut :

”kepemimpinan fasilitatif yang memang terasa di wilayah desa Kedungreja sendiri karena memang bapak Adi Purnawan sebagai Pemimpinannya, contohnya pada saat sidak di Pasar Mingguan bersama Satgas dari Kecamatan dan Desa Kedungreja. Bapak adi ikut turun tangan dalam menasihati para pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan. Itu membuat saya cukup kagum terhadap beliau khususnya kerendahan hatinya.” (wawancara Eko Mulyono, 8 Februari 2023)

Hal ini juga senada disampaikan oleh Darsiyem selaku pegawai puskesmas dalam bidang UKM Pengembangan dan Pelayana Puskesmas, sebagai berikut :

”Menurut saya kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedungreja sendiri sudah cukup baik, khususnya menurut saya itu tidak jarang melakukan pemantauan sekaligus vaksinasi di Puskemas Kedungreja ini bersama masyarakat lain jadi kesannya beliau ingin mencontohkan bahwa apabila vaksin aman dan

dibuktikan dengan Kepala Desanya yang vaksin di Puskesmas Kedungreja bersama-sama dengan masyarakat” (wawancara Darsiyem, 6 Februrari 2023)

Apabila dilihat dari perspektif Kapolsek Kedungreja sendiri menilai Kepemimpinan Kepala Desa Adi Purnawan cukup cakap dalam membangun sinergitas dengan wadah kolaborasi antar instansi. Hal tersebut merupakan nilai lebih yang sangat bermanfaat dan berguna disaat krisis pandemi Covid-19 ini. Hal ini seperti yang dikatakan oleh AKP Suparjo sebagai berikut:

”Perpektif saya tentang kepemimpinan bapak Adi Puranawan sebagai Lurah Kedungreja sangat baik mas, beliau dari sebelum pandemi juga cukup cakap dalam melakukan tugasnya di wilayah Desa Kedungreja khususnya saat berkolaborasi dengan Polsek Kedungreja, Anggota dari Polsek kita juga ada kan yang diminta beliau untuk membuat sebuah wadah untuk anak-anak bisa belajar bermain bola dan kebetulan anggota Polsek ada yang menyanggupi dan Lurah Adi yang meminta serta mensupport itu jadi memang pandangan saya mengenai beliau cukup baik, pada saat pandemi, kita sering dimintai beliau untuk patroli di sekitaran Desa untuk jaga-jaga kalau-kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, khususnya di sekitar pasar mingguan karena kalau malam banyak anak muda pada nongkrong disitu jadi kami tertibkan” (wawancara Suparjo, 8 Februari 2023)

Dilihat dari wawancara dengan AKP Suparjo tersebut selaku Kapolsek Kedungreja, Kepemimpinan Lurah Adi sebagai salah satu Elite dalam penanggulangan Covid-19 ini cukup baik khususnya dalam berkolaborasi untuk membangun sinergitas guna menciptakan kondisi yang ideal bagi ketertiban masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Disini juga terlihat sebelumnya Kapolsek telah memiliki perspektif yang positif terkait pandangan terhadap kepemimpinan Lurah Adi Purnawan bahkan sebelum Pandemi Covid-19 terjadi.

3. Desain Institusional

Pada saat proses terjadinya kolaborasi elit lokal pemerintah dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 tentunya memiliki unsur dimana setiap elite lokal pemerintah memiliki wadah dalam untuk melakukan musyawarah dan ikut berpartisipasi dalam merumuskan strategi tata kelola yang baik untuk menyatukan konsensus dan tujuan sehingga

penanggulangan pandemi Covid-19 di Kedungreja menjadi semakin terkelola dengan baik dan juga berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Semua Elit berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 tentunya memiliki kepentingan dan juga argumen sendiri, karena hal itu diperlukan suatu wadah yang dalam hal ini yaitu Satgas Covid-19 Desa Kedungreja yang dipimpin oleh Kepala Desa Adi Purnawan. Hal ini disampaikan oleh Adi Purwanan selaku pimpinan Satgas Covid-19 Kedungreja dan Kepala Desa Kedungreja sebagai berikut :

” Untuk musyawarah terkait Covid-19 sendiri memang saya yang memimpin khususnya untuk satgas Covid Desa Kedungreja yang terdiri dari berbagai elemen seperti aparat desa, aparat keamanan, petugas dari puskesmas dan juga lembaga-lembaga masyarakat terkait seperti Ipnu Kedungreja, banser dan lainnya, selama Covid-19 ini untuk musyawarah itu kebanyakan dilakukan dengan cara daring atau online, nah kalau mendesak dan perlu pertemuan khusus baru saya buat forum yang tatapmuka namun terbatas, sebenarnya hal ini kurang dianjurkan tapi memang apabila penting saya akan adakan, contohnya waktu awal adanya korban karena pandemi Covid-19. Saya meminta dibantu oleh kawan-kawan dari puskesmas Kedungreja dan juga minta kepada mas Syarif (Kaur Kesejahteraan) untuk dicarikan penggali kubur guna membantu petugas Puskesmas Kedungreja dalam mengurus korban Covid-19 ini. Dalam mengurus itu kita juga dibantu pihak aparat Kepolisian dari Polsek Kedungreja dalam mediasi dengan keluarga korban untuk diurus segala kebutuhan pemakamannya oleh pihak Desa dan Puskesmas Kedungreja, kami menggandeng pihak kepolisian karena ada sebagian masyarakat yang memang kekeh atau ngeyel untuk dilakukan pemakaman secara mandiri yang dimana hal itu sangat beresiko apabila dilakukan. Nah hal-hal tersebut yang kita koordinasikan, termasuk dalam masalah pendanaan juga ada koordinasinya juga ”. (wawancara Adi Purwanan, 6 Februari 2023)

Pernyataan sejenis juga disampaikan oleh Kapolsek Kedungreja AKP Suprjo dalam wawancara berikut ini :

”Untuk Kolaborasi pada saat penanggulangan Covid-19 sendiri tidak ada lembaga khusus atau Instiusional khusus, jadi kita bergerak bersama-sama dari mulai kecamatan sampai Desa bersinergi untuk kembali normal seperti semula, untuk wadahnya ya tergabung dalam satgas Covid itu yang sebenarnya anggota-anggota forkomipcam , kalau di Desa tinggal menyesuaikan dengan penangggung jawab Covid-19, biasanya Kepala Desa, Untuk Desa Kedungreja kita memang berkolaborasi khususnya pada saat pandemi itu macam-macam, seperti Patroli pada malam hari, lalu pengamanan pengurusan korban Covid-19 biar berjalan lancar, pengamanan logistik , pemantauan vaksinasi baik di Puskesmas Kedungreja maupun di Aula Desa Kedungreja, dan juga bantuan dari pemerintah dan banyak lainnya mas”. (wawancara Suparjo, 8 Februari 2023)

Selain dari pihak Aparat dalam hal ini adalah Elit Kapolsek AKP Suparjo yang bersekimpulan bahwasannya adanya koordinasi dengan pihak Forkomimpcam dan juga Desa di Kecamatan Kedungreja dalam rangka melakukan pencegahan serta penanggulangan Pandemi Covid-19 khususnya dalam sektor keamanan dan ketertiban protokol kesehatan yang ada di Kecamatan Kedungreja khususnya Desa Kedungreja, kolaborasi tersebut tentunya didapatkan dari hasil musyawarah dan koordinasi antar lembaga terkait sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan tugasnya sesuai yang di bebaskan kepada instansi tersebut dengan penuh tanggung jawab

Dari Perspektif lain dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara dengan Darrsiyem selaku Kepala UKM Pengembangan Puskesmas Kedungreja sebagai berikut :

”Untuk musyawarah waktu itu pada saat akan diadakan vaksinasi kedua di Aula Desa Kedungreja nah sebelum dilakukan itu kita musyawarah dulu dengan pihak dari Kedungreja waktu itu dengan mba Yani (Kaur Umum dan Perencanaan) kita dimintai menjari petugas di sana mendampingi Angkatan Laut dari Cilacap yang waktu itu mengadakan vaksinasi masal tersebut, musyawarahnya ya membahas jumlah dosis, lalu alur pendaftaran , tata letak dan pastinya pembagian waktu biar gak terjadi kerumunan di Aula Desa saat vaksin” (wawancara Darsiyem, 6 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh Darsiyem selaku Kepala UKM Pengembangan Puskesmas Kedungreja dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelayanan vaksinasi di Desa Kedungreja dalam melakukannya diawali dengan koordinasi dan juga musyawarah dengan utusan dari Kepala Satgas Covid-19 Kedungreja yaitu Adi Purnawan yang diwakili oleh Yani A.Md.Keb selaku Kaur Umum dan Perencanaan.

4. Proses Kolaborasi

a. Dialog Tatap Muka

Dari proses kolaborasi yang terjalin antar Elite Lokal Pemerintah yang terjadi di Desa Kedungreja dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 bisa terjadi karena adanya proses dialog yang terjadi antar elit tersebut hal ini dikarenakan proses dialog merupakan hal yang cukup penting bagi proses perencanaan, koordinasi, maupun evaluasi dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 yang ada di Desa Kedungreja, para elit ini melakukan proses dialog baik dengan cara tatap muka maupun dengan media lain seperti daring via video call maupun hanya dengan pesan text saja, hal ini dikarenakan adanya aturan yang cukup ketat mengingat pandemi Covid-19 terjadi pada saat itu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Kedungreja yang sekaligus Kepala Satgas Covid Desa Kedungreja yaitu Adi Purnawan sebagai berikut ini :

”Dalam berdialog tentunya kita lakukan dengan dua macam yaitu dialog tatap muka terbatas dan dialog via daring mas pada waktu pandemi Covid-19 jadi ya dialog dengan bapak Camat pak Priyo Sutikno, pak Kapolsek dan Pak Eko Puskesmas, sama petuugas satgas covid kaya pemuka agama biar pengurusan sesuai syariat lalu, tukang kuburnya, nah itu kan harus di koordinasikan secara tatap muka karena keterbatasan alat komunikasi jadi ya kita mau gak mau harus dialog tatap muka biar berjalan sesuai rencana, Untuk waktu awal ada korban bahkan saya membantu pengurusan jenazah, dialog dulu dengan pihak seperti puskesmas bagaimana baiknya karena kita baru pertama kali pengurusan kan, ada aparat juga lalu sebagian warga membantu dalam pengurusan jenazah seperti membuat liyang lahat seperti itu mas”. (wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dapat disimpulkan disini bahwa Adi Purnawan mengambil contoh proses kolaborasi yang dilakukan dengan dialog tatap muka terbatas dengan pihak Polsek Kedungreja dan Pihak Puskesmas khususnya dalam bentuk musyawarah terbatas yang diinisiasikan untuk koordinasi penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa Kedungreja. Dialog tersebut melibatkan pihak Kecamatan kedungreja sebagai inisiator karena merupakan pemerintah pusat yang ada di Kecamatan Kedungreja dan merupakan gerbang dari sebagian besar bantuan-bantuan yang didapatkan oleh Pemerintah Desa. Pihak lain yang juga merupakan pihak yang penting untuk diadakan dalam proses dialog tatap muka adalah pihak puskesmas Kedungreja dalam hal ini ada Kepala Puskesmas Kedungreja, dikarena perspektif penanggulangan Covid-19 dari setiap instansi pastinya akan berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan perspektif dari Puskemas adalah perspektif yang penting dalam tata kelola penanggulangan Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Eko Mulyono selaku Kepala Puskesmas Kedungreja sebagian berikut :

”Dalam berkomunikasi atau yang menurut masnya itu Dialog, kita mempunyai dua cara yang pertama dan utama ya via Whatsapps atau media online lain, yang kedua ya dengan tatap muka itu, jadi kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga urgensinya kalau memang sangat penting saya dan pak lurah biasanya langsung secara tatap muka, jadi saya yang ke kelurahan menemui beliau, pak lurah sendiri orangnya sangat terbuka untuk kerjasama-kerjasama dengan kita khususnya dalam penanganan Covid-19, seperti musyawarah tentang penerapan protokol kesehatan, sarana dan prasana bagi masyarakat yang harus isolasi mandiri, lalu distribusi vaksin. beliau juga supportif dan mengerti keadaan dan keterbatasan puskesmas karena bisa dibilang kan Puseksmas Kedungreja satu-satunya di Kecamatan Kedungreja dan harus memenuhi kebutuhan 11 Desa, harus pengertian setiap Desanya” (wawancara Eko Mulyono, 8 Februari 2023)

Seperti yang dikatakan oleh Eko Mulyono selaku Kepala Puskesmas Kedungreja bahwa dalam musyawarah ataupun koordinasi untuk menciptakan kolaborasi, dalam prosesnya menggunakan dialog tatap muka maupun secara

daring, hal tersebut dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensi persoalan yang hendak dibahas dalam dialog tersebut. Selain dengan Elit Puskesmas, proses kolaborasi juga melibatkan Elit lain seperti Elit Kepolisian dan TNI. Seperti yang disampaikan oleh AKP Suparjo Sebagai Kapolsek Kedungreja sebagian berikut :

” Untuk Komunikasi sendiri saya biasanya bertemu langsung dengan yang terkait atau bisa juga via Whatsapps. Jadi kalau pertemuan secara langsung biasanya memang yang penting-penting saja seperti apabila akan ada penyaluran vaksin, pihak kepolisian koordinasi dahulu dengan pihak Kecamatan, Desa, maupun instansi lain seperti Puskesmas. Koordinasi biasanya membahas perihal pengamanan, lalu pengawalan vaksin, dan penyalurannya biar sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, ya minimal di tempat itu stanby 1 personil yang saya perintahkan dan seringnya dibantu oleh anggota TNI lainnya. Jadi kebiasaan itu memang sudah menjadi prosedur yang ada di Kedungreja. Nah apabila Via Whatsapps biasanya kita terima apabila ada koordinasi atau musyawarah mengenai titik-titik patroli yang perlu di susuri, masing-masing Desa biasanya ada yang hubungin kita untuk titik ini di susuri karena titik itu banyak orang berkumpul. Seperti jalan Tambaksari, Perempatan Pasar Jatisari dan Pasar Mingguan , jadi kita tertibkan” (wawancara Suparjo, 8 Februari 2023)

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Kapten Inf. Tasino Selaku Danramil 12/Kedungreja sebagai berikut:

” Jadi untuk komunikasi sendiri dalam musyawarah dengan instansi lain, biasanya menggunakan WA mas, karena dari pemerintah sendiri kan membatasi pertemuan tatap muka karena untuk menekan angka Covid-19 ya sebisa mungkin memberi contoh yang baik untuk masyarakat, namun apabila musyawarahnya menyangkut hal-hal yang penting mau tidak mau harus bertemu langsung, jadi memang kondisional saja ”. (wawancara Tasino, 8 Februari 2023)

Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam prosesnya, mengingat kondisi pandemi yang merebak di Desa Kedungreja

mengakibatkan Dialog tatap muka langsung menjadi sangat terbatas dan hanya dilakukan dalam untuk hal-hal yang bersifat penting sehingga sangat kondisiona, Dialog lebih banyak dilakukan secara Daring melalui sosial media dan semacamnya.

b. Membangun Kepercayaan

Menurut Ansell dan Gash (2007) membangun kepercayaan merupakan indikator yang sangat penting munculnya proses kolaborasi antar actor terkait dalam mencapai kepentingan bersama, membangun kepercayaan yang baik tidak hanya didasari pada negosiasi kepentingan, namun didasari juga atas dasar persamaan latar belakang sosial serta persamaan perasaan dan nasib antar aktor dalam mencapai suatu tujuan. Membangun kepercayaan yang ada pada Elit Lokal Pemerintah Desa Kedungreja muncul dikarenakan pandemi yang menyebabkan krisis di masyarakat sehingga seluruh elemen Pemerintah baik kecamatan maupun desa khususnya Desa Kedungreja berkolaborasi untuk menjadi agen dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini, seluruh Elit disatukan oleh tugasnya masing-masing untuk bersama-sama berperan aktif dalam wadah Satgas Covid-19 untuk dalam mencapai tujuan hilangnya wabah Covid-19 dengan berbagai cara dan strategi yang dilakukan berdasarkan kolaborasi yang dibangun . Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kedungreja Adi Purwanan dalam wawancara berikut ini :

”Dalam konteks nya membangun kepercayaan,saya sendiri sadar mas dalam wilayah saya Desa Kedungreja saya sebagai Elit itu cukup memiliki peranan yang penting dalam menciptakan dan membangun kepercayaan tersebut, contohnya seperti memberi contoh bagaimana penerapan protokol kesehatan yang baik bagi masyarakat, lalu tidak tebang pilih dalam menindak pelanggar protokol kesehatan khususnya yang masih bandel ingin mengadakan acara-acara yang dapat membuat kerumunan, Lalu apabila anatar Elit ya bertanggung jawab atas tugas yang diemban, selaku mementingkan kepentingan bersama dan rakyat diatas kepentingan pribadi dalam penanggulangan Covid-19.” (wawancara Adi Purnawan,6 Februari 2023)

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Adi Purnawa selaku Kepala Desa Kedungreja dalam membangun kepercayaan sendiri dalam proses kolaborasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena Adi Purnawan sadar memegang peranan penting dalam kolaborasi antar instansi pemerintah khususnya Elit-elite lokal pemerintah tersebut dalam membangun kepercayaan satu sama lain sehingga kolaborasi dapat menimbulkan pandangan yang sejalan dan juga menyatukan tujuan bersama. Elit lokal pemerintah lainnya yang juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan satu sama lain adalah Eko Mulyono selaku Elit dari Puskesmas Kedungreja. Hal ini disampaikan melalui wawancara dengan beliau selaku Kepala Puskesmas Kedungreja :

” Pada masa pandemi sendiri kita puskesmas kan yang perannya cukup penting dalam penanggulangan Covid-19, jadi sebisa mungkin kita sebagai petugas ya melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, teliti dan harus diikuti dengan unggah unggah yang baik pula, apalagi saat sedang melayani masyarakat, nantinya hal itu bisa menjadi modal kita untuk membangun kepercayaan dengan instansi lain, hal seperti itu nanti pastinya terlihat menjadi track record, dan masyarakat serta instansi lain juga melihat apakah rekam jejak pelayanan puskesmas Kedungreja baik atau buruk, khususnya kesuksesan puskesmas yang dapat membuat inovasi yang menjadi salah satu strategi penanggulangan Covid-19” (wawancara Eko Mulyono, 8 Februari 2023)

Dari wawancara tersebut dapat terlihat bahwasanya Puskesmas Kedungreja dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat maupun Elit lain dalam untuk kolaborasi dalam penanggulangan Covid-19 adalah dengan mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar memunculkan citra yang baik pula di Desa Kedungreja, tentunya hal tersebut akan berdampak baik pada tingkat kepercayaan masyarakat maupun Elit lain melihat kemampuan Puskesmas Kedungreja yang berperan dalam penanggulangan Covid-19. Elite lokal pemerintah lain yang juga memiliki tanggung jawab membangun kepercayaan adalah Aparat Keamanan dalam hal ini adalah elite TNI dan elite Kepolisian Kedungreja. Hal ini terlihat dari

wawancara yang disampaikan kedua tokoh tersebut dalam wawancara berikut ini :

”Saat pandemi itu, untuk meningkatkan kepercayaan pimpinan lain dan masyarakat, kita sebagai representasi kepolisian yang ada di Desa Kedungreja bukan hanya berperan aktif saja dalam pengamanan namun juga apabila dengan para pimpinan instansi lain ya bertanggung jawab apabila diberi tugas seperti oleh Bapak Camat ataupun oleh Kepala Desa, apabila dengan masyarakat seperti membantu secara langsung masyarakat dengan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan kita, seperti kita pernah memberi bantuan beras dan sembako untuk masyarakat, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran serta kepedulian kepolisian terhadap mereka yang dapat menciptakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian”.(wawancara Suparjo, 8 Februari 2023)

Dalam wawancara tersebut AKP Suparjo mengatakan bahwa meningkatkan kepercayaan merupakan hal biasa dalam berkolaborasi dengan para pimpinan instansi lainnya karena hal tersebut merupakan suatu indeks yang penting dalam menyatukan pandangan atau konsesus yaitu mensukseskan penanggulangan pandemi bersama-sama. Hal serupa di juga di sampaikan oleh Kapten Inf. Tasino sebagai representasi Elit TNI di Desa Kedungreja yaitu sebagai berikut :

”Untuk sesama instansi pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan, paling penting menurut saya itu komunikasi yang baik, jadi nanti tugas apapun yang diberikan rekan kita baik Bapak Camat atau Bapak Kepala Desa itu bisa disampaikan dengan baik dan jelas, Khususnya pada masa Covid-19 itu komunikasi itu jadi penting karena memang keterbatasan komunikasi yang kita punya jadi kualitas komunikasi menentukan kualitas kolaborasi dalam bertugas menangani pandemi covid pada saat itu” (wawancara Tasino , 8 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan tokoh-tokoh Elit tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya tugas komitmen dalam bertugas dan komunikasi yang baik adalah sebagian besar alasan untuk meningkatkan kepercayaan dalam berkolaborasi antar Elit di Desa Kedungreja khususnya Elit Lokal Pemerintah Desa Kedungreja.

c. Komitmen terhadap proses

Dalam proses Kolaborasi tata kelola penanggulangan Covid-19 oleh Elit Lokal Pemerintah Kedungreja tentunya elit-elit tersebut harus memiliki komitmen yang kuat dan teguh terhadap tugas dan tanggungjawab yang telah diemban. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ansell dan Gash(2007) dimana Komitmen terhadap proses merupakan hal penting agar menciptakan keputusan yang tepat sasaran, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan juga keputusan yang dihasilkan memiliki nilai yang berkualitas. Hal ini juga yang kurang lebih ada dalam kolaborasi di lingkaran Elit Lokal Pemerintah Kedungreja dimana, Kepala Desa, Aparat Keamanan dan juga Kepala Puskesmas tidak hentinya-hentinya berkomitmen terhadap tugas yang masing-masing diemban dan juga bertanggung jawab penuh tugas tersebut, seperti contohnya Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja tanpa disadari selalu berkomitmen terhadap proses hal ini dapat terlihat dari komitmen beliau untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan juga terus mengkoordinasikan tim penanggulangan Covid-19 untuk terus melakukan tugas-tugas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja. Hal ini disampaikan sendiri melalui wawancara dengan Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja:

”Adanya Satgas Covid-19 kecil-kecilan yang saya bentuk saya optimis mas suatu hari nanti pasti Covid-19 bisa hilang di Indonesia khususnya Desa Kedungreja karena, progres pemerintah dalam menanggulangi juga cepat dan tanggap jadi untuk di Desanya ya tinggal menunggu giliran saja agar sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam membantu satgas covid-19 Desa Kedungreja dapat terpenuhi”
(wawancara Adi Purnawan, 8 Februari 2023)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya optimisme terkait apa yang dilakukan pemerintah desa Kedungreja dalam hal ini yang dipimpin oleh Adi Purnawan selaku kepala desa dan juga ketua satgas Covid-19 Kedungreja, komitmen tersebut secara tidak sadar dilakukan dengan konsisten oleh Adi Purnawan dalam tugas Penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja. Selain itu komitmen yang sama juga terlihat saat wawancara dengan Kepala Puskesmas Kedungreja yaitu Eko Mulyono. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut ini :

”Untuk masalah komitmen itu biasa saja mas, kita berkomitmen dengan tujuan menjalankan tugas sebagai Satgas Covid-19 jadi mau tidak mau berkorban segala cara agar dapat terus melayani masyarakat yang menjadi korban, itu kan tugas kita, kita tidak mengharapkan apresiasi dari siapapun yang penting bertanggung jawab dengan tugas yang kita emban” (wawancara Eko Mulyono, 8 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh Eko Mulyono selaku Elit Puskemas dimana komitmen dalam proses muncul ketika masing-masing instansi paham akan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam berkolaborasi dan melayani masyarakat. Perspektif mengenai Komitmen terhadap proses juga hadir pada Elit lain seperti Kapolsek Kedungreja. Hal ini disampaikan pada wawancara dengan AKP Suparjo berikut ini :

”Komitmen jelas menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan tugas di Kepolisian mas, hal itu sudah menjadi bagian dari pihak kepolisian bahkan dari sebelum masa pandemi, jadi pada saat diberi tugas di Satgas Covid-19, sudah jelas kami berkomitmen penuh terhadap tugas yang kami jalankan apapun hasilnya” (wawancara Suparjo, 8 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh AKP Suparjo dalam wawancara tersebut bahwa menjalankan tugas dengan komitmen penuh merupakan hal yang biasa dalam Kepolisian. Pandangan yang serupa juga hadir pada Kapten Inf. Tasino sebagai berikut :

”Dalam bertugas tentunya komitmen sangat penting menurut kami karena komitmen juga yang menjadikan Satgas Covid bisa dengan Penuh menjalankan tugas kemanusiaan di Desa Kedungreja. Khususnya pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya mas. Meskipun tetap ada kekhawatiran terhadap virus tersebut tapi komitmen terhadap tugas lebih besar dari kekhawatiran tersebut” (wawancara Tasino, 8 Februari 2022)

d. Berbagi Pemahaman

Pada kolaborasi tata kelola pandemi Covid-19 di Indonesia berbagi pemahaman tentang cara kerja serta tujuan dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja, dalam wadah Satgas Covid Desa Kedungreja sendiri tidak ada Visi dan Misi yang dibuat khusus untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 karena keanggotaannya merupakan bagian dari Satgas Covid Kecamatan, namun tetap berpegang teguh pada Visi melakukan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Desa Kedungreja, sehingga hal itulah yang dijadikan modal untuk tetap berperan aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Kedungreja. Namun tetap tujuannya adalah untuk meminimalisir dan juga menghilangkan virus Covi-19 di Indonesia . Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan Selaku Kepala Desa dan Ketua Satgas Covid-19 Desa Kedungreja sebagai berikut :

”Dalam pembentukan Satgas Covid Desa itu tidak ada Visi dan Misi khusus mas, yang ada memang kita berpangku pada tugas sebagai bagian dari Satgas Covid-19 Kecamatan Kedungreja jadi, perintah dari pusat biasanya kita lakukan, meskipun ada sebagian yang memang improvisasi dari Kelurahan sendiri untuk aktif berperan dalam penanggulangan Covid-19 semata-mata ingin melayani masyarakat saja” (wawancara Adi Purnawan ,6 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Adi Purnawan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam berbagi pemahaman dan juga konsesus bersama tidak ada visi dan misi khusus yang dibentuk pada konteks regional Satgas Desa Kedungreja karena Satgas ini merupakan bagian dari Satgas Kecamatan sehingga sebagian besar kebijakan mengikuti konsep dari pemerintahan kecamatan dan pusat.

Elite lain yang juga memberikan keterangan terkait berbagi pemahaman adalah Eko Mulyono selaku Kepala Puskesmas sebagai berikut :

”Kalau dalam bentuk Visi dan Misi sendiri kami berpegang pada Visi dan Misi Puskesmas Kedungreja dan Dinas Kesehatan Cilacap, jadi untuk Satgas sendiri memang tidak ada visi dan misi khusus yang diberikan namun sebisa mungkin kita turut andil dengan persepsi kita sebagai petugas kesehatan yang ada di desa sebagai pertimbangan untuk penanganan covid-19” (wawancara Eko Mulyono, 8 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan Eko Mulyono selaku Kepala Puskesmas Kedungreja tersebut berpegang teguh terhadap visi dan misi Puskesmas Kedungreja dan Dinas Kesehatan Cilacap, karena tidak ada visi dan misi khusus dalam pembentukan satgas covid-19 kedungreja sehingga, Elite Puskesmas memberikan pandangan mengenai penanggulangan pandemi Covid-19 sebagai pertimbangan. Aktor dan Elit lain yang juga penting persepsi untuk dijadikan pertimbangan adalah Kapolsek dan Danramil Kedungreja sebagai satuan keamanan di wilayah Desa Kedungreja yang juga berperan aktif dalam membantu penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal ini salah satunya disampaikan oleh AKP Suparjo selaku Kapolsek Kedungreja :

” Karena kepolisian lebih condong untuk menjaga keamanan ya mas, jadi kita memberikan masukan-masukan dan pandangan mengenai bagaimana alur pengamanan yang baik pada masa pandemi, seberapa ketat harus dilakukan pengamanan khususnya protokol kesehatan, operasi-operasi keamanan dan ketertiban yang dilakukan seperti itu” (wawancara Suparjo, 8 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan pada wawancara tersebut oleh AKP Suparjo bagaimana Kepolisian lebih berbagi pemahaman mengenai bidang keamanan dan juga operasi-operasi protokol kesehatan yang hendak dilakukan sehingga dapat dipertimbangkan oleh pemerintah desa Kedungreja.

e. Hasil Sementara

Dalam kaitannya dengan tata kelola penanggulangan Covid-19 yaitu kolaborasi Elit Lokal pemerintah Desa, Kolaborasi yang terjadi dalam sistem Satgas Covid-19 Kedungreja awal-awalnya memperoleh hasil yang cukup

terlihat khususnya dengan di terapkannya protokol kesehatan yang cukup ketat oleh Satgas Covid-19 Kedungreja yang selalu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga jarak, memakai masker dan juga tidak membuat kerumunan yang berlebihan. Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja yaitu sebagai berikut :

”Untuk hasilnya pastinya butuh waktu agar masyarakat dapat membiasakan diri dengan protokol kesehatan, , karena pada saat itu awal antara november dan desember 2020 kalau tidak salah Satgas langsung dibentuk lalu kita langsung bergerak untuk penerapan protokol kesehatan, dan hasilnya cukup efektif, menurut saya hal ini juga disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat juga akan terkena virus Covid-19 khususnya masyarakat yang memang sehari-harinya yang bekerja dan bertemu dengan orang banyak” (wawancara Adi Purnawan,6 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh Adi Purnawan dalam wawancara tersebut bahwa hasil atau outcomes sementara yang terjadi akibat dijalankannya protokol kesehatan di Kedungreja adalah yaitu kerumunan yang cukup berkurang dan juga ketertiban dalam menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak, lalu memakai masker yang cukup efektif terjadi. Elit lain yang juga menyampaikan pendapatnya mengenai hasil dari Protokol kesehatan yang diterapkan adalah Eko Mulyono selaku Kepala Puskesmas Kedungreja. Hal ini disampaikan pada wawancara berikut ini :

”Penerapan protokol kesehatan pastinya setiap daerah tidak sama nggih mas efektifitasnya, kalau untuk Desa Kedungreja sendiri itu termasuk yang normal, jadi tidak terlalu progresif juga hasilnya, hal ini dikarenakan memang pemahaman masyarakat desa terkait Covid-19 yang tidak sebaik masyarakat kota”. (wawancara Eko Mulyono, 8 Februari 2023)

Dari wawancara bersama dengan Kepala Puskesmas Eko Mulyono tersebut dapat disimpulkan bahwa memang pemahaman terkait Protokol

Kesehatan pada masyarakat Desa Kedungreja masih terbatas hal ini mengakibatkan efektifitas penanggulangan Covid-19 hanya pada tahap normal saja.

Pernyataan yang serupa juga di sampaikan oleh AKP Suparjo mengenai hasil yang tampak dari penerapan protokol kesehatan pada masa awal Covid-19. Hal ini disampaikan oleh AKP Suparjo selaku Kapolsek Kedungreja dalam wawancara berikut ini :

”Karena protokol kesehatan kan sifatnya bertahap ya mas jadi tidak bisa langsung di ketatkan begitu saja, apalagi untuk masyarakat desa yang memang sistemnya rata-rata masih tradisional, jadi berbagi pemahaman pun harus secara manual dan secara pelan-pelan”
(wawancara Suparjo , 8 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh AKP Suparjo bahwa memang pemahaman yang terbatas dari masyarakat mengakibatkan efektifitas protokol kesehatan juga menjadi tidak maksimal.

B. Elite Lokal Non-Pemerintah

Kolaborasi elit lokal non-pemerintah dalam tata kelola pandemi Covid-19 ini merupakan hal yang cukup penting dilakukan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 karena memiliki massa yang dapat digerakan untuk membantu pemerintah desa Kedungreja dalam pengoptimalan penanggulangan Covid-19 khususnya dalam hal protokol kesehatan. Elit lokal non-pemerintah di Desa Kedungreja sebagai merupakan jenis yang memiliki sifat Elite scara eksternal yaitu yang bersifat homogen, bersatu, memiliki kesadaran dan Elite self perpetuatung yaitu elite yang memiliki lapisan yang terbastan dan juga eksklusfi sehingga hanya kalangan istimewa saja yang menempati posisi tertinggi (Putnam,1985). Dalam Masa Covid-19 elite lokal non-pemerintah bersama dengan pemerintah melakukan kolaborasi dalam segala bidang. Kolaborasi dilakukan agar dapat mempermudah refokusing target masa dalam misi penangggulanngan Covid-19 yang ada di Desa Kedungreja. Dalam menjelaskan kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan elit lokal non-pemerintah Kedungreja perlu dijelaskan dengan indikator dari teori Collaborative Governance sebagian berikut :

1. Kondisi Awal

Tata kelola penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja, dari awal tidak terlepas dari peran elite non-pemerintah yang juga membantu dalam penanggulangan pandemi Covid-19, baik dalam hal distribusi informasi, edukasi terhadap basis masa, maupun pencegahan seperti penerapan protokol kesehatan, penyemprotan disinfektasi, dan pemulihan seperti vaksinasi. Hal-hal tersebut tentunya bisa dilakukan apabila ada koordinasi yang baik dan pemahaman dasar yang cukup agar setiap elit non-pemerintah dapat mencerna kebijakan apa yang dapat dilakukan agar dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan tugasnya sebagai Satgas Covid-19. Kesadaran masing-masing elit non-pemerintah akan pentingnya patuh terhadap pemerintah desa juga akan membuat tugas Satgas Covid-19 Desa Kedungreja semakin terbantu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Kedungreja Adi Purnawan dalam wawancara berikut ini :

"Dari pandangan saya memang saat awal-awal Covid-19 masuk di Kedungreja itu, di seluruh lapisan masyarakat itu timbul kebingungan-kebingungan, cukup lama masyarakat bingung namun lambat-laun masyarakat mulai mengerti, khususnya pada saat saya shalat jumat di masjid Darunajah Kedungbakung, sekitar dua sampai tiga minggu semenjak kasus covid-19 pertama di Kedungreja, penceramahny juga memberikan sedikit edukasi atas kewaspadaan terhadap virus tersebut dalam pemahaman dasar dan saya rasa pemerintah cukup terbantu dalam hal tersebut".(wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dalam wawancara yang disampaikan oleh Adi Purnawan tersebut mengindikasikan bahwa dalam kalangan pemuka agama di Dusun Kedungbakun Desa Kedungreja sendiri sudah memberikan pemahaman terkait virus tersebut meskipun dalam konteks pemahaman dasar di ceramah yang dibawakan oleh tokoh agama setempat. Adapun dari KH. Ahmad Shodiqin selaku pemuka agama juga menyampaikan hal berikut ini :

"Untuk awal-awal karena memang desa nggih mas jadi kasus Covid-19 di Kedungreja pertama ceritanya memang menyebar cepat, apalagi tempat warga yang pertama covid itu berbatasan langsung dengan rumah saya dan hanya dipisahin sawah, kepanikan pasti ada, tapi yang bisa kita lakukan edukasi masyarakat sekitar saja agar waspada" (wawancara Ahmad Shodiqin, 15 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan KH Ahmad Shodiqin tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awal-awal Covid-19 KH Ahmad Shodiqin memberikan edukasi dasar mengenai kewaspadaan. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari menjaga kelompok daerahnya agar tidak terjangkau oleh wabah virus Covid-19. Disisi lain edukasi dasar akan kewaspadaan terhadap virus Covid-19 memang didapat dari diskusi-diskusi yang terjadi di antara warga. Hal ini disampaikan oleh Sarno selaku masyarakat Desa Kedungreja sebagai berikut :

”Pada saat dengar Corona masuk ke Kedungreja jelas bingung campur panik sedikit mas, karena yang awalnya saya gak percaya karena sampai masuk ke Kedungreja jadi percaya, kita sebagai warga jadi lebih waspada kalau keluar rumah biar tidak terkena virusnya” (wawancara Sarno. 13 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Sarno tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kasus Covid-19 pertama kali di Desa Kedungreja cukup membuat masyarakat Desa Kedungreja menjadi lebih waspada akan terjangkit virus Covid-19 tersebut, disisi lain pejabat setempat juga mulai memberikan edukasi-edukasi singkat dalam pertemuannya dengan masyarakat untuk menyampaikan kewaspadaan terhadap Covid-19 di Kedungreja. Hal ini disampaikan oleh selaku anggota legislatif Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

“Saya sendiri saat awal-awal Covid-19 sudah menyampaikan kepada masyarakat agar waspada terkait virus ini, namun karena belum mengetahui persis apa akibat virus ini jadi hanya sekedar menyampaikan kewaspadaan saja, kalau tidak salah saya menyampaikan tersebut di acara NU Kedungreja sebagai tamu undangan” (wawancara Rusmanto, 25 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Rusmanto tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai pejabat setempat, meskipun tidak terikat langsung dengan pemerintah Desa Kedungreja, namun tetap berinisiatif memberikan edukasi dasar mengenai wabah virus Corona yang pada awalnya belum dipahami secara keseluruhan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam kolaborasi tata kelola pandemi Covid-19, Elit lokal non-pemerintah pastinya memiliki model kegiatan yang biasanya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di daerahnya. Kegiatan dapat terlaksana apabila ada dukungan dari pemerintah setempat terkait fasilitas baik materil maupun non-materil sehingga menimbulkan rasa dihargai. Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing Elit lokal pada masa pandemi tentunya membutuhkan izin dari pemimpin yang menjadi pusat dari kegiatan penanggulangan

pandemi Covid-19. Pemimpin tersenut yaitu Adi Purnawan selaku Pimpinan Satgas Covid-19 Kedungreja tentunya akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dalam penanganan Covid-19 baik itu hal edukasi, maupun fasilitasi bantuan bagi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan dalam wawancara berikut ini sebagai Kepala Desa dan Pimpinan Satgas Covid-19 Kedungreja :

"Saya sendiri sebagai pimpinan Satgas Kedungreja mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dapat membantu memberikan pemahaman terkait Covid-19 maupun pengadaan bantuan-bantuan yang diadakan oleh ormas-ormas, namun tetap saya tekankan kepada mereka protok kesehatan wajib dan harus dipatuhi. Karena bagaimanapun apabila jika terjadi kerumunan juga kurang elok dan baik mas". (wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan Adi Purnawan yaitu dapat disimpulkan bahwan, Adi Purnawan sangat mendukung program dan kegiatan organisasi atau ormas yang memiliki intensi dapat membantu pemerintah desa Kedungreja dalam penanggulangan Covid-19 namun tetap harus dalam konteks patuh terhadap protokol kesehatan. Elit lain yang juga mengadakan kegiatan yang menyangkut tentang penanggulangan pandemi Covid-19 adalah NU Ranting Kedungreja yang disini akan diwakilkan oleh KH. Ahmad Shodiqin sebagai salah satu pengurusnya. Hal ini disampaikan KH Ahmad Shodiqin dalam wawancara berikut ini :

"Salah satu yang kami lakukan itu kegiatan serbu vaksinasi mas, itu kami lakukan buat mendukung saja program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 di Kedungreja. Selain itu kita niatkan jihad juga sebagai bagian dari kemanusiaan".(wawancara Ahmad Shodiqin, 15 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh KH. Ahmad Shodiqin selaku pengurus NU Ranting Kedungreja bahwa pelaksanaan Serbu Vaksinasi yang menyuaras masyarakat NU dan santri tersebut dilakukan atas persetujuan dari Satgas Covid-19 Kedungreja dan didukung penun oleh pemerintah Desa Kedungreja. Dalam kalangan pemuda sendiri organisasi Generasi Berencana atau GenRe Kedungreja yang di pimpin oleh Ady Gunantoro pernah mengadakan kegiatan diskusi secara daring mengenai penanggulangan wabah Covid-19. Hal ini disampaikan Ady Gunantoro dalam wawancara sebagai berikut :

"Kami sendiri pernah ada satu proker yang memang proker tersbut khusus untuk diskusi mengenai bagaimana peran pemuda dalam penanggulangan

Covid-19. Waktu itu kita menghadirkan petugas puskesmas Kedungreja sebagai pembicara dan narasumber, diskusi itu sendiri kita lakukan secara daring mas. Jadi memang tidak memerlukan protokol kesehatan yang ketat.”
(wawancara Ady Gunantoro, 20 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Pemimpin GenRe Kedungreja Ady Gunantoro tersebut dapat disimpulkan bahwa formasi anak muda yang ada di Kedungreja juga memiliki kesadaran untuk berbagi informasi mengenai bahasa virus Covid-19. Hal ini juga tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah Desa Kedungreja dalam. Selain GenRe, Organisasi lain yang juga aktif dalam penanggulangan Covid-19 adalah Pemuda Pancasila. Hal ini disampaikan oleh Komandan Pemuda Pancasila Kedungreja Distiyo Prayogo

”Pemuda Pancasila sendiri di Kedungreja cukup aktif membantu dalam penegakan protokol kesehatan mas, namun kami memang gak berani untuk menindak sendiri, biasanya kami diminta oleh Bapak Tasino (Danramil Kedungreja) dan AKP Agung untuk kerjasama dalam penindakan, selain kami biasanya ada Kokam jug ada banser juga jadi banyak” (wawancara Distiyo Prayogo. 21 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Distiyo Prayogo selaku komandan Pemuda Pancasila tersebut dapat disimpulkan bahwasaya hadirnya kepemimpinan kolaboratif dan fasilitatif oleh Satgas Covid-19 setempat untuk mengajak Elit non-pemerintah dalam penanggulangan Covid-19

3. Desain Istitusional

Dalam tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19 Desa Kedungreja sendiri tentunya ada kolaborasi terkait musyarah yang terjadi diantara elit, baik elit pemerintah maupun elit non-pemerintah. Dalam musyawrah dengan elit non-pemerintah, biasanya elit non-pemerintah dimintai pendapat dan pandangan terkait sudut pandangnya dan terkait background organisasi dari elit tersebut. Elit yang berkolaborasi dengan pemerintah Desa dalam musyawrah yang terjadi baik formal maupun normal dimintai bantuan sebagai agen pembantu pemerintah, baik dalam hal Edukasi, Penegakan, maupun pengawasan untuk penanggulangan Covid-19 di Kedungreja. Dalam pelaksanaannya Musyawrah seringkali dilakukan dengan secara daring dikarenakan pandemi Covid-19 yang ada di Desa Kedungreja. Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa dan Kepala Satgas Covid-19 Kedungreja.

”Kalau untuk musyawarah dengan yang non-pemerinta itu biasanya kita japri via WA atau kita bikin undangan untuk pimpinannya, jadi tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan, biasanya untuk ormas sedniri kita melakukan musyawarah dengan Kokam, Pemuda Pancasila, Karangtaruna, maupun Banser, tapi kalau untuk Ulama atau yang sepuh kan tidak dimungkinkan untuk via daring jadi memang kami pernah mengadakannya secara offline namun tetap mentaati protokol kesehatan yang ada”. (wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dalam wawancara tersebut dengan Adi Purnwan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar muswaraah yang dilakukan dengan instansi non-pemerintah, dilakukan dengan media daring, hal ini dikarenakan untuk mentaati protokol kesehatan yang ada namun tetap ada penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang ada, contohnya apabila mengadakan musyawrah dengan para tokoh agama desa untuk distribusi informasi terkait kerumanan, efektifnya dilakukan dengan offline karena tidak semua tokoh agama mengerti akan teknologi komunikasi yang ada. Hal ini disampaikan oleh KH. Ahmad Shodiqin dalam wawancara berikut ini:

”Saya sendiri pernah diundang sama Desa untuk musyawarah terkait pembatsan kegiatan di Rumah Ibadah yang ada di Kedungreja. Dan hal tersebut sangat kita maklumi karena memang itu adalah ikhtiar pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19, namun tetap pro dan kontra nya terjadi di kalangan masyarakat sendiri” (wawancara Ahmad Shodiqin, 15 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan KH. Ahmad Shodiqin tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kedungreja cukup aktif dalam memberikan pemahaman dengan musyawarah terkait penanggulangan Covid-19 di rumah-rumah ibadah yang ada di Kedungreja, hal ini mengingatkan karena rumah ibadah seperti Mushola, Masjid dan Gereja-gereja yang ada di Kedungreja. Metode musyarah sendiri juga dilakukan dalam pengkoodisian protokol kesehatan yang ada di masyarakat, organisasi seperti Kokam, Banser, dan Pemuda Pancasila juga turut ikuut andil dalam kolaborasi pengkondisian tersebut. Hal ini disampaikan oleh Distiyo Prayogo selaku Komandan Pemuda Pancasila Kedungreja sebagai berikut :

”untuk musyarah dengan desa Kedungreja sendiri kita jarang mas, kalau yang sering memang dengan kecamatan karena kita basisnya untuk kecamatan, tapi memang pernah musyawarah dengan pemdes Kedungreja kita diundang sebagai perwakilan pemuda untuk ikut aktif dalam penegakan protokol kesehatan, jadi kalau ada penegakan protokol kesehatan, pihak dari desa, puskesmas atau aparat itu ada yang menghubungi kita untuk ikut terjun langsung disana”(wawancara Distiyo Prayogo,21 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan Komandan Pemuda Pancasila Kedungreja yaitu Distiyo Prayogo, bahwa pihak Pemuda Pancasila dalam musyarah dengan Pemerintah Desa Kedungreja banyak diminta untuk ikut terjun langsung dalam penegakan protokol kesehatan di masyarakat hal ini mengindikasikan Satgas Covid-19 yang dikepalai oleh Kepala Desa Kedungreja ingin dalam penegakan Covid-19 ada peran dari elemen pemuda Kedungreja untuk memberi contoh baik kepada pemuda-pemuda lainnya. Elemen organisasi lain yang juga pernah melakukan diskusi serta musyawarah dengan Adi Purnawan selaku Kepala Satgas Covid-19 Kedungreja dan Kepala Desa Kedungreja. Hal ini disampaikan oleh Ady Gunantoro selaku Ketua GenRe Kedungreja :

”pernah memang kita ke Desa untuk minta ijin bagi-bagi takjir, pada saat itu Covid-19 jadi memang harus ijin dulu ke Pak Adi karena beliau kan ketua Satgas Covid-19 Kedungreja, kita juga Diskusi serta musyawarah-musyawah sedikit dengan beliau terkait program GenRe ini” (wawancara Ady Gunantoro ,20 Februari 2023)

4. Proses Kolaborasi

b. Dialog Tatap Muka

Dalam proses kolaborasi antara elit desa baik pemerintah dan non-pemerintah dalam wadah Satgas Covid-19 di Desa Kedungreja dilakukan dengan cara offline yaitu tatap muka maupun secara daring yaitu dengan media berbasis teknologi sosial media. Kedua proses tersebut merupakan dua metode yang dilakukan dalam membangun kolaborasi antar elit maupun anggota Satgas Covid-19. Keduanya dilakukan dengan konteks kondisi dan urgensi yang berbeda-beda,karena dalam Dialog tatapmuka akan sangat beresiko dilakukan pada masa-masa pandemi Covid-19 meskipun protokol kesehatan telah dilakukan dengan ketat, oleh karen itu sebagai koordinasi, dialog,

maupun komunikasi yang dilakukan menggunakan media teknologi berbasis daring karena selain mudah dan praktis juga hal ini sesuai dengan prinsip Satgas Covid-19 Kedungreja yaitu tidak terlalu membuat Kerumunan. Ketua Satgas Covid-19 Kedungreja sendiri tidak melarang dilakukannya dialog tatap muka, namun harus dengan protokol kesehatan yang ketat, dan juga kondisi yang harus kondusif. Komunikasi Kolaborasi berbasis tatap muka sendiri di Desa Kedungreja biasanya dilakukan untuk melakukan pembekalan dan edukasi bagi tokoh-tokoh masyarakat yang memang belum tersentuh dan belum memahami teknologi dan informasi yang berkembang. Hal ini sendiri disampaikan oleh Adi Purnawan selaku kepala desa dan juga ketua Satgas Covid-19 di Kedungreja sebagai berikut :

”apabila dengan yang non-pemerintah dialog saya lakukan biasanya untuk mengumpulkan tokoh-tokoh yang memang bukan dari kalangan muda lagi, seperti tokoh RT dan RW, lalu tokoh-tokoh agama. Karena sebagian besar dari mereka tidak tersentuh teknologi jadi memang harus diadakan, Kalau untuk ormas kalau bisa via japri whatsapp saja tapi kalau memang mendesak atau mereka ingin mengadakan bantuan-bantuan sosial ke masyarakat misalnya , biasanya mereka yang menemui saya untuk minta izin secara langsung, namun harus dan wajib tetap mentaati protokol kesehatan yang ada”(wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan Adi Purnawan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Dialog tatap muka dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak dimungkinkan secara daring, hal ini juga untuk mempertegas bahwa Satgas Covid-19 di bawah pimpinan Adi Purnawan dengan tetap konsisten selalu mentaati aturan protokol kesehatan yang ada. Hal ini juga disampaikan oleh KH.Ahmad Shodiqin dimana Adi Purnawan selaku pernah mengundang tokoh agama untuk melakukan musyawarah di Kantor Desa Kedungreja secara tatap muka :

”kyai maupun ulama seperti saya. pernah diundang untuk menyampaikan pemahaman mengenai bahaya pandemi dan pembatasan sosial di lingkungan masjid dan mushola, itu dilakukan secara tatap muka memang mas, karena hampir sebagian tidak terlalu

paham alat-alat jaman sekarang jadi memang mungkin efektifnya begitu.selain itu waktus NU Ranting Kedungreja ingin mengadakan Serbu Vaskin kita juga mengutus beberapa santri untuk meminta izin mengadakan acara tersebut dan Pak Adi menurut saya orangnya sangat mendukung”.(wawancara Ahmad Shodiqin, 15 Februari)

Dalam wawancara dengan KH.Ahmad Shodiqin selaku salah satu pengurus NU Ranting Kedungreja tersebut dapat disimpulkan bahwa pertemuan tatap muka dilakuakn dengan kondisi dan situasi tertentu, dan memberi izin untuk kegiatan yang membantu dalam penanggulangan Covid-19 di Kedungreja, seperti yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Kedungreja dalam berkolaborasi dengan pemerintah desa kedungreja yaitu melakukan kegiatan pembagian sembako, perwakilan PP Kedungreja meminta izin terlebih dahulu terhadap pemerintah desa Kedungreja secara langsung. Hal ini disampaikan oleh Distiyo Prayogo dalam wawancara berikut ini :

”untuk dialog dengan pemerintah desa sendiri kita cukup sering ya mas, karena juga pak Adi mantan anggota PP jadi kita sering dimintai bantuan untuk ikut kolaborasi dengan intansi pemerintah dalam penegakan Covid-19, selain itu apabila ada izin-izin seperti saat kita ingin mengadakan pembagian semabako bagi warga yang terdampak Covid-19. Kita tetap harus izin dulu untuk meminta masukan terkait protokol kesehatan dan data-data warga yang berhak menerima bantuan”(wawancara Distiyo Prayogo,21 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Distiyo Prayogo selaku Komandan Pemuda Pancasila, di dalam kolaborasi penanggulangan Covid-19 tetap dilakukan dialog tatap muka secara terbatas dan harus dengan protool kesehatan yang telah disepakati bersama.

c. Membangun Kepercayaan

Dalam proses kolaborasi tata kelola penanggulangan Covid-19 di Kedungreja khususnya mengenai elit lokal baik pemerintah maupun non-pemerintah tentunya diperlukan kepercayaan antar elite tersebut guna melancarkan kolaborasi yang ada. Namun membangun kepercayaan antar elite sama saja mempersatkan ego masing-masing pemimpin dengan latar belakang

yang berbeda sehingga tidak mudah untuk dilakukan dan apabila mudah akan memakan waktu yang cukup lama. Harus ada hal yang dapat menyatukan masing-masing elit tersebut sehingga menjadikan satu kesatuan atau memanfaatkan perbedaan dengan memanfaatkan masing-masing kemampuan Elit sehingga cocok di tugas yang akan diemban. Pemerintah Desa merupakan instansi yang juga merupakan bagian penting dari Satgas Covid-19 di Kedungreja, oleh karenanya memanfaatkan masing-masing kemampuan elit dari latarbelakang berbeda untuk dijadikan hal positif dalam penanggulangan Covid-19 merupakan tantangan tersendiri, khususnya tantangan mengenai adat dan tradisi yang berkembang. Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa dan Ketua Satgas Covid-19 Kedungreja dalam wawancara berikut ini :

”kalau masalah itu saya sebagai pimpinan hanya melakukan yang terbaik saja mas, jadi melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga komunikasi yang baik dengan tokoh lain dan yang paling penting juga harus rendah hati jadi biar kita dengan yang lain, biar masyarakat ini merasa dekat dengan kita, jadi nanti apabila diajak kerjasama pun gampang” (wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Adi Purnawan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membangun kepercayaan sabagai pemimpin harus memiliki sifat yang rendah hati, dan merakyat, karena secara umum masyarakat menyukai pemimpin yang merakyat dan dekat dengan masyarakat sehingga mudah diajak berdiskusi yang nantinya akan membangun kepercayaan diantara masyarakat. Apabila melihat perspektif lain hal ini berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh Ady Gunantoro selaku ketua GenRe yang notabennya adalah organisasi Remaja dalam wawancara berikut ini :

” dari kita sendiri untuk membangun kepercayaan tentunya dengan prestasi-prestasi yang sekarang masih GenRe sendiri perjuangkan, kita sendiri ingin membuktikandapat mengambil peran lebih di masyarakat khususnya di dalam kehidupan remaja-remaha di Desa Kedungreja, waktu saya diskusi dengan Pak Adi, beliau cukup baik responnya dan mendukung penuh apa yang kita lakukan khususnya

dalam membantu penanganan dan pemulihan Covid-19”(wawancara Ady Gunantoro, 20 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh Ady Gunantoro selaku Ketua GenRe kedungreja bahwa GenRe Kedungreja yang notabennya ada kelompok atau organisasi remaja, cukup didukung penuh oleh Adi Purnawan selaku kepala desa Kedungreja, khususnya dalam hal edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk pemulihan pasca pandemi, hal inilah yang dapat membangun kepercayaan antara pemerintah desa dengan perwakilan remaja di Desa Kedungrej. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Distiyo Prayogo selaku Komandan Pemuda Pancasila sebagai berikut :

” Dasarnya memang kita sudah dekat mas dengan pak Adi, jadi untuk kepercayaan sendiri kita memang sudah terbangun dari awal pak Adi menjabat menjadi Kepala Desa. Dalam penanganan Covid-19 sendiri kita juga sering dipercaya membantu beliau, aparat dan isntansi lainnya untuk ikut serta dalam penegakan protokol kesehatan, jadi untuk membangun kepercayaan kita tidak ada masalah dengan beliau”(wawancara Distiyo Prayogo,21 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Distiyo Prayogo tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemuda Pancasila dari awal sudah ada kedekatan karena Pak Adi Purnawan sendiri adalah bagian dari Anggota Pemuda Pancasila Kedungreja, karena itu untuk membangun kepercayaan sendrii dalam penanggulangan Covid-19 tidak terlalu sulit karena sudah memiliki kepercayaan satu sama lain antar Elit tersebut. Dari pandangan lain yaitu tokoh ulama dalam hal ini adalah KH.Ahmad Shodiqin juga menyampaikan padangannya dalam wawancara berikut ini :

”Dengan Pak Adi sendiri tidak ada masalah sama sekali, karena saya sendiri cukup dekat dengan keluarga beliau khususnya bapaknya yaitu Haji Aan” (wawancara Ahmad Shodiqin, 15 Februari 2023)

Dari wawancara dengan KH. Ahmad Shodiqin tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat kedekatan kekerabatan antar KH.Ahmad Shodiqin dengan H.Aan selaku ayah dari Adi Purnawan Kepala Desa Kedungreja, hal tersebut membangun kepercayaan yang cukup dalam

kepemimpinan Adi Purnawan sebagai Kepala Desa dan Pimpinan Satgas Covid-19 Kedungreja.

d. Komitmen Terhadap Proses

Satgas Covid-19 Kedungreja dalam menjalankan tugas tentunya dilakukan dengan komitmen penuh dan disertai dengan kepercayaan bahwa Covid-19 di Kedungreja nantinya akan hilang sepenuhnya. Hal ini merupakan komitmen terhadap proses yang dijalani dimana tata kelola dalam penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kedungreja untuk hasil yang baik kedepannya. Kolaborasi antar Elit baik pemerintah maupun non-pemerintah yang dilakukan secara terorganisir dan teratur pastinya akan memabawa hasil yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja sebagai berikut :

”Untuk menjaga komitmen yang telah disetujui bersama tentunya untuk tokoh-tokoh masyarakat dalam peannggulan Covid-19 perlu adanya konsistensi yang baik untuk terus andil dalam penanggulangan Covid-19, jadi jangan lengah sedikitpun, apalagi tokoh-tokoh masyarakat seperti para ulama,ormas-ormas dan pengusaha yang memiliki masa yang cukup banyak kami tekankan untuk terus konsisten dalam membantu penanggulangan Covid-19 karena mereka itu agen dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja”(wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Adi Purnawa selaku Kepala Desa Kedungreja tersebut dapat disimpulkan bahwasannya konsistensi dalam menjaga indikator penanggulangan Covid-19 seperti protokol kesehatan bagi masyarakat atau tokoh masyarat yang memiliki basis masa adalah yang mutlak dilakukan untuk membantu Satgas Covid-19 dan juga pemerintah dalam mencapai Kedungreja bebas virus Covid-19.Hal yang menudukung pernyataan tersebut juga disampaikan oleh KH.Ahmad Shodiqin sebagai salah satu tokoh agama dalam wawancara berikut ini :

”Saya sendiri sebagai salah satu ulama mendukung penuh apa yang dilakukan pemerintah desa dan satgasnya, dalam penerapan protokol

kesehatan juga sampai saya tekankan bahwa karena Covid-19 hukum mengerjakan sholat di Masjid Darunnajah untuk yang sepuh-sepuh itu tidak diwajibkan, karena bisa membahayakan mereka juga apabila tertular dari orang lain. Saya juga membuat sekat-sekat antar saf untuk kebutuhan protokol kesehatan, karena hal ini yang terbaik untuk masyarakat, meskipun ada yang mendukung dan tidak mendukung, tapi itu hal biasa” (wawancara Ahmad Shodiqin, 15 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan KH.Ahmad Shodiqin tersebut dapat disimpulkan bahwasannya. KH.Ahmad Shodiqin selaku tokoh agama juga memiliki kesadaran terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan seperti apa yang sudah di musyawarahkan dan dikoordinasikan dengan Adi Purnawan selaku ketua Satgas Covid-19 Kedungreja. Selain itu pernyataan serupa juga hadir pada komandan Pemuda Pancasila Kedungreja Distiyo Prayogo dalam wawancara mengenai komitmen sebagai berikut :

”Tentu kita sebagai pemuda pancasila kedungreja selaku berkomitmen bersama-sama dengan pemerintah desa dan juga satgas covid-19 gabungan untuk menanggulangi Covid-19 yang ada di Desa Kedungreja sampai tuntas”. (wawancara Distiyo Prayogo, 21 Februari 2023)

Dari wawancara tersebut dengan komandan Pemuda Pancasila yaitu Distiyo Prayogo sangat berkomitmen dan juga konsisten mengambil peran di Desa Kedungreja dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 hingga selesai. Hal serupa juga disampaikan oleh Ady Gunantoro dalam wawancara mengenai komitmennya terhadap penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja.

”Meskipun peran GenRe di desa Kedungreja sendiri masih cukup minim ya mas, tapi kita tetep konsisten untuk terus berkomitmen mendukung pemerintah desa dan satgasnya dalam menjalankan tugas mulia yaitu penanganan Covid-19”(wawancara Ady Gunantoro,20 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Ady Gunantoro selaku ketua GenRe Kedungreja tersebut dapat disimpulkan bahwa GenRe Kedungreja juga mendukung penuh komitmen pemerintah desa khususnya dalam wadah Satgas Covid-19 untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 yang ada di desa Kedungreja.

e. Berbagi Pemahaman

Dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 di Kedungreja. Elit-elit lokal pemerintah dan non-pemerintah pastinya memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda terkait penanggulangan Covid-19 di Kedungreja. Khususnya elit non-pemerintah karena terdiri dari latarbelakang organisasi dan lingkungan berbeda tentunya memiliki konsesus dan pastinya tujuan atau kepentingan sendiri dalam penanggulangan Covid-19. Oleh karena Satgas Covid-19 Kedungreja yang dipimpin oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa juga memiliki tugas menyatukan konsesus atau pandangan sehingga dapat menyatukan tujuan. Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa dan pimpinan satgas Covid-19 Kedungreja sebagai berikut :

”Sebenarnya tidak ada pemahaman khusus untuk bersatu itu tidak ada, jadi kami mengalir saja untuk pembagian tugasnya toh juga dilapangan biasanya kami lakukan bersama-sama juga, jadi memang kebersamaan dalam menanggulangi Covid-19 itu yang menyatukan pemahaman kita akan wasapada terhadap Covid-19 ini”(wawancara Adi Purnawan, 6 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan Adi Purnawan selaku Kepala Desa dan pimpinan Satgas Covid-19 desa Kedungreja tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk berbagi pemahaman sendiri tidak ada yang khusus seperti visi dan misi yang dibuat untuk Satgas Covid-19 Kedungreja, namun pemahaman lahir dari kebersamaan yang timbul khususnya antara Satgas Covid-19 dengan teman-teman ormas dan tokoh masyarakat yang ada di desa Kedungreja. Seperti tokoh ulama KH. Ahmad Shodiqin yang juga tidak ada visi dan misi khusus, hanya kesadaran untuk membantu sesama khususnya dalam penegakan

protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah dan organisasi Nahdatul Ulama Ranting Kedungreja. Hal ini disampaikan KH.Ahmad Shodiqin dalam wawancara berikut ini :

”terkait pemahaman itu kita hanya pedomannya penegakan protokol kesehatan saja, dan paling berbagi informasi mengenai Covid-19 yang terbaru nanti saya sampaikan ke warga sekitar, namun tetap dalam konteks pemahaman saya saja, jadi memang tidak ada pemahaman khusus” (wawancara Ahmad Sodiqin, 15 Februari 2023)

Dalam wawancara dengan KH.Ahmad Shodiqin tersebut dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada visi atau misi khusus yang diberikan, namun hanya pemahaman terkait Covid-19 dan juga anjuran untuk menerapkan protokol kesehatan di masing-masing rumah ibadah yang ada di Desa Kedungreja. Selain tokoh agama ada pandangan yang serupa dari komandan Pemuda Pancasila yaitu Distiyo Prayogo yaitu dalam penanggulangan Covid-19 Pemuda Pancasila berpegang teguh pada misi kemanusiaan yang diemban oleh Pemuda Pancasila kedungreja. Hal ini disampaikan Distiyo Prayogo dalam wawancara berikut ini :

”untuk pemahaman sendiri kami berpegang teguh pada salah satu misi pemuda pancasila yaitu menolong sesama manusia yang membutuhkan bantuan khususnya yang ada di daerah sendiri, hal ini merupakan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari mas”.(wawancara Distiyo Prayogo , 21 Februari 2023)

Seperti yang disampaikan oleh Distiyo Prayogo selaku komandan Pemuda Pancasila Kedungreja dapat disimpulkan bahwa Pemuda Pancasila pegangan sendiri dalam keaktifannya membantu penanggulangan Covid-19 di Kedungreja. Dalam kalangan remaja yang diwakili oleh Ady Gunantoro sebagai Ketua GenRe Kedungreja juga menyampaikan pendapatnya mengenai berbagi pemahaman. Hal ini disampaikan Ady Gunantoro dalam wawancara sebagai berikut :

”pemahaman yang kami dapat ya atas dasar visi dan misi kami saja mas dalam GenRe, karena membantu penanggulangan Covid-19 juga termasuk, ya kami ikut mendukung saja apa yang dilakukan pemerintah dan satgas”.(wawancara Ady Gunantoro,20 Februari 2023)

Dari aapa yang disampaikan oleh Ady Gunantoro tersebut bahwa Visi dan Msis GenRe Kedungreja sendiri selaras dengan tugas pemerintah dan Satgas dalam menaggulangi Pandemi Covid-19 di Kedunreja

f. Hasil Sementara

Dalam kaitannya dengan tata kelola penanggulangan Covid-19 yaitu kolaborasi Elit Lokal pemerintah Desa, Kolaborasi yang terjadi dalam sistem Satgas Covid-19 Kedungreja awal-awalnya memperoleh hasil yang cukup terlihat khususnya dengan di terapkannya protokol kesehatan yang cukup ketat oleh Satgas Covid-19 Kedungreja yang selalu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga jarak, memakai masker dan juga tidak membuat kerumunan yang berlebihan. Hal ini disampaikan oleh Adi Purnawan selaku Kepala Desa Kedungreja yaitu sebagai berikut :

”Untuk hasilnya pastinya butuh waktu agar masyarakat dapat membiasakan diri dengan protokol kesehatan, , karena pada saat itu awal antara november dan desember 2020 kalau tidak salah Satgas langsung dibentuk lalu kita langsung bergerak untuk penerapan protokol kesehatan, dan hasilnya cukup efektif, menurut saya hal ini juga disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat juga akan terkena virus Covid-19 khususnya masyarakat yang memang sehari-harinya yang bekerja dan bertemu dengan orang banyak” (wawancara Adi Purnawan,6 Februari 2023)

Dari wawancara tersebut dengan Adi Purnawan selaku Kepala Desa dan Satgas Covid-19 Kedungreja. Hasil dari kolaborasi antara elit lokal dalam penanggulangan Covid-19 tentunya tidak langsung jadi atau ada, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masyarakat membiasakan diri dengan segala jenis protokol kesehatan yang ada.Hal serupa juga disampaikan oleh Distiyo Prayogo sebagai berikut :

”Kalau hasil sementara itu terlihat dalam organisasi pemuda pancasila sendiri mas, karena saya menekankan pada mereka untuk patuh terhadap protokol kesehatan, setidaknya menjadi contoh untuk keluarga dan masyarakat di sekitar mereka”(wawancara Distiyo Prayogo,21 Februari 2023)

Dari wawanara dengan Distiyo Prayogo tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil sementara dari penerapan protokol kesehatan sebagai salah satu indikator penanggulangan Covid-19 terlihat di Internal Pemuda Pancasila. Hal yang sama juga disampaikan Ady Gunantoro selaku Ketua GenRe Kedungreja sebagai berikut :

” Kalau hasil sementara paling dari anggota-anggota GenRe sendiri mas jadi kalau ada pertemuan, minimal kita semua memakai masker dan hal tersebut atas dasar kesadaran diri sendiri saja,jadi tanpa perintah atau paksaan dari saya”(wawancara Ady Gunantoro, 20 Februari 2023)

Dari wawancara dengan Ady Gunantoro tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil sementara terlihat dari patuhnya anggota GenRe dalam penanggulagn Covid-19 atas kesadaran masing-masing.

C. Sinergitas Elit Lokal Pemerintah

a. Komunikasi

Elit lokal pemerintah Desa Kedungreja memanfaatkan dua metode dalam bersinerg dengan elit lainnya, yaitu dialog tatap muka secara langsung dan media sosial daring secara online. Hal ini dilakukan karena adanya aturan ketat selama pandemi Covid-19. Proses sinergitas dengan dialog tatap muka hanya melibatkan Polsek Kedungreja dan Puskesmas dalam bentuk musyawarah terbatas untuk koordinasi penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa Kedungreja. Kecamatan Kedungreja turut serta sebagai inisiator, karena pemerintah pusat tersebut merupakan gerbang sebagian besar bantuan yang didapatkan oleh Pemerintah Desa.

Pihak lain yang turut penting dalam proses dialog tatap muka adalah pihak Puskesmas Kedungreja yang diwakili oleh Kepala Puskesmas. Hal ini dilakukan karena perspektif penanggulangan Covid-19 dari setiap instansi tentu akan berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan perspektif dari Puskesmas sebagai perspektif penting dalam tata kelola penanggulangan Covid-19. Proses dialog ini dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensi persoalan yang hendak dibahas dalam dialog tersebut. Selain dengan Elit Puskesmas, proses kolaborasi juga melibatkan Elit lain seperti Elit Kepolisian dan TNI. Mereka berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Kedungreja. Selain itu, Elit lainnya juga memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan dukungan dalam hal penanganan pandemi.

Pemerintah Desa Kedungreja memanfaatkan media sosial daring untuk berkomunikasi dengan elit lainnya selama pandemi Covid-19. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi terus berjalan meskipun dalam situasi yang sulit. Penggunaan media sosial ini memungkinkan elit untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien dalam hal penanganan pandemi. Sinergitas antara elit lokal dan elit lainnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan pandemi Covid-19. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat Desa Kedungreja mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan dalam menghadapi pandemi. Hal ini dilakukan dengan cara menyelaraskan kebijakan dan strategi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Kedungreja.

b. Koordinasi

Saat proses terjadinya sinergitas elit lokal pemerintah dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 tentunya memiliki unsur dimana setiap elite lokal pemerintah memiliki wadah dalam untuk melakukan musyawarah dan ikut berpartisipasi dalam merumuskan strategi tata kelola yang baik untuk menyatukan konsensus dan tujuan sehingga penanggulangan pandemi Covid-19 di Kedungreja menjadi semakin terkelola dengan baik dan juga berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Semua Elit berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 tentunya memiliki kepentingan dan juga argumen sendiri, karena hal itu diperlukan suatu wadah yang dalam hal ini yaitu Satgas Covid-19 Desa Kedungreja yang dipimpin oleh Kepala Desa Adi Purnawan.

Elit Kapolsek AKP Suparjo dan Danramil 12/Kedungreja Kapten Inf. Tasino juga menyatakan bahwasannya adanya koordinasi dengan pihak Forkomimpcam dan juga Desa-Desa di Kecamatan Kedungreja dalam rangka melakukan pencegahan serta penanggulangan Pandemi Covid-19 khususnya dalam sektor keamanan dan ketertiban protokol kesehatan yang ada di Kecamatan Kedungreja khususnya Desa Kedungreja, kolaborasi tersebut tentunya didapatkan dari hasil musyawarah dan koordinasi antar lembaga terkait sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan tugasnya sesuai yang di bebaskan kepada instansi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Darsiyem selaku Kepala UKM Pengembangan Puskesmas Kedungreja juga menyatakan bahwasannya dalam pelayanan vaksinasi di Desa Kedungreja dalam melakukannya diawali dengan koordinasi dan juga musyawarah dengan utusan dari Kepala Satgas Covid-19 Kedungreja yaitu Adi Purnawan yang diwakili oleh Yani A.Md.Keb selaku Kaur Umum dan Perencanaan

D. Sinergitas Elit Lokal Non-Pemerintah

a. Komunikasi

Proses sinergitas antara elit desa baik pemerintah dan non-pemerintah dalam wadah Satgas Covid-19 di Desa Kedungreja dilakukan dengan cara offline yaitu tatap muka maupun secara daring yaitu dengan media berbasis teknologi sosial media. Kedua proses tersebut merupakan dua metode yang dilakukan dalam membangun sinergitas antar elit maupun anggota Satgas Covid-19. Keduanya dilakukan dengan konteks kondisi dan urgensi yang berbeda-beda, karena dalam Dialog tatapmuka akan sangat beresiko dilakukan pada masa-masa pandemi Covid-19 meskipun protokol kesehatan telah dilakukan dengan ketat, oleh karena itu sebagai koordinasi, dialog, maupun komunikasi yang dilakukan menggunakan media teknologi berbasis daring karena selain mudah dan praktis juga hal ini sesuai dengan prinsip Satgas Covid-19 Kedungreja yaitu tidak terlalu membuat Kerumunan.

Ketua Satgas Covid-19 Kedungreja sendiri tidak melarang dilakukannya dialog tatap muka, namun harus dengan protokol kesehatan yang ketat, dan juga kondisi yang harus kondusif. Komunikasi berbasis tatap muka sendiri di Desa Kedungreja biasanya dilakukan untuk melakukan pembekalan dan edukasi bagi

tokoh-tokoh masyarakat yang memang belum tersentuh dan belum memahami teknologi dan informasi yang berkembang. Dialog tatap muka dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak dimungkinkan secara daring, hal ini juga untuk mempertegas bahwa Satgas Covid-19 di bawah pimpinan Adi Purnawan dengan tetap konsisten selalu mentaati aturan protokol kesehatan yang ada.

b. Koordinasi

Dalam tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19 Desa Kedungreja sendiri tentunya sinergitas yang terbangun terkait musyarah yang terjadi diantara elit, baik elit pemerintah maupun elit non-pemerintah. Dalam musyawarah dengan elit non-pemerintah, biasanya elit non-pemerintah dimintai pendapat dan pandangan terkait sudut pandangnya dan terkait background organisasi dari elit tersebut. Elit yang bersinergi dengan pemerintah Desa dalam musyawarah yang terjadi baik formal maupun normal dimintai bantuan sebagai agen pembantu pemerintah, baik dalam hal Edukasi, Penegakan, maupun pengawasan untuk penanggulangan Covid-19 di Kedungreja. Dalam pelaksanaannya Musyawarah seringkali dilakukan dengan secara daring dikarenakan pandemi Covid-19 yang ada di Desa Kedungreja. Sebagian besar musyawarah yang dilakukan dengan instansi non-pemerintah, dilakukan dengan media daring, hal ini dikarenakan untuk mentaati protokol kesehatan yang ada namun tetap ada penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang ada, contohnya apabila mengadakan musyawarah dengan para tokoh agama desa untuk distribusi informasi terkait kerumahan, efektifnya dilakukan dengan offline karena tidak semua tokoh agama mengerti akan teknologi komunikasi yang ada .

Desa Kedungreja cukup aktif dalam memberikan pemahaman dengan musyawarah terkait penanggulangan Covid-19 di rumah-rumah ibadah yang ada di Kedungreja, hal ini mengingatkan karena rumah ibadah seperti Mushola, Masjid dan Gereja-gereja yang ada di Kedungreja. Metode musyarah sendiri juga dilakukan dalam pengkondisian protokol kesehatan yang ada di masyarakat, organisasi seperti Kokam, Banser, dan Pemuda Pancasila juga turut ikuut andil dalam bersinergi untuk pengkondisian tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

Penanggulangan Covid di Kedungreja tidak terlepas dari peran Elite-elite lokal di Desa Kedungreja, baik *Elite Local Government* maupun *Elite Local Non-Government*. Khususnya *Elite Government* yang terdiri dari berbagai elemen institusi serta lembaga terkait yang membantu penanggulangan Covid-19, memiliki peran-perannya masing-masing sehingga dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lengkap dalam menjalankan perintah atau dalil institusi yang berada di atasnya dalam melakukan kebijakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan warganya serta menekankan kedisiplinan warganya. selain itu koordinasi yang dilakukan juga cukup menyeluruh dengan elit lokal pemerintah lainnya. Seperti dengan pihak elit lainnya , Kepala Desa Kedungreja selaku Ketua Satgas Covid-19 pada saat awal pandemi, melakukan koordinasi yang cukup Intense berbagai elemen Elit atau tokoh di masyarakat. Dalam kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 ini sendiri dilakukan dengan prinsip sinergitas dalam konteks kolaborasi yang baik antar Elit sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dan juga menyatukan konsensus bersama terkait pandangan dan juga tujuan agar selalu berada di jalur yang sejalan anatara satu Elit dengan Elit lokal pemerintah lainnya. Elit lokal pemerintah sendiri sudah tergabung dalam satu kesatuan instansi yang besar dan cukup terorganisir, baik dari tingkat Desa atau Kelurahan Kedungreja maupun tingkat Kecamatan Kedungreja. Kepemimpinan fasilitatif diperlukan agar koordinasi dan pembagian tugas dan wewenang dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Kedungreja lebih baik. Lalu setiap elite lokal pemerintah dan non-pemerintah memiliki wadah dalam untuk melakukan musyawarah dan ikut berpartisipasi dalam merumuskan strategi tata kelola yang baik untuk menyatukan konsensus dan tujuan sehingga penanggulangan pandemi Covid-19 di Kedungreja menjadi semakin terkelola dengan baik dan juga berjalan sesuai dengan rencana yang ada.

B. Saran

1. Dalam berkolaborasi dan bersinergitas khususnya penanggulangan Covid-19 di tingkat regional Desa harus lebih ditingkatkan dalam hal tujuan dan juga Visi dan Misi nya sendiri, karena setiap Desa memiliki ciri khas tersendiri
2. Partisipasi Remaja dan Pemuda harusnya lebih ditingkatkan khususnya dalam hal edukasi agar informasi yang dituju dapat terdistribusi dengan baik
3. Peran Digitalisasi juga perlu dimaksimalkan sehingga dapat menyentuh orang banyak dalam hal pemahaman informasi

Daftar Pustaka

- Abdul .2017.Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal.Yogyakarta.Pustaka Pelajar
- Abdul, dkk. 2021. Tentang Kuasa : Lingkup Kajian.Metodologi.dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintah.Yogyakara.Gadjah Mada University Press.
- Afriliyanti .2020. Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Azhar Kasim dkk. 2021. Implemetasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Gvernannce.Universitas Indonesia
- Bardach, E. (1998). *Getting Agencies to Work Together: The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship*. Brookings Institution Press
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Review Article Stakeholder Analysis : A Review. *Health Policy and Planning*,
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*,
- Dwiyanto, A. (2011). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. UGM.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, Mencari Identitas*. Gadjah Mada University Press
- Edward W.Said. 2003. *Kekuasaan Politik dan Kebudayaan*.ter,Hartono Hadikusumo. Jakarta.Pustaka Prometheus.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Ertiana Dwi.2020.Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.Kediri.Darmabakti Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
- Gaffar, A., 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Gerry R.J.2021. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (

Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan).Minahasa Selatan.

Guno Tri.2015. Politik Ambivalensi : Nalar Elit di Balik Pemenangan Pilkada.

Yogyakarta.Polgov.

Harmana dkk.2021.Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Institute Pemerintah Dalam Negeri.

Hanberger, A. (2004). Democratic Governance and Evaluation. Sixth EES (European Evaluation Society) Conference

Hampden-Turner, C. (1990) Creating Corporate Culture: From Discord to Harmony,
Massachusetts-USA, Addison-Wesley Publishing Company

Henry, N. 2007. Public Administration and Public Affairs (10th ed.). Prentice Hall of India

Hermawan.2016. Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. Universitas Jember.

Hosmer, L. T. 1995. Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics, Academy of Management Review

Indradi, S. 1986. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Dharma Malang

Jeffrey Winters.2011. Oligarki.ter,Zia Anshor.Jakarta.Gramedia Pustaka Utama

Kurnia,dkk.2020.Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad Dalam Penangan Covid-19 Tahun 2020.
Institute Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas

Kusniati.2022.Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja Terhadap Pernikahan Beda Agama. UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri

Maunde Riski.2019.Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Manik.2022.Implementasi Peran Kapolsek Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polsek Imogiri Bantul. Universitas Gunung Kidul

Milles & Hubberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia

Mulyana,Dedey. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi

- dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Mosca, G. 1939. *The Ruling Class*. New York. McGraw Hill
- Ninggih Nurhidaya. 2020. *Sinergitas Stakeholders di Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)*. Universitas Muhammadiyah Mataram. Lombok Timur.
- Nurrohman Bayu. 2021. *Penguatan Kolaborasi dan Sinergi di Level Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semarang
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo
- Rasmala Kiki dkk. 2021. *Sinergitas Pemerintah Desa Salohe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Penyelenggaraan BUMDESA di Kabupaten Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Sinjai. Sinjai
- Rahmawati, Triana et al. 2014. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*
- Rosidin Udin. 2020. *Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut*. Universitas Padjajaran. UMBARA
- Sarja. 2020. *Sinergitas Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Membangun Ekonomi Desa.. Purbalingga*. *Jurnal Madaniyah*
- SP. Varma, *Teori Politik Modern*, ter. Yohannes Kristiarto, dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarmo dkk. 2021. *Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Universitas Sebelas Februari. *Jurnal Wacana Publik*
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Smart Media
- Waardenburg, M., Groenleer, M., de Jong, J., & Keijser, B. 2020. *Paradoxes of Collaborative Governance: Investigating the Real-Life Dynamics of Multi-Agency Collaborations Using a Quasi-Experimental Action-Research Approach*. *Public Management Review*,
- Yelvi .2021. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. UIN SUSKA Riau

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan pihak POLSEK Kedungreja



2. Wawancara dengan Kepala Desa Kedungreja



3. Wawancara dengan pihak Puskesmas



4. Dokumentasi Desa



5. Dokumtasi Posko Banjir Saat Covid



6. Dokumentasi NU Ranting Kedungreja





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : Fauzaan Arif Sumanto
2. NIM : 1906016059
3. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 26 Maret 2001
4. Alamat : Kedungreja, RT 06/RW 08
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
8. Riwayat Pendidikan :
- 1. SDN 01 Kedungreja
 - 2. SMPN 02 Kedungreja
 - 3. SMAN 01 Sidareja
9. No HP : 083840132443
10. Email : fauzaanarif26@gmail.com

Semarang, 30 Februari 2023

Fauzaan Arif Sumanto